

TENTARA KEAMANAN RAKYAT

**(Pembentukan dan Perkembangannya
menjadi Tentara Nasional Indonesia)**

SKRIPSI



Oleh :

Yoana Sri Lestari

NIM : 87214029

NIRM : 8750270028

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
1995**

TENTARA KEAMANAN RAKYAT

**(Pembentukan dan Perkembangannya
menjadi Tentara Nasional Indonesia)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah**

Oleh :

Yoana Sri Lestari

NIM : 87214029

NIRM : 8750270028

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

1995

SKRIPSI

TENTARA KEAMANAN RAKYAT
(Pembentukan dan Perkembangannya
menjadi Tentara Nasional Indonesia)

Oleh :

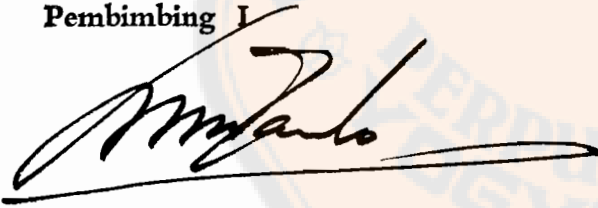
Yoana Sri Lestari

NIM : 87214029

NIRM : 87502720028

Telah disetujui oleh:

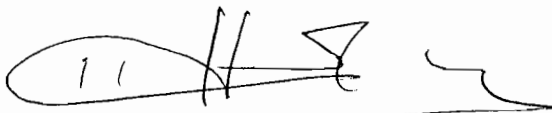
Pembimbing I



Drs. G. Moedjanto, M.A.

Tanggal, 28 Oktober 1994

Pembimbing II



Dr. P.J. Suwarno, S.H.

Tanggal 4 November 1994

Priyono Marwan
(Dr. A. Priyono Marwan, S.J.)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha kasih atas segala karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi yang berjudul "Tentara Keamanan Rakyat, Terbentuk Dan Perkembangannya Menjadi Tentara Nasional Indonesia" ini penulis susun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan, skripsi ini tidak akan terwujud. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. G. Moedjanto, M.A., yang penuh kesabaran dan bijaksana telah menjadi pembimbing pertama.
2. Bapak Dr. P.J. Suwarno SH, yang telah menyediakan waktunya menjadi pembimbing kedua disela-sela kesibukannya yang padat.
3. Bapak/Ibu Pegawai Perpustakaan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Perpustakaan Wilayah DIY, Perpustakaan Museum Angkatan Darat Yogyakarta, dan Perpustakaan Monumen Yogya Kembali, atas bantuannya meminjamkan buku-buku untuk penulisan skripsi ini.
4. Bapak-bapak eks anggota Tentara Keamanan Rakyat atau pejuang tahun 1945, yang telah memberikan keterangan tentang tanggapan pemuda terhadap pembentukan Tentara Keamanan Rakyat.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. Kedua orang tua dan saudara-saudara penulis yang telah membantu baik moril maupun materiil.

6. Rekan-rekan dan semua saja yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam pembuatan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Kasih memberikan balasan yang berlipat ganda kepada beliau-beliau yang penulis sebutkan di atas.

Akhirnya penulis menyadari bahwa "tiada gading yang tak retak", demikian juga dengan skripsi ini masih terdapat kekurangannya. Maka mohon maaf dan kritik saran yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi yang masih jauh dari sempurna ini bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu sejarah.

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

MARET 1995

PENULIS



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Perumusan Variabel dan Pem- batasan Istilah	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Landasan Teori	8
G. Metode Penelitian	11
BAB II. LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN TENTARA KEAMANAN RAKYAT	15
A. Faktor Tak Langsung	17
B. Faktor Langsung	30
BAB III. TERBENTUKNYA TENTARA KEAMANAN RAK- YAT	44
A. Kapan Tentara Keamanan Rakyat Terbentuk	45
B. Proses Terbentuknya Tentara Ke- amanan Rakyat	54
C. Tanggapan Pemuda Terhadap Pem- bentukan Tentara Keamanan Rak- yat	61
D. Organisasi Tentara Keamanan Rakyat	70

BAB	IV. PERKEMBANGAN TENTARA KEAMANAN RAKYAT MENJADI TENTARA NASIONAL INDONESIA	92
	A. Terbentuknya Laskar atau Badan Perjuangan	92
	B. Hubungan Tentara Keamanan Rakyat dengan Laskar Rakyat	99
	C. Perkembangan Tentara Keamanan Rakyat Menjadi Tentara Nasional	104
BAB	V. PENUTUP	116
	A. Kesimpulan	116
	B. Kelancaran dan Hambatan Penelitian	119
	C. Saran-saran	119
	DAFTAR PUSTAKA	121
	LAMPIRAN	126

ABSTRAK

Setelah sekian lamanya berada di dalam belenggu penjajahan, pada tanggal 17 Agustus 1945 rakyat Indonesia dengan Proklamasi menyatakan diri bangsa yang merdeka. Negara yang baru diproklamasikan tersebut ternyata harus menghadapi ujian yang berat, karena kedatangan Sekutu yang diboncengi oleh NICA ke Indonesia, bermaksud mengembalikan Indonesia kepada pihak Belanda. Disamping itu dalam suasana negara yang telah merdeka, masih ada tentara Jepang yang bersenjata dan tidak mau mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu negara RI belum memiliki tentara kebangsaan yang bertanggung jawab untuk mempertahankan negara.

Membahas tentang Tentara Keamanan Rakyat atau yang disingkat dengan TKR, maka ingatan kita harus berputar kembali ke tahun awal kemerdekaan RI pada tahun 1945, 1946, 1947, dimana TKR terbentuk dan akhirnya berkembang menjadi Tentara Nasional Indonesia sebagai penyempurnaan-nya.

Di awal Proklamasi kemerdekaan RI belum mempunyai tentara untuk mempertahankan kemerdekaan. Pemerintah tidak segera membentuk tentara setelah negara RI diproklamasikan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu pemerintah hanya membentuk suatu Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai pengganti tidak dibentuknya tentara nasional. Sebab pemimpin-pemimpin Republik pada waktu itu (Soekarno - Hatta) mempunyai strategi nasional yang telah digariskan yang bertumpu pada politik diplomasi. Kebijaksanaan pemerintah tersebut ternyata menimbulkan ketidakpuasan atau kekecewaan di kalangan pemuda yang lebih berorientasi pada perjuangan senjata. Mereka menghendaki segera dibentuk tentara nasional, sehingga akhirnya mereka membentuk organisasi-organisasi perjuangan sebagai wadah untuk ikut membantu mempertahankan kemerdekaan RI. Dengan demikian disamping BKR sebagai badan resmi yang dibentuk pemerintah, juga terdapat badan-badan perjuangan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pada hakikatnya BKR bukanlah tentara melainkan korps bantuan setempat yang merupakan bagian dari Badan Peninglong Keluarga Korban Perang (BPKKP) untuk menjamin ketertarikan umum. Tetapi permulaan yang sederhana ini menjadi embrio bagi kelahiran tentara nasional.

Kebijaksanaan pemerintah untuk menunda pembentukan suatu tentara nasional, ternyata menimbulkan situasi bertambah gawat. Kemerdekaan negara RI makin terancam dengan datangnya tentara NICA untuk menjajah kembali, disamping juga menghadapi tentara Jepang dengan Sekutu. Hampir di semua kota-kota besar terjadi pertempuran baik menghadapi Jepang, Sekutu dan NICA. Perlawanan dan perebutan kekuasaan yang dilakukan secara spontan pada pelbagai tempat tanpa adanya kesatuan komando sehingga terasa kurang efisien dan kurang efektif serta memakan banyak korban.

Ketika Indonesia diliputi oleh api peperangan dan korban jiwa yang berjatuhan dalam perebutan kekuasaan politik dan militer dari tentara Jepang dan menanggulangi bentrokan-bentrokan dengan Sekutu dan NICA, maka pemerintah menyadari betapa pentingnya sebuah tentara dalam mempertahankan kemerdekaan. Adanya orang-orang bekas KNIL, PETA, Heiho dan lainnya mendukung dibentuknya tentara. Untuk itu pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945 membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Ini berarti merupakan awal dari lahirnya tentara kebangsaan Indonesia dan BKR merupakan embrionya. Disamping TKR sebagai tentara kebangsaan juga terdapat berbagai macam laskar rakyat atau badan perjuangan yang ikut serta berjuang mempertahankan negara. Hal ini perlu dipersatukan sehingga sebagai alat pertahanan, tentara benar-benar kuat apalagi antara laskar sendiri sering terjadi bentrokan juga dengan TKR. Maka dengan melalui perubahan-perubahan nama dan organisasi, Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesia tanggal 3 Juni 1947, sebagai tentara nasional.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara yang dianggap sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama, terlepas dari ideologinya tentu mempunyai tugas untuk menyelenggarakan beberapa fungsi yang mutlak diperlukan. Demikian juga negara kita yang memiliki tujuan seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

"Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Oleh karena itu negara menyelenggarakan beberapa fungsi umum yang diperlukan :¹ pertama, melaksanakan fungsi sebagai penertiban (law and order) yang dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan pengacauan yang dapat mengganggu tercapainya tujuan yang menjadi cita-cita bersama; kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, yang dimanifestasikan dalam usaha-usaha pembangunan seperti apa yang kita kenal sekarang dengan adanya Repelita; ketiga, melaksanakan pertahanan yang difokuskan untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan serta menanggulangi

¹Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia, 1986), h. 46.

adanya ancaman yang datang dari luar dengan mengabaikan bahaya yang ada di dalam; dan keempat, menegakkan keadilan yang dapat dilakukan lewat badan-badan pengadilan.

Dari keempat fungsi minimum yang diselenggarakan negara tersebut, dua diantaranya yaitu fungsi untuk melaksanakan penertiban dan pertahanan, memiliki kesamaan unsur pokok yang berkaitan dengan kekuatan dan ketahanan suatu negara. Untuk melaksanakan dua fungsi tersebut perlu dilengkapi dengan alat pertahanan negara, sebab dalam merealisasikan cita-cita yang menjadi tujuan negara akan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang harus diatasi. Oleh karena itu negara harus mempunyai kekuatan untuk menanggulangi bahaya yang mengancam baik dari dalam maupun dari luar baik yang langsung maupun tidak langsung mengganggu keberadaannya. Kekuatan tersebut merupakan ketangguhan bangsa yang kita kenal dengan ketahanan nasional.²

Dalam rangka menegakkan ketahanan nasional yang bertujuan melestarikan perjuangan bangsa, maka diupayakan adanya pertahanan dan keamanan nasional oleh rakyat semesta. Hal ini diatur juga dalam Bab XII Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pertahanan negara yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara". Pernyataan itu mengandung pengertian bahwa tugas pertahanan negara menja-

²Lemhannas, Kewiraan Untuk Mahasiswa (Jakarta: Gramedia, 1985), h. 44.

di tanggungjawab seluruh warga negara, bukan hanya tanggungjawab pribadi atau golongan tertentu. Akan tetapi perlu disadari bahwa TNI muncul sebagai kekuatan inti yang merupakan pokok dari segala bentuk pertahanan negara, baik dalam masa perang (kemerdekaan) maupun dalam masa damai.

Sebagai benteng pertahanan TNI berperanan besar dalam mempertahankan dan menyelamatkan negara dari berbagai tantangan. Sesungguhnya TNI lahir secara spontan untuk menjalankan dan membela Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila/UUD 1945.³ Oleh karena itu ada hubungan antara TNI dengan perkembangan negara RI. Untuk membahas perkembangan/lahirnya TNI tidaklah mungkin tanpa mempelajari atau dikaitkan dengan situasi negara setelah diproklamasikan. Pertumbuhan TNI seiring dengan pertumbuhan negara RI, TNI (Angkatan Perang) lahir sebagai anak kandung Proklamasi Kemerdekaan di tengah-tengah suasana revolusi.⁴

Pembangunan TNI dirintis dengan pendirian BKR dan melalui TKR, TRI. Proses inilah yang akan mewarnai pembahasan tulisan ini. Adanya alat pertahanan akan memperkuat kondisi negara-negara dalam menghadapi kemungkinan yang melemahkan dan menghancurkan negara proklamasi.

³A.H. Nasution, Kekaryaan ABRI (Jakarta: Seruling Masa, 1971), h. 53.

⁴T.B. Simatupang, Soal-soal Politik di Indonesia (Jakarta: Gaja Raja, 1956), h. 28.

Perlu diketahui bahwa tentara sebagai alat pertahanan negara tidak terbentuk segera setelah pemerintah RI terbentuk. Hal ini untuk membuktikan pada dunia luar bahwa Pemerintah RI sanggup dan mampu memelihara ketertiban dan keamanan. Usaha pertama dari Pemerintah RI dalam bidang pertahanan hanya membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada tanggal 22 Agustus 1945. Badan inilah yang nantinya diganti dengan TKR (Tentara Keamanan Rakyat). BKR dibentuk sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). BKR bukanlah tentara, melainkan suatu korps pejuang bersenjata yang bertugas menjaga ketentraman umum. Tetapi BKR mampu berperan menegakkan kedaulatan dan pertahanan negara sebagai pelopor melucuti senjata dari tangan Jepang.

Setelah satu setengah bulan melihat perkembangan situasi, pemimpin negara dan revolusi mulai menyadari adanya kesulitan untuk mempertahankan kemerdekaan tanpa suatu tentara (Angkatan Perang). Kebijakan pimpinan Pemerintah RI untuk menunda pembentukan tentara nasional akhirnya tak bisa dipertahankan lagi karena terbentuk kepada situasi keamanan yang makin bertambah gawat, yang mengancam kelangsungan hidup bagi negara proklamasi. Situasi ini karena ancaman dari militer Jepang yang masih bersenjata lengkap dan tidak mau mengakui pemerintah RI. Walaupun tidak semua penguasa Jepang demikian tetapi hal tersebut mengancam keberadaan negara RI. Ancaman lain yaitu mendaratnya tentara Sekutu dan NICA. Kondisi inilah yang mendorong

perlunya segera dibentuk tentara, sehingga dengan maklumat pemerintah tanggal 5 Oktober 1945 dibentuklah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang akhirnya berkembang menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Lahirnya Tentara Keamanan Rakyat penting dalam terwujudnya TNI sebagai tentara nasional yang telah menyelamatkan negara dari berbagai ancaman. Hal ini perlu diketahui oleh generasi muda sekarang untuk memahami betapa penting dan perlunya tentara untuk mempertahankan negara. Oleh karena itu penulis juga tertarik dengan masalah ini. Apalagi buku-buku tentang Tentara Keamanan Rakyat secara khusus belum ada, sehingga tulisan ini bisa menambah buku sejarah. Dengan memahami sejarah dapat menjadi teladan dalam pembelaan negara. Dalam tulisan ini penulis ingin menyajikan tentang "Tentara Keamanan Rakyat", Pembentukan dan Perkembangannya menjadi TNI. Tulisan ini akan membahas faktor penyebabnya, proses pembentukan, dan perkembangannya sampai menjadi TNI. Adapun periodisasi waktu yang diambil dalam penulisan skripsi ini berkisar dari tahun 1945 sampai tahun 1947. Tahun 1945 merupakan tahun terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat. Tahun 1946 merupakan tahun perkembangannya menjadi Tentara Keselamatan Rakyat dan Tentara Republik Indonesia. Sedangkan pembatasan sampai dengan tahun 1947, karena pada tahun tersebut TRI akhirnya menjelma menjadi Tentara Nasional Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana sejarah pembentukan Tentara Keamanan Rakyat dan perkembangannya menjadi TNI ?

Masalah di atas dapat dijabarkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih khusus sesuai dengan variabel yang akan diteliti.

1. Apakah faktor-faktor yang mendorong pembentukan Tentara Keamanan Rakyat ?
2. Bagaimana proses pembentukan Tentara Keamanan Rakyat ?
3. Bagaimana perkembangan Tentara Keamanan Rakyat sampai menjadi TNI ?

Dengan menjawab masalah-masalah tersebut diharapkan dapat menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui bagaimana sejarah pembentukan Tentara Keamanan Rakyat dan perkembangannya menjadi TNI.

Tujuan umum ini dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong pembentukan Tentara Keamanan Rakyat.
2. Untuk mengetahui proses pembentukan Tentara Keamanan Rakyat.

3. Untuk mengetahui perkembangan Tentara Keamanan Rakyat menjadi TNI.

D. Perumusan Variabel dan Pembatasan Istilah

1. Faktor yang melatarbelakangi pembentukan Tentara Keamanan Rakyat adalah situasi negara setelah proklamasi dengan adanya ancaman mendaratnya tentara Sekutu dan NICA serta ancaman dari tentara Jepang yang masih bersenjata lengkap dan tidak mau mengakui pemerintah RI. Terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat juga didukung oleh adanya bekas tentara KNIL pada jaman Hindia Belanda dan bekas tentara PETA, Heiho, Seinendan, Keibodan pada jaman pendudukan Jepang yang masuk ke dalam TKR.
2. Dalam memahami pembentukan TKR perlu dibahas tentang kapan waktunya, bagaimana proses pembentukannya, bagaimana tanggapan rakyat/pemuda terhadap pembentukan TKR, atau adanya maklumat pemerintah 5 Oktober 1945, bagaimana organisasinya, cara memasukkan anggota dan bagaimana pendidikan untuk membentuk perwira.
3. Perkembangan TKR menjadi TNI akan membahas mengenai penyempurnaan TKR menjadi TNI yang diwarnai oleh keberadaan Laskar-laskar Rakyat atau Barisan Rakyat dan hubungannya dengan TKR. Perkembangan TKR (Tentara Keamanan Rakyat) sampai menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui proses; Tentara Keamanan Rakyat (TKR) diganti nama Tentara Keselamatan Rakyat juga disingkat TKR, kemudian diganti Tentara Republik Indonesia (TRI) dan akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

E. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat diambil beberapa manfaat yaitu :

1. Bagi Pengetahuan Sejarah.

Penulisan ini diharapkan menambah khasanah pengetahuan tentang pembentukan dan perkembangan TKR menjadi TNI.

2. Bagi Pendidikan Sejarah.

Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengambil contoh dalam pembelaan negara.

3. Bagi Masyarakat Umum.

Dapat mengambil hikmah bahwa tentara lahir dari, oleh dan rakyat.

F. Landasan Teori

Tulisan ini akan membahas sejarah pembentukan Tentara Keamanan Rakyat sampai perkembangannya menjadi TNI. Tentara sangat penting bagi kelangsungan suatu bangsa dan negara. Tiap negara memerlukan adanya alat pertahanan yang disebut tentara tersebut. Bagi negara kita, adanya alat pertahanan (tentara) akan memperkuat kondisi negara dalam menghadapi segala kemungkinan yang dapat melemahkan dan mengancam negara proklamasi.

Sebagai pedoman kita perlu mengetahui arti "tentara" itu sehingga begitu berarti bagi pertahanan negara. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) karangan WJS. Poerwadarminto, tentara berarti kesatuan alat negara yang ter-

diri orang yang terlatih untuk berperang atau seluruh pasukan dari orang-orang yang berperang dan dapat disebut angkatan bersenjata.

Tentara Nasional Indonesia terbentuk melalui proses perkembangan dari TKR menjadi TRI dan barulah menjadi TNI. Dengan demikian TKR merupakan langkah awal adanya tentara. Buku-buku yang mengupas tentang TNI cukup banyak tetapi penulisan tentang sejarah TKR secara tersendiri dapat dikatakan belum ada. Kalaupun ada hanya merupakan sebagian kecil dari pertumbuhan dan perkembangan TNI, sebab TKR berhubungan dengan TNI. Jadi untuk membahas sejarah pembentukannya dapat menggunakan buku-buku TNI dan didukung dengan buku-buku lain tentang perjuangan mempertahankan negara. Buku-buku yang memuat pertumbuhan dan perkembangan TKR sampai TNI terlihat dalam karya A.H. Nasution dengan judul TNI jilid I dan II. Buku tersebut dipakai untuk menguraikan proses perkembangan TKR menjadi TNI.

Faktor-faktor pembentukan TKR meliputi situasi negara setelah proklamasi dan adanya bekas tentara KNIL, PETA, Heiho, Seinendan yang nantinya masuk TKR. Ancaman negara dari Sekutu dan NICA dikupas dalam buku karya A.H. Nasution yaitu TNI Jilid I dan II, Sedarah Perjuangan Nasional Di Bidang Bersenjata dan Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia. Selain itu mengenai kedatangan Tentara Sekutu dijelaskan oleh G. Moedjanto dalam buku Indonesia Abad ke-20 Jilid 1 dan buku Revolusi Indonesia Dan Hukum Internasional karya D. Sidik Suraputra yang membahas tentang cam-

pur tangan Inggris dan Belanda. Disamping itu didukung oleh buku Genesis Of Power karya Salim Said dan tentunya masih banyak buku lain yang mengupas tentang faktor pembentukan TKR.

Pembentukan TKR menjelaskan alasan perlunya TKR untuk menegaskan uraian sebelumnya, kapan TKR dibentuk, proses, organisasi, cara memasukkan anggota, tanggapan rakyat/pemuda terhadap pembentukan TKR, dan pendidikan TKR. Untuk menjelaskan masalah tersebut diantaranya memakai buku karya dan terbitan Dinas Sejarah TNI-AD/ABRI. Buku tentang Urip Sumohardjo karya Amrin Imran memuat tentang lahirnya TKR serta organisasi. Mengenal pendidikan bisa dilihat dalam buku Akademi Militer Yogya Dalam Kancan Perjuangan Pisik 1945-1949 dan Pendidikan perwira TNI-AD di Masa Revolusi, keduanya karya Moehkardi. Untuk mendapatkan data mengenai tanggapan pemuda/rakyat terhadap pembentukan TKR diperlukan wawancara sehingga lebih jelas dan merupakan temuan baru. Selain itu dapat dilihat dalam buku Pemuda Indonesia Dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa karya Ahmaddani G. dkk., Sumber lain tentang pembentukan TKR dapat dilihat secara jelas dalam tulisan yang termuat dalam harian Kedaulatan Rakyat tahun 1945-1947.

Perkembangan TKR sampai menjadi TNI banyak dikupas dalam buku karya Nasution berjudul Memenuhi Panggilan Tugas jilid 1 juga TNI jilid 1 dan 2. Juga buku karya Nugroho Notosusanto berjudul Sejarah Dan Pertahanan Keamanan dan buku Soedirman Prajurit TNI Teladan karya Dinas

Sejarah TNI-AD. Untuk perkembangan organisasi dipakai tulisan yang termuat di dalam Majalah Vidya Yuda No. 29/1979 dan No.48/1985. Adapun untuk mengupas keberadaan Laskar-Laskar Rakyat dan hubungannya dengan TKR menggunakan buku Rumpun Diponegoro Dan Pengabdiannya karya Dinas Militer Kodam VII/Diponegoro, Sejarah Revolusi Kemerdekaan 1945-1949 di DIY karya Tashadi dan tulisan berjudul Birokrasi Dan Gerak Rakyat Di Yogyakarta karya P.J. Suwarno, Politik Militer Indonesia 1945-1957 Menuju Dwi Fungsi ABRI karya Ulf Sundahaussen (terjemahan) dan masih ada buku-buku lain.

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif-analitis dengan berpijak pada sumber-sumber yang tersedia. Penelitian ini merupakan studi pustaka sehingga sumber yang dipakai banyak diambil dari buku-buku atau studi pustaka. Namun untuk memperjelas masalah tanggapan pemuda/rakyat terhadap pembentukan TKR khususnya diperlukan wawancara kepada bekas anggota TKR di sekitar Yogyakarta atau bekas kpejuang tahun 1945 yang mengetahui tentang pembentukan TKR.

Sebagai proses penulisan sejarah, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:⁵

⁵Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah (terjemahan) (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 34.

1. memilih subyek penelitian
2. mengajukan praduga-praduga
3. mengumpulkan sumber informasi (studi pustaka)
4. menganalisa sumber-sumber keterangan
5. interpretasi sejarah atas sumber-sumber yang diperoleh
6. penulisan.

Adapun sistematisasi penulisan skripsi ini akan dibagi dalam 5 bab dan tiap-tiap bab masih dibagi lagi dalam beberapa sub bab agar mudah dipahami oleh pembaca. Pembagian tersebut dapat dijelaskan secara garis besar sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat pertanggungjawaban penulis tentang tehnik dan metode penulisan skripsi ini. Dalam bab ini mencakup tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, rumusan variabel dan batasan istilah, manfaat penelitian, landasan teori dan metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini.

Dalam bab II akan diuraikan mengenai faktor-faktor atau latar belakang yang mendorong pembentukan Tentara Keamanan Rakyat. Kondisi negara setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang tidak aman menjadi faktor langsung. Kondisi negara terasa tidak aman dan justru semakin sulit karena ada gangguan sehingga situasi negara setelah satu setengah bulan merdeka semakin gawat. Hal itu karena masih ada tentara Jepang yang bersenjata lengkap dan tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Selain itu adanya an-

caman dari tentara NICA yang dibantu Sekutu untuk mengembalikan kekuasaan kolonial ke Indonesia. Hal ini berarti akan melenyapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Faktor itulah yang mendesak Pemerintah RI untuk membentuk TKR, apalagi didukung oleh adanya tenaga-tenaga yang sudah terlatih dan berpengalaman di bidang militer, yaitu bekas perwira KNIL, PETA, dan lainnya seperti Heiho, Seinendan dan Keibodan.

Bab III membahas tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat pada tanggal 5 Oktober 1945 dengan suatu Maklumat Pemerintah. Dalam pembahasannya dijelaskan alasan Pemerintah RI baru membentuk tentara pada tanggal tersebut. Tanggapan para pemuda terhadap pembentukan TKR ini sangat baik dan mendukungnya dengan mendaftarkan diri menjadi anggota TKR. Selain itu dibahas mengenai prosesnya sampai TKR sebagai tentara kebangsaan terbentuk dan organisasi TKR.

Dalam bab IV akan diuraikan perkembangan Tentara Keamanan Rakyat sampai menjadi Tentara Nasional Indonesia. Perkembangan TKR meliputi perubahan nama dan organisasi. Keberadaan laskar-laskar rakyat disamping TKR sering menimbulkan bentrokan-bentrokan, baik antara sesama laskar atau laskar dengan TKR. Keadaan ini perlu disatukan. Akhirnya Tentara Keamanan Rakyat berkembang menjadi Tentara Keselamatan Rakyat kemudian Tentara Republik Indonesia dan menjadi Tentara Nasional Indonesia. Organisasi TKR mengalami perubahan pada masa TRI.

Setelah masalah yang penulis teliti diuraikan dalam beberapa bab di atas maka dalam bab V akan penulis uraikan kesimpulan dari penelitian ini.



BAB II
LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN
TENTARA KEAMANAN RAKYAT

Sejarah adalah suatu kontinuitas atau kesinambungan. Peristiwa yang satu berkesinambungan serta erat hubungannya dengan peristiwa-peristiwa yang lainnya. Peristiwa yang terjadi tidaklah mungkin tanpa adanya satu hal yang mendorong atau melatarbelakanginya. Suatu hal yang mendorong timbulnya sesuatu atau menimbulkan akibat disebut faktor. Peristiwa 17 Agustus 1945 lahir karena dorongan bangsa Indonesia untuk merdeka. Kemerdekaan yang telah dicapai harus dipertahankan. Terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat sebagai perkembangan tentara di negara Indonesia, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. TKR lahir sebagai usaha untuk menjamin keamanan rakyat dan mempertahankan negara proklamasi dari ancaman yang mengganggu. Terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat dilatarbelakangi oleh beberapa faktor baik secara langsung maupun tak langsung.

Secara tak langsung terbentuknya TKR didukung oleh adanya warisan tenaga terlatih sebagai modal untuk mendirikan sebuah tentara, baik bekas tentara KNIL pada zaman Hindia Belanda maupun bekas tentara PETA (Pembela Tanah Air) dan Heiho khususnya pada zaman pendudukan Jepang. Itulah yang akhirnya menjadi inti anggota tentara. Faktor ini menjadi penghantar dan baru akan mempunyai arti pen-

ting bila didukung adanya faktor langsung sebagai api penyulutnya.

Dengan adanya tenaga terlatih dalam bidang militer tersebut, pemerintah dapat memanfaatkan sebagai modal untuk membentuk sebuah tentara sebagai alat pertahanan negara sebagaimana dimiliki oleh negara yang merdeka. Akan tetapi setelah proklamasi dan pemerintahan RI terbentuk, pemerintah RI tidak segera membentuk tentara. Oleh pemerintah hanyalah dibentuk suatu badan perjuangan yang disebut Badan Keamanan Rakyat (BKR) untuk menjamin keamanan Rakyat. Ada pertimbangan yang bersifat politis dan psikologis yang melatarbelakangi kebijaksanaan tersebut. Pertama, dalam rangka perjuangan diplomasi memperoleh pengakuan kedaulatan RI, pemerintah hendak menunjukkan kepada dunia, khususnya kepada Sekutu, bahwa pemerintah RI menganut politik "cinta damai". Kedua, pemerintah RI hendak menunjukkan kepada dunia, bahwa Republik Indonesia pimpinan Sukarno-Hatta adalah bukan republik fasis (militeristis) seperti yang dituduhkan oleh propaganda Belanda di luar negeri.⁶

Setelah melihat perkembangan situasi satu setengah bulan kemudian, pemimpin negara dan revolusi menyadari, bahwa akan sukarlah untuk mempertahankan kemerdekaan tanpa suatu Angkatan Perang (tentara). Kebijakan pimpinan

⁶ Moehkardi, Pendidikan Perwira TNI-AD di Masa Revolusi (Jakarta: P.T. Inaltu, 1979), h. 26. Lihat juga Nugroho Notosusanto, Sedjarah Dan Hankam (Djakarta: Lemhannas, 1960), h. 109. dan Salim Said, Genesis Of Power.

pemerintah RI untuk menunda pembentukan tentara nasional akhirnya tak bisa dipertahankan lagi karena terbentur kepada situasi keamanan yang kian bertambah gawat yang mengancam kelangsungan hidup bagi negara proklamasi. Masih adanya tentara Jepang yang bersenjata lengkap dan tidak mau mengakui pemerintahan RI, mendaratnya tentara Sekutu dan NICA merupakan ancaman bagi negara RI. Tentara Jepang yang masih bersenjata lengkap harus mempertahankan status quo dan angkatan perang Belanda dengan NICA-nya ingin mengembalikan kekuasaan kolonial ke Indonesia yang telah merdeka dengan bantuan Sekutu. Hal itu menimbulkan pertempuran rakyat hampir di semua kota besar, baik menghadapi tentara Jepang maupun Sekutu dan NICA⁷, sehingga situasi negara semakin gawat. Kondisi itulah yang menjadi faktor langsung terbentuknya tentara, sehingga pemerintah mengeluarkan maklumat tanggal 5 Oktober 1945 untuk membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

Faktor tersebut di atas akan menghantar dan mendorong terbentuknya TKR. Untuk memahami faktor-faktor tersebut akan diuraikan dalam penjelasan selanjutnya.

A. Faktor Tak Langsung

Seperti telah disebutkan di atas bahwa secara tak langsung terbentuknya TKR didukung oleh adanya warisan te-

⁷Moehkardi, *op. cit.*, h. 29 dan Nugroho Notosusanto, *Pejuang dan Prajurit* (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), h. 40. Lihat juga A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan jilid 2* (Bandung: Dinas Sejarah AD & Angkatan, 1977), h.

naga terlatih di bidang militer, sebagai modal untuk mendirikan tentara, baik pada zaman Hindia Belanda yaitu KNIL maupun zaman pendudukan Jepang, khususnya bekas tentara PETA (Pembela Tanah Air) dan Heiho. Mereka telah mendapatkan pendidikan atau pengalaman di bidang militer yang sangat bermanfaat untuk membentuk sebuah tentara. Sebab hal itu membutuhkan tenaga terlatih di bidang militer dan tangguh. Tenaga-tenaga itulah yang akhirnya menjadi inti anggota tentara dan cukup banyak mereka yang berhasil mempunyai kedudukan penting.

1. Putra Indonesia Dalam Angkatan Perang Belanda.

Bangsa Indonesia mengalami penjajahan Belanda dan Jepang. Zaman penjajahan merupakan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Tetapi selain penderitaan yang dialami bangsa Indonesia ternyata ada suatu hal yang bermanfaat yang diperoleh pada zaman tersebut. Hal itu bermanfaat bagi perkembangan bangsa dan negara Indonesia, misalnya dalam bidang pemerintahan dan militer. Disamping penderitaan, ada sesuatu yang berharga bagi tahap selanjutnya di dalam perjuangan mencapai kemerdekaan nasional, yakni kemahiran dalam bidang militer. Hal ini merupakan modal bagi perjuangan bersenjata dan untuk mendirikan organisasi militer atau tentara.

Pada zaman Hindia Belanda putra Indonesia ada yang masuk dalam Angkatan Perang Belanda yang disebut KNIL. Namun tidak semua Pergerakan nasional Indonesia memberi dukungan kepada para putra tersebut.

KNIL atau singkatan dari Koninklijke Nederlands Indische Leger adalah tentara resmi pemerintah kolonial (tentara Hindia Belanda). Dengan sendirinya KNIL merupakan salah satu alat untuk menegakkan kolonialisme di Hindia Belanda.⁸ Sikap Pergerakan Nasional Indonesia terhadap masuknya putra-putra Indonesia ke dalam Angkatan Perang Belanda boleh dikatakan memperlihatkan suatu dualisme. Di satu pihak terdapat keyakinan bahwa Angkatan Perang Belanda adalah aparat kolonialisme untuk menindas rakyat Indonesia, sehingga dengan demikian, masuknya putra-putra Indonesia ke dalam Angkatan Perang Belanda berarti ikut menindas rakyatnya sendiri. Di lain pihak terdapat kesadaran bahwa untuk mengisi kemerdekaan Nasional kelak (kalaupun tidak untuk mengisi kemerdekaan Nasional itu), diperlukan kemahiran atau skill pada bidang militer modern, baik di darat, laut maupun udara.⁹

Tempat yang paling sesuai untuk memperoleh kemahiran itu adalah Angkatan Perang Belanda. Cara itulah yang di pandang cocok untuk mengembangkan dan mendapatkan kemahiran militer. Hal itu sungguh berguna sebagai pegangan putra Indonesia untuk mengisi, membela dan mempertahankan kemerdekaan negara. Tidaklah mungkin dalam penjajahan ada pendidikan militer untuk kelak membela negara. Kemerdekaanpun belum diperolehnya. Oleh karena itu, kesempatan yang

⁸Tatang Sumarsono, Didi Kartasasmita, Pengabdian bagi Kemerdekaan (Jakarta: Pustaka Jaya, 1993), h. 36.

⁹Nugroho Notosusanto, op.cit., h. 64.

ada harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Walaupun ada pihak yang tidak mendukungnya, namun putra-putra Indonesia yang mempunyai kesadaran untuk mengisi kemerdekaan, maka mereka pun memasuki KNIL. Dengan demikian mereka mendapatkan pendidikan dan pengalaman militer dari Angkatan Perang Belanda yang akhirnya merupakan warisan yang sangat berguna untuk membentuk tentara.

Untuk menjadi opsir melalui jenjang kepangkatan yang panjang dan sulit. Hanya ada sejumlah kecil yang dapat menjadi opsir. Adapun pangkat tertinggi yang pernah dicapai oleh orang Indonesia adalah Mayor, dicapai oleh Urip Sumohardjo. Beliau lah yang akhirnya diserahi tugas oleh pemerintah untuk membentuk tentara nasional. pendidikan dan pengalaman di bidang militer bermanfaat untuk pembangunan tentara. Sebab bagaimana bila tak ada satupun putra putra Indonesia yang mempunyai pengalaman dan ketrampilan di bidang militer, sebagai modal mendirikan sebuah tentara. Padahal suatu negara yang merdeka seharusnya mempunyai tentara sebagai alat pertahanan negara.

Contoh putra-putra Indonesia eks KNIL selain Urip Sumohardjo, ialah S. Suryadarma, Didi Kartasmita, A.H. Nasution, T.B Simatupang, M.M. Rachmat Kartakusumah, A.Y. Mokoginta, Suwanto,¹⁰ dan masih banyak lagi.

Dengan adanya eks KNIL yang telah mendapatkan pendid-

¹⁰Nugroho Notosusanto, Tentang Peta Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia (Jakarta: Gramedia, 1979) h. 150.

dikan dan pengetahuan militer, maka bangsa Indonesia mempunyai tenaga-tenaga terlatih di bidang militer. Dengan demikian sewaktu Pemerintah RI membutuhkan tentara sudah memiliki tenaga yang terampil dan profesional. Apalagi perwira berpendidikan Belanda lebih bersifat "military manager".¹¹ Disatu pihak KNIL lebih mementingkan kepemimpinan dan di lain pihak PETA mementingkan keberanian. Sehingga umumnya orang-orang eks KNIL lebih ahli dalam kepemimpinan atau bidang organisasi. Namun di dalam pembentukan dan perkembangan tentara keduanya saling melengkapi.

1. Putra Indonesia Dalam Gemblengan Jepang.

Disamping pengalaman militer dari Angkatan Perang Belanda, tenaga-tenaga terlatih di bidang militer juga diperoleh pada zaman pendudukan Jepang. Putra-putra Indonesia mendapatkan pendidikan dan gemblengan dari tentara pendudukan Jepang. Bahkan ada tentara yang dibentuk dengan beranggotakan orang-orang Indonesia, yaitu PETA atau Pembela Tanah Air. Bekas anggota PETA itulah yang juga menjadi inti anggota tentara nasional, ditambah bekas Heiho dan badan perjuangan lainnya.

Pada masa pendudukan Jepang pemuda-pemuda Indonesia memperoleh latihan kemiliteran secara luas dan besar-besaran. Pendudukan tentara Jepang di Indonesia cukup membawa manfaat bagi kelangsungan hidup bangsa. Dibalik penindasan dan penjajahan tentara Jepang dengan romushanya, ada

¹¹Ibid., h. 144.

hal yang sangat penting dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia untuk modal penyusunan tentara.¹² Dengan susah payah tentara Jepang memberikan kepada putra Indonesia pendidikan dan latihan militer, untuk menjadikan mereka prajurit-prajurit pembela tanah air yang tangguh. Politik itu dimaksudkan untuk memupuk tenaga guna membantu usaha perang mereka, khususnya mereka berkehendak agar pemuda-pemuda Indonesia dapat dipergunakan untuk menghadapi kemajuan tentara Serikat.¹³

Pemuda-pemuda yang dikerahkan untuk digembleng oleh tentara Jepang dibagi atas dua golongan besar, yaitu mereka yang memperoleh latihan militer tetapi tidak berstatus militer dan mereka yang diberi status militer.¹⁴ Barisan semi militer yang penting adalah Seinendan dan Keibodan, yang didirikan tanggal 29 April 1943.

Seinendan. Barisan ini merupakan barisan cadangan yang bertugas untuk mengamankan dan menggiatkan barisan belakang. Syarat untuk menjadi anggota tidaklah sulit. Setiap pemuda Indonesia yang berusia 14-27 tahun dapat masuk menjadi anggota Seinendan. Mula-mula anggota Seinendan tercatat 3.5000 (tiap ribu lima ratus) orang dan pada akhir pendudukan tentara Jepang mencapai kurang lebih

¹²Nugroho Notosusanto, Ibid., h. 66.

¹³Kelompok Kerja Staf Angkatan Bersendjata, Sedjarah Perjuangan Bersendjata Bangsa Indonesia (Djakarta: 1964), h. 32.

¹⁴Ibid.

500.000 (lima ratus ribu) orang pemuda. Secara resmi selalu dikatakan bahwa pembentukan Seinendan adalah dengan tujuan untuk mendidik serta melatih para pemuda agar mereka dapat menjaga dan membela tanah airnya dengan kekuatan serta kemampuan yang ada pada diri sendiri. Akan tetapi yang sesungguhnya bagi tentara Jepang adalah agar dengan demikian tentara Jepang memperoleh tenaga cadangan untuk membela dan mempertahankan daerah-daerah yang telah direbutnya serta menghambat laju kemajuan tentara Sekutu. Bagi bangsa Indonesia dan para pemimpin bangsa Indonesia hal itu tidak menjadi soal. Yang terpenting adalah agar pemuda Indonesia memiliki pengetahuan dan ketrampilan militer yang sangat dibutuhkan di dalam perjuangan merebut, membela dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kepada para anggota Seinendan memang diberikan pengetahuan dan latihan-latihan militer, baik untuk mempertahankan diri maupun untuk menyerang musuh.¹⁵ Disamping mendapatkan latihan soal kemiliteran, juga memperoleh pendidikan dan gemblengan jiwa nasionalisme Indonesia, cinta tanah air, semangat kemerdekaan dan anti penjajahan.¹⁶

Keibodan. Barisan ini merupakan Pembantu Polisi dengan tugas-tugas kepolisian, misalnya menjaga lalu lintas, pengamanan kampung atau desa. Anggota Keibodan diambil dari kalangan pemuda yang berusia 20-35 tahun. Selain

¹⁵Sagimun M.D., MAS TRIP Dari brigade pertempuran ke brigade pembangunan (Jakarta: Bina Aksara, 1989), h. 54.

¹⁶Ibid., h. 56.

itu berbadan sehat melalui pemeriksaan badan dan berkelakuan baik. Jumlah pemuda yang masuk Keibodan mencapai kurang lebih 1.000.000 (satu juta) orang. Latihan yang diberikan meliputi; penjagaan dan penyelidikan terhadap kabar-kabar angin yang meluas dan segala tipu muslihat musuh; penjagaan bahaya udara, penjagaan pantai, penjagaan dan bantuan bencana alam; menjaga dan mencari penjahat; mengawasi orang-orang yang tak dikenal yang keluar masuk daerah kekuasaan salah satu unit Keibodan.¹⁷ Menjelang akhir tahun 1943 tidak banyak perbedaan antara Seinendan dan Keibodan, karena keduanya juga mendapatkan latihan-latihan dasar kemiliteran. Kedua barisan pemuda itu dapat dipergunakan untuk tujuan pertahanan.

Fujinkai. Masih ada barisan semi militer yang dibentuk untuk membantu serta mendukung usaha perang tentara Jepang. Selain Seinendan ada Yoshi Seinendan, yakni barisan pemuda dan pada bulan Agustus 1943 dibentuk sebuah perkumpulan atau perhimpunan wanita yang dikenal dengan nama Fujinkai. Mereka mendapatkan pendidikan latihan dasar-dasar kemiliteran sesuai dengan sifat dan tugas-tugas kewanitaan. Hisbullah/Kekyo Seinen Teisyintai, yakni barisan semi militer dari kaum muda Islam terbentuk pada tanggal 15 Desember 1944. Kemudian tanggal 15 Desember 1944 terbentuk Barisan Pelopor atau Suisyinyai, yang dipimpin oleh

¹⁷Ahmaddani G, dkk., Pemuda Indonesia Dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa (Jakarta: Kurnia Esa, 1985), h. 165.

tokoh-tokoh nasionalis seperti Bung Karno. Ada juga Barisan Berani Mati atau Jibakutai dan Gakutai atau Korps Pelajar.¹⁸

Disamping organisasi semi militer, untuk mendukung usaha-usaha perang Jepang membentuk organisasi militer bagi pemuda-pemuda Indonesia. Organisasi ini yang penting adalah Heiho dan Tentara PETA atau Pembela Tanah Air.

Heiho. Pada tanggal 22 April 1943 dikeluarkan pengu-
muan yang isinya memberi kesempatan kepada pemuda-pemuda Indonesia untuk menjadi pembantu prajurit Jepang yang di-
namakan Heiho. Heiho (pembantu prajurit) ini mempergunakan orang-orang pribumi (Indonesia), yang terlatih secara mi-
liter sebagai bagian integral, artinya bagian tak terpi-
isahkan dari satuan-satuan militer Jepang.¹⁹ Dengan demiki-
an tidak mempunyai perwira di kalangan mereka, sebab
tentara Jepang yang menjadi perwira atau pemimpin prajurit
itu.

Heiho adalah pembantu prajurit. Jadi Heiho berarti prajurit-prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik AD (Rikugun) maupun di dalam AL (Kaigun Heiho). Syarat-syarat untuk menjadi Heiho adalah pemuda-pemuda Indonesia yang berbadan sehat, berkelakuan baik dan berusia 18-25 tahun. Pendidikan

¹⁸Sagimun M.D., MAS TRIP ..., H. 58.

¹⁹Sagimun M.D., Perlawanan Rakyat Indonesia terhadap Facisme Jepang (Jakarta: PT Inti Idayu Press, 1985), h. 235.

terendah SD. Jumlah Heiho sejak terbentuk sampai Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu diperkirakan kurang lebih 42.000 orang. Sebagai pembantu prajurit, Heiho bertugas untuk dikirim keluar/pertempuran-pertempuran. Mereka dilatih artileri sasaran udara dan ada beberapa untuk kavaleri bermotor dan pasukan angkutan bermotor.²⁰

PETA. Sementara itu pimpinan tentara Jepang ingin membentuk pasukan pribumi yang terpisah dari tentara Jepang. Maka tentara Jepang membentuk Tentara Pembela Tanah Air disingkat PETA. Agar tidak kelihatan bahwa rencana tersebut diatur oleh Jepang, maka prosedur pembentukannya diatur sedemikian rupa seolah-olah tentara PETA dibentuk atas permintaan dan desakan dari pihak bangsa Indonesia.

Sesungguhnya bagi kita bangsa Indonesia tidaklah menjadi soal apakah pembentukan tentara PETA itu memang atas permintaan dan desakan bangsa Indonesia ataukah atas keinginan dan kebutuhan tentara Jepang. Yang jelas dan memang harus kita akui secara jujur, bahwa bangsa Indonesia sangat membutuhkan pemuda-pemuda yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan militer untuk kelak merebut, membela dan mempertahankan kemerdekaan tanah airnya.²¹

Demikianlah, maka pada tanggal 7 September 1943 Gatot Mangkupraja, seorang tokoh dan pemimpin gerakan nasional Indonesia, mengajukan surat permohonan kepada Saiko Siki-

²⁰Ibid., h. 60.

²¹Sagimun M.D., Peranan Pemuda Dari Sumpah Pemuda Sampai Proklamasi (Jakarta: PT Bina Aksara, 1989), h. 236.

kan (Panglima Tentara Keenambelas) dan Gunseikan (Kepala Pemerintahan Pendudukan Tentara Jepang) agar pihak tentara Jepang membentuk sebuah tentara sukarela pembela tanah air yang seluruh anggotanya terdiri dari pemuda-pemuda Indonesia.²² Berita mengenai permohonan Gatot Mangkupraja itu tersebar luas serta mendapat sambutan yang sangat hangat dari segenap pihak lapisan masyarakat Indonesia. Bahkan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai tokoh dan pemimpin terkenal pada waktu itu mendukung gagasan itu. Seluruh lapisan masyarakat Indonesia sangat mendukung cita-cita atau gagasan itu. Indonesia sangat membutuhkan tenaga-tenaga muda yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan militer untuk perjuangan kemerdekaan. Bangsa Indonesia harus memiliki pemuda-pemuda yang mendapatkan pendidikan dan latihan-latihan militer. Indonesia membutuhkan tentara yang kuat sebagai tulang punggung negara. Tenaga-tenaga yang trampil dan mahir di bidang kemiliteran dan pemuda-pemuda yang memperoleh pendidikan dan latihan-latihan militer sangat dibutuhkan untuk merebut, membela dan mempertahankan kemerdekaan kelak. Para anggota Tentara PETA dan Heiho inilah yang kemudian memegang peranan penting dan menjadi anggota inti dari tentara. Akhirnya Tentara PETA terbentuk pada tanggal 3 Oktober 1943, dengan suatu peraturan yang dikenal dengan nama Osamu Seirei no. 44, yang dikeluarkan oleh Letnan Jenderal Kumaciki Harada selaku Panglima Ten-

²²Nugroho Notosusanto, Tentara Peta Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia, h.

tara Keenambelas.²³

Sebagai tentara atau pasukan sukarela pembela tanah air yang seluruh anggotanya terdiri dari pemuda-pemuda Indonesia, Tentara PETA mempunyai peranan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tentara, mulai dari TKR sampai menjadi TNI. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, tentara PETA merupakan tulang punggung bagi Tentara Republik Indonesia (TNI). Hal itu diperjelas oleh Kahin dalam buku "Nationalism And Revolution in Indonesia" :

It was the Peta which was to become the backbone of the Indonesian Republic Army.²⁴

Dengan demikian, tentara PETA merupakan awal daripada Tentara Nasional Indonesia atau dianggap sebagai inti daripada suatu tentara nasional di masa depan.²⁵ Oleh karena itu sebagian besar perwira TNI adalah mantan anggota PETA. Para perwira tersebut telah terlatih semenjak menjadi perwira PETA. Perlu diketahui bahwa tentara PETA dipimpin oleh perwira Indonesia. Sebaliknya, Heiho dipimpin oleh perwira Jepang.²⁶ Jadi anggota PETA lebih banyak pengalaman dan pengetahuannya di bidang militer dan lebih profesional.

²³Ibid.

²⁴George McTurnan Kahin, Nationalism And Revolution in Indonesia (New York:Ithaca, 1970), h. 109.

²⁵Nugroho Notosusanto, Tentara Peta ..., h. 148.

²⁶Sagimun M.D., MAS TRIP ..., H.42.

Para anggota PETA diberikan pendidikan dan latihan-latihan militer dasar seperti baris berbaris, peraturan dan disiplin militer. Juga dilatih menggunakan senjata ringan seperti pistol, karabin, senapan angin/ringan dan senapan mesin berat serta mortir, latihan bertempur terdiri dari senjata ringan perwira adalah samurai dan britan sangkur.²⁷

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa, begitu besar peranan kemahiran dan pendidikan di bidang militer yang diperoleh pemuda-pemuda Indonesia dari tentara Jepang. Khususnya Tentara PETA, yang keanggotaannya dari bangsa Indonesia dan sebagai tentara pembela tanah air sangat dirasakan manfaatnya. Hal itu bermanfaat sebagai sarana untuk menggembleng diri mempersiapkan untuk merebut, membela dan mempertahankan kemerdekaan. PETA berarti pembela tanah air, tentara yang dipersiapkan menjadi modal untuk membentuk tentara republik untuk membela tanah air Indonesia. Tentara PETA telah ditransformasikan menjadi TKR atau merupakan inti bagi pembangunan TKR.

Sumbangan yang terbesar bagi perkembangan kemahiran di kalangan bangsa kita selama pendudukan Jepang ialah timbulnya Tentara PETA yang didirikan bulan September 1943.²⁸ Secara khusus oleh seorang Jenderal Indonesia, dikemukakan tentang makna tentara Jepang bagi bangsa Indo-

²⁷Ibid., h. 44.

²⁸Joyce C. Lebra, Tentara Gemblengan Jepang (Jakarta: Sinar Harapan, 1988), h. 181.

nesia, yaitu bahwa Jepang telah mengajar kami sesuatu yang jauh lebih penting daripada apa yang pernah diajarkan Belanda kepada kami, yakni bagaimana membangun sebuah tentara dari nol.²⁹

Demikianlah organisai-organisasi kemiliteran yang diikuti oleh pemuda-pemuda Indonesia di masa pendudukan tentara Jepang. Pengetahuan dan ketrampilan di bidang militer yang dimiliki para pemuda Indonesia dapat dijadikan sebagai modal untuk membangun tentara untuk alat pertahanan negara. Adanya modal tersebut memperlancar dan mendukung untuk membentuk tentara, dalam hal ini mulai dibentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Faktor-faktor ini menjadi semacam penghantar (katalisator) dibentuknya tentara yang dimulai dengan nama Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

B. Faktor Langsung

Adanya modal tenaga atau pemuda-pemuda yang berpengalaman di bidang militer, belum cukup mendorong pemerintah untuk segera membentuk sebuah tentara sebagai alat negara yang telah merdeka. Hal ini terbukti bahwa Pemerintah RI hanyalah membentuk sebuah badan yang disebut Badan Keamanan Rakyat (BKR). Faktor tak langsung ini hanyalah sebagai penghantar atau modal terbentuknya TKR dan barulah Pemerintah RI menyadari perlunya tentara setelah adanya ancaman yang mengganggu kelangsungan hidup negara RI yang belum

²⁹T.B. Simatupang, Pelopop Dalam Perang Pelopop Dalam Damai. (Djakarta: Jajasan Pustaka Militer, 1954), h. 42.

lama merdeka. Hal itulah yang disebut faktor langsung terbentuknya TKR.

Seperti telah kita ketahui bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian negara Indonesia merdeka telah berdiri. Namun kondisi negara terasa tidak aman dan justru semakin sulit karena ada beberapa gangguan sehingga situasi negara setelah satu setengah bulan merdeka semakin gawat. Negara proklamasi terganggu oleh beberapa hal yaitu masih ada tentara Jepang yang bersenjata lengkap dan tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Selain itu juga ada ancaman dari tentara Sekutu dan NICA.³⁰ Situasi dan kondisi negara yang semakin gawat mengganggu kestabilan negara proklamasi. Tentara Jepang yang masih bersenjata lengkap harus mempertahankan Jepang yang masih bersenjata lengkap harus mempertahankan status quo dan angkatan perang Belanda dengan NICA nya ingin mengembalikan kekuasaan kolonial ke Indonesia yang telah merdeka. Dengan demikian mereka hendak melenyapkan kemerdekaan, menghapuskan Proklamasi 17 Agustus 1945. Kondisi itulah yang mendesak dan menjadi faktor langsung perlunya dibentuk tentara kebangsaan atau Tentara Keamanan Rakyat (TKR), sebagai alat untuk mempertahankan negara proklamasi. Walaupun telah berdiri badan-badan perjuangan, tapi

³⁰Dephankam Pusat Sejarah ABRI, Museum Pusat ABRI Satriamandala (Buku Panduan) (Jakarta: 1976), h. 5. Lihat juga Moehkardi, Pendidikan Perwira TNI-AD di Masa Revolusi, h. 29.

diperlukan kekuatan militer yang terorganisasi secara sentra, yaitu tentara.

1. Tentara Jepang dan Status Quo.

Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Menurut hukum internasional, tentara yang kalah perang berkewajiban memelihara "status quo". Artinya, keadaan tidak boleh berubah sedikit pun juga dari keadaan pada waktu tentara Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Oleh karena itu tugas tentara Jepang adalah menjadi alat tentara Sekutu untuk mempertahankan dan memelihara status quo.³¹

Sementara itu, untuk menegakkan kemerdekaan Indonesia diperlukan senjata-senjata yang masih berada di tangan tentara Jepang. Sebaliknya tentara Jepang yang masih memegang senjata diperintahkan oleh tentara Sekutu untuk menjaga dan memelihara status quo. Tentara Jepang dilarang menyerahkan kekuasaan dan senjata yang mereka pegang, kecuali kepada tentara Sekutu yang akan segera datang. Hal itu berarti tentara Jepang tidak mau mengakui kemerdekaan atau pemerintahan RI. Dengan demikian telah menyinggung perasaan dan nama bangsa Indonesia, sehingga menyebabkan reaksi dan bentrokan-bentrokan antara pemuda Indonesia melawan tentara Jepang.

Sebenarnya di pihak Jepang ada dua kelompok sikap da-

³¹Sagimun M.D., MAS TRIP ..., h. 123. Lihat Nugroho Notosusanto, Pejuang dan Prajurit, h. 37.

lam menghadapi pemuda Indonesia (bangsa Indonesia) untuk menegakkan kemerdekaan. Kelompok pertama adalah orang-orang Jepang yang mau membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka tidak mau mengingkari kata-katanya terhadap bangsa Indonesia. Kelompok ini bertolak belakang dengan kelompok kedua yang memegang teguh disiplin kemiliterannya, sehingga tidak mau membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kelompok itulah yang akan berusaha mempertahankan dan memelihara status quo. Akan tetapi pada tanggal 17 Agustus 1945 keadaan telah berubah, bahwa kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan. Mereka tetap tidak mau tahu tentang kemerdekaan Indonesia. Bahkan banyak pula tentara Jepang yang dipergunakan oleh tentara Sekutu, terutama Belanda (NICA) untuk memerangi pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia yang membela serta mempertahankan kemerdekaan tanah airnya.

Dengan demikian, ada dua golongan orang-orang Jepang dalam menghadapi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Di satu pihak bersimpati dan pro kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pihak lain, tidak mau tahu bahkan menentang perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia dan membantu Belanda untuk memerangi bangsa Indonesia yang membela dan mempertahankan kemerdekaannya.

Bagi bangsa Indonesia, kelompok kedua itulah yang sangat membahayakan bagi keamanan negara. Mereka tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, maka mereka pun tidak mau menyerahkan senjata-senjata yang masih dipegangnya. Se-

hingga untuk melucutnya pemuda-pemuda Indonesia harus berhadapan dengan perlawanan. Lain dengan kelompok pertama, sebagian besar simpati dan mau membantu. Maka untuk melucuti senjatanya, dengan mudah pemuda mendapatkannya secara sukarela diberikan oleh tentara Jepang tersebut.

Tentara Jepang yang masih bersenjata lengkap yang tidak mau mengakui kemerdekaan RI merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup negara. Tidak jarang menyebabkan bentrokan dengan pemuda-pemuda Indonesia, sehingga situasi negara semakin gawat. Padahal di saat itu belum ada tentara untuk mengorganisir dalam menghadapi ancaman tersebut. Pada umumnya badan-badan perjuangan yang ada hanya bergerak sendiri-sendiri.

Disamping itu Jepang tidak mau menyerahkan kekuasaan kepada Pemerintah RI. Mereka te rikat kepada perintah Sekutu kuntut mempertahankan status quo. Dengan adanya status quo Jepang masih mempunyai kewajiban menaatinya. Perintah itu menyebutkan bahwa Jepang tidak diizinkan melakukan perubahan apapun di wilayah-wilayah yang dikuasainya. Wilayah-wilayah itu harus mereka serahkan kepada Sekutu dan kemudian sEkutu akan mengembalikannya kepada pemerintah yang berkuasa sebelum pecah Perang Dunia II.³² Dalam hal ini maka Indonesia akan dikembalikan ke tangan Belanda. Ini berarti kemerdekaan Indonesia tidak diakui oleh Jepang dan bangsa Indonesia akan menjadi jajahan Be-

³²Amrin Imran, Urip Sumohardjo (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983), h. 64.

landa kembali.

Hal tersebut di atas tentunya menyebabkan ketahanan dan keamanan negara terancam. Di lain pihak BKR yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum belum bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Sementara itu pasukan Sekutu yang diboncengi NICA semakin menyadari perlunya sebuah tentara untuk mempertahankan negara.

2. Kedatangan Tentara Sekutu.

Keadaan semakin panas setelah datangnya tentara Inggris (Sekutu) tanggal 29 September 1945, di bawah pimpinan Sir Philip Christison.³³ Kenyataan itu membuat pemimpin kita menyadari betapa pentingnya tentara atau angkatan perang dalam mempertahankan kemerdekaan.

Pada tanggal 15 Agustus 1945 saat Jepang menyerah kepada Sekutu, Mounbatten menerima perintah untuk mengambil alih wilayah yang tadinya di bawah Mac Arthur. Dengan demikian wilayah Indonesia yang pada waktu itu diduduki tentara Jepang, diserahkan kepada Komando Asia Tenggara atau South East Asia Command (SEAC) dibawah Laksamana Muda Lord Louis Mounbatten. Indonesia diserahkan kepada tanggungjawab SEAC yang inti pasukannya adalah dari kemaharajaan Inggris.³⁴

³³Muhammad Rusli Karim, Peranan ABRI Dalam Politik (Jakarta: Yayasan Idayu, 1981), h. 23.

³⁴Nugroho Notosusanto, Pertempuran Surabaya (Djakarta: Lembaga Sedjarah Hankam, 1968), h. 4.

Untuk melaksanakan tugasnya di Indonesia, Mounbatten membentuk sebuah komando khusus, dibawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Komando itu disebut Allied Forces for Netherlands East Indies, disingkat AFNEI yang terdiri dari kesatuan-kesatuan tentara Inggris yang berkebangsaan India (biasa disebut tentara Gurkha).³⁵

Adapun tugas SEAC yang dibebankan selanjutnya kepada AFNEI adalah sebagai berikut :

- a. menerima penyerahan tentara Jepang tanpa syarat, melucuti dan mengembalikannya ke tanah airnya;
- b. membebaskan APWI (Allied Prisoners and War Internees); tugas ini disebut RAPWI (Recovery of Allied Prisoners and War Internees);
- c. menjaga keamanan dan ketertiban sehingga memungkinkan pemerintah sipil berfungsi kembali;
- d. mencari keterangan tentang dan mengadili para penjahat perang.³⁶

Tentara Inggris yang ditugaskan ke Indonesia itu terdiri dari tiga divisi India. Ketiga divisi itu ialah :

- a. divisi India ke-23, dibawah komando Mayor Jendral D.C. Hawthorn yang bertugas di Jawa bagian barat dan berpusat di Jakarta;
- b. divisi ke-5, dibawah komando Mayor Jendral Mansergh bertugas di Jawa bagian timur dan berpusat

³⁵Ibid. dan lihat G. Moedjanto, Indonesia Abad Ke-20 Jilid 1 (Yogyakarta: Kanisius, 1988), h. 97.

³⁶G. Moedjanto, ibid., h. 32.

diSurabaya;

- c. divisi ke-26, dibawah komando mayor Jendral H.M. Chambers bertugas di Sumatera dan berpusat di Medan.³⁷

Kedatangan mereka di Indonesia didahului oleh pasukan Inggris di bawah komando Laksamana Patterson dengan kapal Cumberland dan Tromp yang merapat di Tanjung Priok Jakarta tanggal 15 September 1945. Tetapi rombongan ini belum berani turun ke darat untuk mengunjungi kamp-kamp tawanan perang dan interniran. Mereka tinggal di kapal selama dua minggu karena ada sebagian penduduk yang memusuhi mereka, yaitu Heiho dan Pasukan Sukarela.³⁸ Bersama kedatangan Patterson, ikut pula van der Plas, wakil van Mook (dari NICA). Baru pada tanggal 29 September 1945, pasukan Inggris (Sekutu) mulai mendarat dan memasuki kota Jakarta di bawah komando Hawthorn. Tentara Inggris melihat bahwa Republik Indonesia sudah menjadi kenyataan, bahkan di gedung gedung berkibar bendera Merah Putih. Republik sudah menjadi kenyataan langsung dirasakan oleh rombongan RAPWI. Untuk melaksanakan tugasnya mereka harus bekerjasama dengan pejabatpejabat Indonesia, karena kebanyakan para interniran maupun tawanan perang berada dalam wilayah yang dikuasai Republik Indonesia.

³⁷Pusat Sedjarah Militer Angkatan Darat, Kronologi Sedjarah TNI 1945 (Bandung: 1963), h. 32.

³⁸D. Sidik Suraputra, Revolusi Indonesia Dan Hukum Internasional (Jakarta: UI Press, 1991), h. 36.

Untuk memperlancar tugasnya, pihak Inggris setelah melihat keadaan negara RI, terpaksa untuk sementara mengakui dan menerima defakto RI. Sebelum tentara Sekutu mendarat untuk menjalankan kewajiban menyingkirkan tentara Jepang, Indonesia telah menyatakan akan menyambut tentara Sekutu dengan terbuka, asal tentara Belanda tidak turut serta. Kalau tentara Belanda turut serta, tak boleh tidak pertempuran akan berkobar.³⁹ Akan tetapi ternyata tentara pihak Inggris tidak jujur dalam tindakannya. Tentara Sekutu telah membawa rombongan tentara Belanda beserta NICA. Dengan segala tipu daya mereka mendarat juga dan secara terang-terangan mengacaukan keamanan yang menimbulkan korban. Dengan demikian pihak Sekutu telah membantu Belanda untuk menegakkan kembali penjajahan di Indonesia.

Sebenarnya pihak Indonesia mau membantu tugas tentara Sekutu asal tidak membawa NICA dan tentara Belanda. Tetapi ketidakjujuran itu mengakibatkan situasi negara Indonesia yang telah merdeka menjadi tidak aman, bahkan kemerdekaan negara terancam.

3. NICA Membonceng Sekutu

Demikianlah kedatangan Sekutu yang diseretai NICA menimbulkan bentrokan-bentrokan senjata antara rakyat dan tentara Sekutu serta NICA, juga usaha kperlucutan senjata dari tentara Jepang menjadikan keadaan semakin genting dan

³⁹Samawi, 25 Tahun Merdeka (Jogjakarta: Kedaulatan Rakjat, 1970), h. 21.

mengantar kelahiran Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

Kedatangan Sekutu semula disambut dengan sikap netral atau terbuka oleh pihak Indonesia. Tetapi setelah diketahui bahwa pasukan Sekutu membawa orang-orang NICA yang terang-terangan hendak menegakkan kembali Hindia Belanda, sikap Indonesia berubah menjadi minimal curiga maksimal bermusuhan. Situasi dengan cepat merosot menjadi buruk sekali setelah NICA mempersenjatai kembali orang-orang KNIL yang baru dilepaskan dari tawanan Jepang.⁴⁰

Selain mempunyai tugas utama telah diuraikan di muka, kedatangan tentara Inggris (Sekutu) di Indonesia bertujuan untuk membantu Belanda sebagai teman Sekutu dalam Perang Dunia Kedua untuk mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Dengan demikian jelaslah bahwa kedatangannya mengancam kedaulatan negara Indonesia merdeka. Belanda berusaha menegakkan kembali kekuasaan di Indonesia yang telah merdeka.

Pemerintah Belanda pada waktu itu masih merasa berhak untuk kembali menguasai seluruh Kepulauan Indonesia, karena dalam Undang-Undang Dasar 1922 Hindia Belanda merupakan bagian tak terpisahkan dari Kerajaan Belanda. Dengan tujuan penguasaan tersebut, dibentuk Netherlands Indies Civil Administration (NICA) untuk menghidupkan dan menjalankan kembali pemerintahan Belanda di Indonesia.⁴¹ NICA dibentuk di Australia di bawah van Mook, sesudah Jepang berhasil

⁴⁰D. Sidik Suraputra, *op.cit.*, h. 35.

⁴¹D. Sidik Suraputra, *op.cit.*, h. 35.

menduduki Indonesia. Karena Belanda tidak mempunyai kekuatan militer, NICA dirancang sebagai bagian daripada tentara Sekutu yang akan ditugaskan menduduki wilayah Indonesia.⁴²

Kerjasama antara Belanda dan Sekutu sudah terencana. Belanda dan Inggris telah menyelenggarakan perundingan pada bulan April 1944, yang menghasilkan apa yang dikenal sebagai Civil Affairs Agreement. Tetapi persetujuan itu baru disyahkan di London pada tanggal 24 Agustus 1945.⁴³ Persetujuan itu menyebutkan bahwa Inggris akan mengembalikan penjajahan Belanda di Indonesia. Maka tidaklah mengherankan kalau Inggris memboncengkan NICA dan militer Belanda ke Indonesia.⁴⁴ Dengan adanya faktor NICA yang diboncengkan oleh Sekutu, menyebabkan perlawanan dari pemuda dan rakyat Indonesia. NICA tersebut disusupkan di markas-markas Sekutu untuk menjadi alat pemerintahan sipil, sehingga dengan perlindungan Sekutu dapatlah memulai menegakkan kembali Hindia Belanda di daerah-daerah yang baru direbut oleh tentara Sekutu.⁴⁵ Tujuan Belanda ialah hendak memperlengkap militer Inggris dengan pasukan Indianya untuk mengembalikan secepatnya kekuasaan Belanda di

⁴²Nugroho Notosusanto, op. cit., h. 5.

⁴³G. Moedjanto, op. cit., h. 96.

⁴⁴A.H. Nasution, Sedjarah Perjuangan Nasional di Bidang Bersendiata (Djakarta: Mega Bookstore, 1965), h. 68.

⁴⁵A.H. Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan Jilid 2 (Bandung: Dinas Sejarah AD & Angkasa, 1977), h. 4.

pulau-pulau Indonesia, terutama di Jawa dan Sumatera, mengingat kekuatan militer Belanda sendiri tidak memadai untuk tujuan itu.⁴⁶ Dengan luar biasa cepatnya, Belanda membentuk tentara lokal yang terdiri dari penduduk bangsa Belanda, melepaskan para tawanan perang dan interniran Belanda, dan mendatangkan angkatan laut dan sejumlah kecil tentara Belanda dari Eropa.

Begitulah yang disaksikan, bahwa setiap pendudukan tentara Sekutu berarti pelanggaran terhadap Proklamasi 17 Agustus 1945. Setiap pendudukan tentara Sekutu itu segera saja berkembang menjadi provokasi-provokasi dan teror terhadap kedaulatan dan ketentraman umum bangsa Indonesia di tanah airnya sendiri, walaupun negara sudah merdeka. Tentara Inggris yang bertindak selaku tentara pendudukan Sekutu di Indonesia, ternyata bertindak sebagai pelopor penjajahan kembali Indonesia, menyelundupkan alat-alat dan atau unsur-unsur penjajahan Belanda, melindungi tindakan-tindakannya semula, dan selanjutnya memberikan kesempatan untuk menyusun diri, sehingga mampu menyelesaikan usaha penjajahan kembali.

Kedatangan NICA di Indonesia, dengan membonceng Sekutu, sangat mengganggu keberadaan dan keamanan negara Indonesia merdeka. Semula Sekutu bersedia untuk tidak mencampuri keadaan Indonesia dan tidak mau membawa NICA, tetapi kenyataannya justru tentara Sekutu sebagai alat atau unsur

⁴⁶P.R.S. Mani, Jejak Revolusi 1945 (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), h. 91.

usaha penjajahan kembali Belanda. Dengan demikian memperkosa Proklamasi 17 Agustus 1945, membuat situasi negara yang baru beberapa minggu diproklamasikan menjadi kacau dan genting oleh perilaku NICA dan tentaranya. Mereka membuat teror-teror, orang KNIL makin banyak muncul di jalan-jalan dan bereaksi terhadap Republik, baik berupa penghinnaan dan penistaan terhadap pembesar-pembesar RI, maupun dengan perbuatan merobek-robek Sang Dwi Warna.⁴⁷ Kejadian-kejadian itu khususnya berlangsung di Jakarta (Batalyon X), pusat markas NICA sekitar gedung STOVIA.⁴⁸ Di tempat tersebut dan sekitarnya sering terjadi korban rakyat karena kekejaman serdadu-serdadu NICA. Di Batalyon X tersebut, serdadu-serdadu NICA menangkap rakyat yang kebetulan lewat dekat daerahnya. Orang-orang itu diseret ke markas Batalyon X, lalu dipukuli dan disiksa. Sasaran serdadu-serdadu NICA ialah "Pemuda Pelopor". Kalau serdadu NICA dapat menangkap mereka, maka nerakalah yang menanti pemuda tersebut. Tetapi juga rakyat biasa, tidak luput dari incaran dan siksaan NICA. Rakyat yang lewat di jalan diperiksanya, makanan dan uang yang dibawanya dirampas. Apabila melihat pemuda yang memakai lencana Merah Putih, maka disuruh menelannya. Karena banyak korban timbul akibat dipaksa kmenelan lambang Merah Putih, maka lencana

⁴⁷Ibid., h. 6.

⁴⁸H. Rosihan Anwar, Kisah-Kisah Jakarta Setelah Proklamasi (Jakarta: Pustaka Jaya, 1977), h. 36.

kemudian tidak dibuat dari seng, tapi dari kain.⁴⁹ Masih ada lagi tindakan NICA yang melanggar kedaulatan sebagai negara yang telah merdeka.

Berbagai tindakan telah dilakukan oleh NICA sebagai usaha untuk menegakkan kembali penjajahan di Indonesia. Setiap kekejaman yang dilakukan NICA justru menambah semangat dan keberanian pemuda dan rakyat Indonesia untuk berjuang menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan. Sehingga timbullah perlawanan-perlawanan pemuda menentang kekejaman NICA, terlebih usaha penjajahan kembali. Dengan demikian situasi negara menjadi semakin gawat lagi.

Begitu jelas bahwa bahaya mengancam Republik; pasukan Sekutu sudah mendarat, tentara Jepang yang bersenjata lengkap sebagai polisi Sekutu, serdadu-serdadu NICA men teror rakyat Jakarta. Faktor itulah yang mendesak bagi Republik untuk mempunyai tentara.

Demikianlah uraian tentang faktor-faktor yang mendorong terbentuknya tentara. Karena negara Republik harus menghadapi tiga kekuatan asing sekaligus padahal Republik belum mempunyai tentara, maka Pemerintah RI harus segera membentuk tentara kebangsaan dengan nama Tentara Keamanan Rakyat. Untuk memahami tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat, akan diuraikan dalam bab berikutnya.

⁴⁹Ibid., h. 40.

BAB III

TERBENTUKNYA TENTARA KEAMANAN RAKYAT

Keinginan pemerintah Republik Indonesia adalah untuk mempertahankan negara yang baru saja merdeka. Kemerdekaan yang telah diperoleh bukan berarti mengakhiri perjuangan bangsa Indonesia. Tetapi masih diperlukan juga usaha untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.

Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, diperlukan suatu kekuatan atau alat pertahanan untuk menangkis ancaman yang mengganggu. Alat pertahanan yang dimaksud adalah sebuah tentara. Adanya tentara akan memperkuat kondisi negara dalam menghadapi segala kemungkinan yang dapat melemahkan dan menghancurkan negara proklamasi. Perjuangan bersenjata muncul untuk mempertahankan negara sebagai akibat adanya kondisi obyektif bangsa. Kondisi negara yang terancam mendorong pemerintah RI untuk mengubah pendirian politik dari politik diplomasi menjadi politik bersenjata. Dengan adanya tentara Jepang yang masih bersenjata yang tidak mau mengakui kemerdekaan RI dan membantu Sekutu terlebih kedatangan NICA, Pemerintah menyadari perlunya segera dibentuk tentara untuk mempertahankan kemerdekaan.

Faktor itulah yang mendorong pemerintah RI untuk segera membentuk tentara. Oleh karena itu Pemerintah membentuk tentara yang dinamakan Tentara Keamanan Rakyat.

A. Kapan Tentara Keamanan Rakyat Terbentuk ?

Tentara Keamanan Rakyat (disingkat TKR) yang kemudian hari berubah nama menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia) dan terakhir menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia) adalah tentara rakyat dan tentara nasional yang lahir hampir bersamaan dengan kelahiran negara Republik Indonesia. Tentara ini lahir dan dibesarkan di tengah-tengahnya api perjuangan menegakkan dan mempertahankan tiang-tiang kemerdekaan dan kedaulatan negara Republik Indonesia.⁵⁰

Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagaimana mestinya negara yang telah merdeka harus memiliki alat kelengkapan negara. Salah satu diantaranya adalah alat pertahanan (tentara), tetapi hal yang dialami bangsa Indonesia adalah lain. Walaupun negara telah diproklamasikan, tetapi pemerintah RI tidak membentuk tentara secara langsung bersamaan dengan kelengkapan negara lainnya.

Setelah kemerdekaan diproklamasikan, maka keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI bersidang. PPKI adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah Pendudukan Jepang dalam rangka pemberian kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Tetapi oleh pimpinan nasional badan ini digunakan untuk memperoleh kemerdekaan menurut cara sendiri.⁵¹ Dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 tersebut disahkan Un-

⁵⁰Moehkardi, Pendidikan ..., h. 19.

⁵¹Amrin Imran, Urip Sumohardjo, h. 63.

dang-Undang Dasar 1945 serta dipilih Soekarno dan Hatta masing-masing menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Pemerintah mulai disusun. Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI membentuk Kabinet Presidensiil, ditetapkan 12 departemen, ditunjuk orang-orang yang akan menjadi menteri, kecuali menteri pertahanan yang masih dilowongkan, dan gubernur-gubernur untuk propinsipun ditetapkan dengan orang-orangnya.⁵²

Alasan menteri pertahanan belum diangkat, yaitu karena pada waktu itu belum mempunyai organisasi tentara. Dalam sidang tanggal 19 Agustus juga sebetulnya sudah diambil keputusan untuk membentuk tentara kebangsaan.⁵³ Kenyataannya, tentara belum terbentuk dan baru dibentuk dengan dikeluarkannya maklumat Presiden tanggal 5 Oktober 1945, tentang Pembentukan Tentara Keamanan Rakyat. Dengan maklumat tersebut kemudian dilakukan "rekrutmen" dan penyusunan organisasi tentara. Tentara kebangsaan yang dinamakan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) tersebut yang nantinya akan berkembang menjadi Tentara Nasional Indonesia.

Hal yang perlu kita ketahui lebih lanjut yaitu pertama, mengapa pimpinan negara kita tidak segera membentuk tentara, setelah pemerintah RI terbentuk pada hari kedua setelah proklamasi kemerdekaan ? Dan mengapa baru pada

⁵²A.H. Nasution, Sedjarah ..., h. 58. Lihat juga Disjarah TNI-AD, Almanak Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat 1945-1973 (1977), h. 15.

⁵³Dephankam Pusat Sejarah ABRI, Museum ..., h. 20. dan Nugroho Notosusanto, Pejuang ..., h. 37.

tanggal 5 Oktober 1945 dibentuk Tentara Keamanan Rakyat ? Kedua pertanyaan itulah yang akan memperjelas tentang waktu terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat.

1. Pertimbangan Pemerintah RI tidak segera membentuk tentara kebangsaan.

Seperti telah dijelaskan, bahwa dalam sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 diputuskan untuk segera membentuk tentara kebangsaan. Hal ini membuktikan bahwa sejak awal Pemerintah RI sadar akan perlunya tentara. Bahkan dalam UUD 1945 Bab III Pasal 10 tertulis bahwa Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Itu berarti keberadaan tentara sudah direncanakan. Akan tetapi keputusan di atas dirubah dalam sidang yang ketiga kpada tanggal 22 Agustus 1945, dengan membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR).

Keputusan untuk tidak segera membentuk tentara kebangsaan dilandasi pertimbangan yang bersifat politis dan psikologis. Pertama, dalam rangka perjuangan diplomasi memperoleh pengakuan kedaulatan RI, pemerintah hendak menunjukkan kepada dunia khususnya kepada Sekutu, bahwa pemerintah RI menganut politik cinta damai. Kedua, pemerintah RI hendak menunjukkan kepada dunia, bahwa RI pimpinan Soekarno-Hatta adalah bukan republik fasis (militeris).⁵⁴ Disamping itu pembentukan tentara akan mengundang reaksi dari pasukan-pasukan Jepang dan Sekutu yang segera akan mendarat di Indonesia, padahal kekuatan nasional diperkirakan belum mampu untuk menghadapi kedua lawan itu.⁵⁵

⁵⁴Moehkardi, Pendidikan ..., h. 26.

⁵⁵Imran Amrin dkk., Sedjarah Perkembangan Angkatan Darat (Djakarta: Dephankam Pusat Sedjarah ABRI, 1971), h. 1. Lihat Saleh As'ad Djamhari, Ikhtisar Sejarah Perjuangan ABRI 1945 - sekarang (Jakarta: Dephankam Pusat Sejarah ABRI, 1979), h. 1.

Dengan demikian negara Indonesia yang baru diproklamasikan belum mempunyai tentara kebangsaan. Pada dasarnya para pemuda menghendaki agar segera dibentuk tentara. Seluruh PETA dan Heiho harus segera diproklamasikan sebagai tentara Republik.⁵⁶ keinginan itu disampaikan oleh Adam Malik dkk., dalam rapat tanggal 20 Agustus 1945. Mereka telah menyiapkan sebanyak 50.000 helai dekrit pembentukan tentara Republik.⁵⁷

Dekrit tersebut dibacakan oleh Adam Malik dengan isi antara lain menyatakan sebagai berikut :⁵⁸

"..... Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya, maka tentaranyapun harus sekejap itu dibentuk. Negara yang tak bertentara berarti negara yang mati. Pun Republik kita yang baru didirikan mesti mempunyai tulang punggung, harus mempunyai tentara yang dapat digerakkan sewaktu-waktu disamping tentara rakyat (tentara revolusi), jika tidak, maka Jepang yang masih lengkap persenjataannya itu akan mudah menggempur Republik kita. Supaya jangan meragukan Sekutu, hal ini nanti kita sampaikan secara formil kehendak kita."

Tetapi usul itu tidak disetujui karena pertimbangan yang disebutkan tadi.

Pemerintah RI lebih menitikberatkan pada jalan diplomasi. Pembentukan tentara seperti yang diusulkan oleh pemuda, dianggap sebagai tindakan yang agresif dalam menghadapi tentara Jepang dan Sekutu. Akhirnya jalan yang dila-

⁵⁶A.H. Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan Jilid 1 (Bandung: Dinas Sedjarah AD & Angkatan, 1970), h. 220.

⁵⁷Ibid.

⁵⁸Adam Malik, Riwayat dan Perjuangan Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 (Jakarta: Penerbit Widjaja, 1962), h. 67.

kukan oleh Presiden yaitu membentuk Badan Keamanan Rakyat atau disingkat dengan BKR, sebagai pengganti pembentukan tentara.

BKR dibentuk berdasarkan keputusan sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945. Bersamanya telah dibentuk pula Komite Nasional (KNI) dan Partai Nasional Indonesia (PNI). BKR dibentuk sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). Badan ini merupakan organisasi semi militer, yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan bukan melaksanakan tugas-tugas pertahanan.⁵⁹ Jadi BKR bukanlah tentara.

Pembentukan Badan Keamanan Rakyat itu kemudian diumumkan pada tanggal 23 Agustus 1945 oleh Presiden dengan pidatonya, antara lain :⁶⁰

"..... Saja mengharap kepada kamu sekalian, hai pradjurit-pradjurit bekas PETA, Heiho dan pelaut beserta Pemuda-pemuda lain, untuk sementara waktu masuklah dan bekerdjalah dalam Badan Keamanan Rakyat. Pertjajalah nanti akan datang saatnya kamu dipanggil untuk mendjadi pradjurit dalam Tentara Kebangsaan Indonesia"

Untuk memenuhi seruan Presiden itu, maka lahirlah BKR-BKR di daerah-daerah secara spontan.

Pada umumnya tanggapan pemuda terhadap pembentukan BKR baik. Tetapi disamping BKR yang dibentuk oleh pemerintah, juga terbentuk bermacam-macam badan perjuangan pemuda

⁵⁹Nugroho Notosusanto, Pejuang, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), h. 37.

⁶⁰Pusat Sedjarah Militer Angkatan Darat, Sedjarah TNI-AD 1945-1965 (Bandung), h. 21.
Periksa juga A.H. Nasution, Sekitar Djilid 1, h. 231.



secara spontan. Latar belakang terbentuknya adalah rasa tidak puas sekelompok pemuda terhadap pembentukan BKR. Keputusan pemerintah untuk tidak membentuk tentara kebangsaan, hanya membentuk BKR mengecewakan sekelompok pemuda. Mereka sebenarnya menghendaki agar setelah proklamasi dibentuk segera tentara kebangsaan sebagai alat untuk merebut kekuasaan dari tangan tentara pendudukan Jepang. Sehingga mereka tidak mau memasuki BKR dan kemudian membentuk badan-badan perjuangan.⁶¹ Di Jakarta terbentuk Komite van Aksi di Jalan Menteng 31, di bawah pimpinan Adam Malik, Sukarni dan lain-lain. Badan yang bernaung di bawah Komite van Aksi adalah Angkatan Pemuda (API), Barisan Rakyat Indonesia (BARA) dan Barisan Buruh Indonesia (BBI). Tindakan pemuda di Jakarta itu kemudian diikuti oleh pemuda di daerah, seperti di Bandung terbentuk Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia (PPI), Pemuda Republik Indonesia di Surabaya dan Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI) di Semarang. Selain itu terbentuk badan perjuangan pemuda yang berafiliasi dengan suatu aliran politik atau agama, misalnya barisan Hisbullah, Sabillillah, Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo).⁶²

Demikianlah Badan Keamanan Rakyat telah dibentuk oleh pemerintah untuk menjamin keamanan dan ketertiban rakyat,

⁶¹Dephankam Pusat Sedjarah ABRI, 30 Tahun ABRI (Jakarta), h. 15.

⁶²Dephankam Pusat Sejarah ABRI, 30 Tahun ABRI (Jakarta), h. 15.

sebagai pengganti tentara kebangsaan. Kebijakan terse-
but diambil atas pertimbangan politis dan psikologis.

2. Tentara Keamanan Rakyat Terbentuk.

Pembentukan Badan Keamanan Rakyat merupakan kebijak-
sanaan pemerintah RI untuk tidak membentuk tentara nasio-
nal secara resmi. BKR yang dibentuk pada tanggal 22 Agus-
tus 1945, bukanlah tentara, bukan dimaksudkan sebagai sua-
tu organisasi ketentaraan yang resmi.⁶³ Tetapi adalah
korps pejuang bersenjata yang bertugas menjamin keamanan
umum. Dalam perkembangannya ternyata BKR mampu berperan
dalam mempertahankan negara dengan memelopori perlucutan
senjata terhadap tentara Jepang.

Tentara sebagai alat kekuatan, alat peretahanan nega-
ra baru dibentuk dengan pembentukan Tentara Keamanan Rak-
yat. Pada tanggal 5 Oktober 1945 dikeluarkanlah maklumat
pemerintah tentang Pembentukan Tentara Keamanan Rakyat.
Tentunya Pemerintah mempunyai pertimbangan-pertimbangan,
mengapa Tentara Keamanan Rakyat dibentuk tanggal tersebut.
Adapun pertimbangannya adalah karena situasi dan kondisi
negara pada waktu itu semakin gawat, sehingga perlu adanya
tentara untuk mempertahankan negara Indonesia. Sementara
itu, BKR yang pada awalnya mampu memelopori perlucutan
senjata, tetapi pada waktu itu tidak cocok lagi untuk me-

⁶³Jahya Muhaimin, Perkembangan Militer Dalam Politik
Di Indonesia 1945-1949 (Jogyakarta: UGM, 1971), h. 27.

nanggapi situasi yang semakin gawat. Bahkan dikatakan BKR tidak mampu mempertahankan negara dari ancaman luar.

Negara Indonesia yang baru saja merdeka sudah diliputi ancaman dari luar, tidak mempunyai tentara kebangsaan. Keamanan dan ketentraman negara tidak terjamin, masih banyak tentara Jepang yang bersenjata. Apalagi dengan adanya Sekutu yang memboncengkan NICA untuk menanamkan kekuasaannya kembali di Indonesia. Tindakan Sekutu memboncengkan NICA ke Indonesia telah melanggar janji dengan bangsa Indonesia. Hal ini menimbulkan kekecewaan bangsa Indonesia dan khususnya dengan pemuda menimbulkan bentrokan dengan Sekutu.

Kebijakan pemerintah untuk menunda pembentukan tentara nasional, menyebabkan situasi keamanan bertambah gawat. Hampir di semua kota besar terjadi pertempuran, baik menghadapi Jepang maupun Sekutu dan NICA. Belanda telah mendaratkan pasukannya pada tanggal 4 Oktober 1945 dengan 8 kapal pendarat di Tanjung Priok.⁶⁴ Dengan demikian keamanan negara semakin terancam keberadaannya. Perlawanan dan perebutan kekuasaan yang dilakukan secara spontan pada pelbagai tempat tanpa adanya kesatuan komando, terasa tidak efisien dan kurang efektif sereta memakan banyak korban.⁶⁵ Dalam pertempuran itu tidak terikat dalam suatu kesatuan yang teratur yang disebut tentara.

⁶⁴Dinas Sejarah TNI-AD, Seri Monumen Sejarah TNI-AD Jilid I (Dinas Sejarah TNI-AD: 1977), h. 143.

⁶⁵Nugroho Notosusanto, Pejuang ..., h. 40.

Ada BKR, tapi tugas badan itu lebih bertitik berat pada penjagaan umum, dan tidak untuk tugas-tugas pertahanan negara.⁶⁶ Dengan datangnya Sekutu ke Indonesia, Badan Keamanan Rakyat tidak lagi dapat dipertahankan hidupnya. Lagi pula BKR sangat otonom dan dibawahkan KNI-D, sehingga menyulitkan pemerintah pusat dalam memperhitungkan kekuatannya. Disamping itu dalam masa perebutan senjata banyak senjata yang jatuh ke tangan pemuda yang tidak menjadi anggota BKR. Ini menyulitkan pengawasan pemerintah. Karena itu maka kpada tanggal 5 Oktober 1945 dikeluarkan oleh pemerintah suatu maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat, suatu tentara kebangsaan yang dibawakan oleh pemerintah pusat dan diharapkan menjadi penopang pemerintah dengan segala kebijaksanaannya.⁶⁷ Adapun bunyi maklumat tersebut, sebagai berikut:⁶⁸

MAKLUMAT PEMERINTAH

Untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat.

Jakarta, 5 Oktober 1945
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO

Dengan demikian Presiden Republik Indonesia telah membentuk tentara nasional dengan nama Tentara Keamanan

⁶⁶Amrin Imran, Urip Sumoharjo, h. 64.

⁶⁷G. Moedjanto, op.cit., h. 120.

⁶⁸A.H. Nasution, Sekitar ... Jilid 2, h. 210.

Rakyat. Adapun tugas utama dari Tentara Keamanan Rakyat adalah melindungi keamanan rakyat dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.⁶⁹ Tentang bagaimana proses terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat akan dijelaskan dalam uraian berikut ini.

B. Proses Terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat

Tentara Keamanan Rakyat dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945. Pembentukan tentara ini sebagai pembenahan atau peningkatan yang lebih baik dari suatu Badan Keamanan Rakyat. Seperti telah diuraikan di muka, bahwa Pemerintah RI belum mempunyai tentara pada awal proklamasi, tapi baru dibentuk BKR pada tanggal 22 Agustus 1945. Dengan demikian negara yang baru lahir belum memiliki tentara. Baru akhirnya tanggal 5 Oktober 1945 tersebut pemerintah membentuk tentara nasional, yang diberi nama Tentara Keamanan Rakyat.

Bagi negara Indonesia, tentara terbentuk melalui proses yang panjang dan tidak terbentuk begitu negara lahir. Dari Badan Keamanan Rakyat menjelma menjadi Tentara Keamanan Rakyat, kemudian berkembang menjadi Tentara Republik Indonesia dan akhirnya Tentara Nasional Indonesia. Badan Keamanan Rakyat merupakan embrio dan Tentara Keamanan Rak-

⁶⁹Iwa Kusuma Sumantri, Sedjarah Revolusi Indonesia. Masa Revolusi Bersendiata Diilid Kedua, h. 44 (tanpa tempat, tahun dan penerbit).

yat merupakan awal pembentukan tentara nasional. Bagaimana prosesnya sehingga terbentuk Tentara Keamanan Rakyat perlu diketahui.

Kebijaksanaan pemerintah untuk menunda pembentukan tentara sesuai dengan keputusan tanggal 19 Agustus 1945 diganti dengan pembentukan BKR, menyebabkan situasi negara tidak aman dan semakin gawat. Tindakan tentara Sekutu yang memboncengkan NICA menimbulkan pertempuran-pertempuran dengan pemuda Indonesia, demikian juga antara pemuda dengan tentara Jepang. Ditambah lagi dengan tindakan NICA yang melakukan teror di Jakarta sehingga banyak menimbulkan korban dan situasi negara terancam. Dalam situasi yang demikian gawat, memang aneh pemerintah belum membentuk tentara. Tentara itu adalah tudang punggung negara. Negara tak mungkin berdaulat tanpa "tentara", bahkan untuk merebut kekuasaan bagi negara yang baru lahir, tenaga tentara itu merupakan keperluan yang mutlak.⁷⁰ Negara memerlukan kekuatan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas). Tetapi dalam situasi negara yang gawat kekuatan itu belum ada. Pertempuran-pertempuran yang dilakukan para pemuda tanpa ada kesatuan komando, sehingga banyak menimbulkan korban.

"Aneh negara zonder tentara", itulah pendapat Urip Sumoharjo yang dikenal sebagai perintis Tentara Nasional

⁷⁰ Madjalah Sedjarah Militer Angkatan Darat 3 (Biro Sedjarah Angkatan Darat: 1958), h. 4.

Indonesia.⁷¹ Setiap negara seharusnya mempunyai tentara untuk mempertahankan diri. Pertempuran melawan tentara Sekutu, tentara Jepang dan NICA telah terjadi. Tetapi tindakan para pemuda itu tidak terikat dalam kesatuan yang teratur yang disebut tentara. BKR yang dibentuk pemerintah lebih bertitik berat pada menjaga keamanan, bukan pertahanan.

Di lain pihak, menghadapi situasi negara yang semakin terancam keberadaannya, pemerintah RI mulai menyadari perlunya tentara untuk mempertahankan negara dari ancaman baik dalam maupun luar, terutama yang berusaha menghancurkan kemerdekaan RI. Pemerintah insyaf bahwa untuk menjaga keamanan dan untuk mempertahankan negara Indonesia tidaklah cukup dengan BKR saja.⁷² Di Jakarta usaha pembentukan tentara itu sedang dirancang. Dalam rancangan itu nama Urip Sumoharjo mulai disebut-sebut.

Pimpinan BKR pusat telah mendesak pemerintah, betapa perlunya segera dibentuk suatu tentara nasional. Ketika Kaprawi dan Arifin (mantan PETA), mengemukakan maksudnya Menteri Penerangan RI Mr. Amir Syarifudin, mereka lalu di-suruh menghubungi dahulu para ex perwira KNIL yang dipandang lebih menguasai segi-segi teknis kemiliteran.

Pada akhir September 1945 berlangsung pertemuan antara Menteri Penerangan dengan Didi Kartasasmita, seorang

⁷¹Dephankam Pusat Sedjarah ABRI, Biografi Pahlawan Nasional Dari Lingkungan ABRI (1970), h. 24.

⁷²Iwa Kusuma Sumantri, op.cit., h. 43.

bekas opsir KNIL. Pertemuan itu juga dihadiri Ali Sastro amidjoyo. Mereka membicarakan masalah pembentukan tentara. Amir Syarifudin sudah mendapat perintah lesan dari Presiden Soekarno untuk membahas masalah itu. Dalam pertemuan itu juga dibahas kedudukan bekas anggota KNIL dalam Republik. Yang menjadi persoalan adalah, apakah anggota KNIL itu akan berdiri di pihak Republik atau menentanginya. Mereka telah terikat dengan sumpah setia kepada Pemerintah Hindia Belanda.⁷³ Untuk pembentukan tentara diperlukan orang-orang yang bersedia mendukungnya. Disamping sudah ada kesediaan dari beberapa orang bekas perwira PETA, bekas opsir KNIL pun harus turut serta di dalamnya. Maka kedudukan bekas KNIL perlu dibahas dalam rangka pembentukan tentara.⁷⁴

Amir menyampaikan kepada Didi Kartasasmita harapan Pemerintah, agar anggota-anggota KNIL turut membantu perjuangan dan berdiri di pihak Republik. Untuk itu harus ada pernyataan yang ditandatangani oleh anggota-anggota itu atau sekurang-kurangnya oleh beberapa orang yang berpengaruh dan dianggap mewakili semua anggota. Selain itu dibicarakan kemungkinan untuk menyerahkan tugas menyusun organisasi tentara kepada Urip Sumohardjo. Untuk hal itu Didi

⁷³Salim Said, Genesis Of Power, General Sudirman And The Indonesian Military In Politics 1945-1949 (Singapore dan Jakarta: Institute Of Southeast Asian Studies & P.T. Pustaka Sinar Harapan, 1992), h. 27.

⁷⁴Tatang Sumarsono, Didi Kartasasmita, Pengabdian bagi Kemerdekaan (Jakarta: Pustaka Jaya, 1993), h. 103.

yang ditugaskan untuk membuat maklumat yang isinya menyatakan bahwa mantan opsir KNIL berdiri di belakang Republik Indonesia.⁷⁵

Langkah yang dilakukan Didi yaitu segera menghubungi Samidjo dan Sudibyo. Untuk menyusun maklumat mantan opsir KNIL diserahkan kepada Samidjo. Maklumat tersebut berisi pernyataan bahwa anggota-anggota KNIL mendukung Pemerintah RI dan akan berjuang untuk mempertahankannya. Untuk mengumpulkan tanda tangan para mantan opsir KNIL maka Didi berkeliling dan mendatangi mereka di tempat tinggalnya masing-masing. Tempat tinggal mereka tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Maka Didi dengan lima orang pengawal pergi ke beberapa tempat di Jawa, dari Jakarta ke Cianjur, Bandung, Cirebon. Kota yang lain yaitu Wonosobo, Magelang, Yogyakarta dan Semarang. Di tempat-tempat itu Didi berhasil mengumpulkan tanda tangan 13 orang perwira KNIL. Mereka menyatakan sikapnya berada di belakang pemerintah Republik. Mereka insyaf akan kewajiban membela dan mempertahankan negara Republik Indonesia.⁷⁶ Para perwira KNIL yang memberikan tanda tangan tersebut, ialah Soewardi (Cianjur), Soetardjo Hadikoesoemo (Bandung), Soeriadarma dan Soerjosoerarmo juga Bandung, Wardiman (Cirebon), Soemarno (Wonosobo), Soeratman (Magelang), Oerip Soemohardjo dan Poerbo Soemitro (Yogyakarta), Bagoes Holan

⁷⁵Ibid.

⁷⁶Moehkardi, Pendidikan ..., h. 29. Lihat juga Tatang Sumarsono, Ibid.

Soemodilogo (Ambarawa), Darma Setiawan (Semarang) dan Rahmat Kartakoesoemah (Bandung).⁷⁷

Dalam pertemuan dengan Urip di Yogyakarta, dibicarakan dengan panjang lebar masalah pembentukan tentara. Didi menyampaikan keinginan pemerintah untuk mengangkat Urip sebagai pejabat yang bertanggungjawab dalam hal menyusun organisasi tentara. Urip menyetujui rencana pemerintah itu. Hal itu merupakan kesempatan baik baginya untuk menyumbangkan tenaga dalam negaranya yang sudah merdeka.

Setibanya di Jakarta, Didi menemui Amir Syarifudin. Pada tanggal 4 Oktober 1945, bersama dengan Amir menghadap Wakil Presiden menanyakan sikap KNIL sebab mereka terikat dengan sumpah kepada ratu Belanda. Setelah Didi menegaskan, bahwa KNIL akan membuat pernyataan yang mengatakan mereka tidak terikat lagi dengan sumpah tersebut, maka Wakil Presiden meminta supaya keesokkan harinya, Didi datang ke Pegangsaan Timur, rumah kediaman Bung Karno untuk mengadakan pembicaraan lebih lanjut.⁷⁸

Dalam pertemuan tanggal 5 Oktober itu dari pihak KNIL hadir Didi Kartasasmita, Samidjo, Sudibyo, sedangkan dari pihak PETA hadir Dr. Sucipto. Pembicaraan berkisar pada masalah pembentukan tentara dan siapa yang akan diserahi tugas untuk menyusun organisasinya. Didi mengusulkan agar tugas itu diserahkan kepada Urip Sumohardjo, apalagi Urip

⁷⁷Tatang Sumarsono, *ibid.*, h. 109-115.

⁷⁸*Ibid.*

sendiri sudah menyanggupinya ketika memberikan tanda tangan.⁷⁹ Pertimbangan ini didasarkan pada beberapa hal. Pertama, Pak Urip memang senior, baik dalam kepangkatan maupun dalam usia. Kedua, dalam pandangan orang-orang KNIL pribadi Pak Urip memenuhi syarat untuk menjadi sesepuh. Beliau selalu sedia berkorban untuk kepentingan umum. Orangnya tidak ambisius, lebih suka mendengarkan orang berbicara dan mengambil kesimpulan dari pembicaraan orang lain daripada bicara sendiri. Beliau dikenal mempunyai wibawa yang besar di kalangan anak buahnya dan sebagai komandan yang jujur dan berani.⁸⁰ Dengan modal kecakapannya menjadikan Pak Urip dipercaya untuk menyusun organisasi TKR.

Dengan demikian untuk pembentukan tentara sudah ada orang yang bertanggungjawab. Oleh karena itu, sore itu juga tanggal 5 Oktober 1945 Maklumat pemerintah tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) diumumkan. Tanggal 5 Oktober 1945 itu dengan resmi Tentara Keamanan Rakyat terbentuk.⁸¹ Dengan demikian tentara kebangsaan telah lahir. Pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) itu merupakan awal adanya tentara kebangsaan Indonesia.

Dengan maklumat tanggal 5 Oktober 1945, lahirlah kemudian suatu tentara nasional (kebangsaan) yang kemudian

⁷⁹Ibid.

⁸⁰Tatang Sumarsono, *op.cit.*, h. 113.

⁸¹Soemarsono, *Mengenang Almarhum Panglima Besar Jenderal Soedirman* (Corps Cacat Veteran RI DIY, 1977), h. 21.

berubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (tetap disingkat TKR) pada tanggal 1 Januari 1946, kemudian menjadi Tentara Republik Indonesia pada tanggal 24 Januari 1946 dan akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tanggal 3 Juni 1947, sebagai hasil peleburan antara kelas-karan dengan Tentara Republik Indonesia (TRI). Nama TKR mengandung arti bahwa tentara nasional ini adalah tentara rakyat, yang lahir dari rakyat dan untuk memberikan keamanan pada rakyat.⁸² Keputusan pembentukan TKR dilakukan di rumah kediaman Presiden Sukarno di Jalan Pegantaraan Timur 56 Jakarta. Sedangkan penyusunan organisasi TKR dilaksanakan di Yogyakarta tepatnya di sebuah kamar Hotel Merdeka (sekarang Hotel Garuda), sebagai Markas Tertinggi. Tugas tersebut dikerjakan oleh Urip Sumohardjo dengan bantuan stafnya. Adapun pengumuman pembentukan TKR dilakukan melalui radio agar rakyat mendengar dan mengetahui,⁸³ lalu bagaimana tanggapan rakyat atau khususnya pemuda.

C. Tanggapan Pemuda Terhadap Pembentukan Tentara Keamanan Rakyat

Maklumat tentang pembentukan TKR diumumkan oleh Presiden Sukarno melalui radio agar segera diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia khususnya para pemuda. Mendengar pengumuman itu bagaimana tanggapan para pemuda terhadap

⁸²Moehkardi, op.cit., h. 30.

⁸³Amrin Imran, Urip Sumohardjo, h. 68.

keputusan Pemerintah untuk membentuk TKR ? Bagaimana antusias para pemuda terhadap pembentukan TKR ?

Terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat merupakan langkah baru dari pembangunan tentara nasional. Badan Keamanan Rakyat sebagai embrionya menjelma menjadi Tentara Keamanan Rakyat hingga akhirnya berkembang menjadi Tentara Nasional Indonesia. Perubahan telah terjadi dalam sejarah Indonesia. Kebijakan Pemerintah untuk tidak segera membentuk sebuah tentara akhirnya berubah dan dirasakan perlunya segera membentuk tentara guna menyelamatkan negara. Untuk itulah Pemerintah mengeluarkan maklumat tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah RI mengundang perhatian rakyat Indonesia, khususnya para pemuda. Maklumat itu sudah dinanti-nantikan oleh golongan pemuda sejak dua bulan sebelumnya.⁸⁴ Mereka menghendaki segera dibentuk tentara setelah negara merdeka. Tetapi pemerintah lebih cenderung menunda dan hanya dibentuk BKR. Oleh karena itu keputusan pemerintah untuk membentuk Tentara Keamanan Rakyat pada tanggal 5 Oktober 1945 adalah sangat baik dan didukungnya. Seandainya ditanya satu persatu maka seluruh rakyat Indonesia akan menjawab setuju. Sebab tentara merupakan kelengkapan suatu negara yang harus ada di dalam negara yang telah merdeka.

⁸⁴Saleh As"ad Djamhari, *op.cit.*, h. 5.

Dasar pembentukan tentara (TKR) yaitu tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tentang tujuan negara yang antara lain berbunyi: "Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia".⁸⁵ Sudah sewajarnya bila pemerintah RI segera membentuk tentara (TKR) untuk menjamin ketentraman dan keamanan rakyat dan mempertahankan kemerdekaan yang belum lama diperoleh. Sebab keadaan negara pada waktu itu belum stabil, terancam akan penjajahan kembali.

Keberadaan TKR akan berarti bagi bangsa dan negara Indonesia. Tentara itu merupakan tulang punggung negara dan kekuatan bangsa atau sebagai benteng negara.⁸⁶ Oleh karena itu tepat sekali kalau pemerintah mengeluarkan maklumat tentang pembentukan TKR sebagai usaha peningkatan BKR dan mulailah disusun tentara kebangsaan. Sebagaimana mestinya negara yang merdeka dalam bidang pertahanan negara.⁸⁷ Hal ini juga merupakan tugas atau salah satu fungsi negara dalam bidang pertahanan, untuk menyelenggarakan alat pertahanan. Untuk menghadapi ancaman usaha penjajahan kembali dari Belanda yang dibantu tentara Inggris, juga masih adanya tentara Jepang, perlu kekuatan yang benar-be-

⁸⁵KRT. Mandoyonegoro, Wawancara, tanggal 20 Agustus 1992 di Monumen Yogya Kembali pukul 13.30 WIB.

⁸⁶Daniel Soetarjo dan Sidung H.R., Wawancara Bersama tanggal 15 Agustus 1992 di Monumen Yogya Kembali pukul 11.00 WIB.

⁸⁷Ignasius Loyola Achmadsari, Wawancara, tanggal 15 Agustus 1992 di rumahnya pukul 14.00 WIB.

nar diorganisasi secara terpusat. Walaupun ada BKR dan badan perjuangan lainnya tetapi perjuangan kurang serentak dan terpusat. Akibatnya dalam perjuangan atau pertempuran-peretempuran menimbulkan banyak korban.

Pemerintahan belum stabil akan tetapi perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan berjalan secara sendiri-sendiri. Suasana masih kacau dan belum ada komando secara terpusat. Dengan keputusan pemerintah untuk membentuk Tentara Keamanan Rakyat itu cocok sekali, karena adanya komando dari pusat, sedangkan pada masa BKR masih terpecah pecah.⁸⁸ Adanya komando yang terpusat akan menciptakan kekompakan, kebersamaan dan kesatuan, sehingga perjuangan dapat dipikul bersama.

Pembentukan TKR menjadi harapan sebagian besar spara pemuda. Memang itu yang diharapkan, sebab kalau hanya BKR belum sempurna. Dengan TKR mulai ada sebutan tentara, sehingga sudah ada wadah untuk mengorganisasi bidang pertahanan negara.⁸⁹ Apabila tidak mempunyai tentara, keamanan negara akan rusak, terancam. Tentara itu bertugas untuk menjamin dan menjaga keamanan rakyat.⁹⁰ Negara itu perlu dijaga, untuk itu diperlukan pasukan yang disebut tentara

⁸⁸RM. L. Soemartono, Wawancara, tanggal 11 Januari 1993 di rumahnya pukul 09.00 WIB., Tatang Sumarsono, op.cit., h. 129.

⁸⁹Soewondo, SH., Wawancara, tanggal 15 Agustus 1992 di rumahnya pukul 15.30 WIB.

⁹⁰RH. Suryono, Wawancara, tanggal 15 Agustus 1992 di Monumen Yogya Kembali pukul 11.30 WIB.

yang merupakan tulang punggung dan kekuatan negara. Tanpa tentara negara tidak mempunyai kekuatan yang kokoh. Oleh karena itu negara layak membentuk tentara sebagai kebutuhannya.⁹¹

Kebutuhan tentara bagi negara sangat penting. Tentara bertugas mengkoordinir tugas pertahanan negara. Pemuda sebagai tulang punggung bangsa Indonesia ikut ambil bagian dalam bidang pertahanan negara. Pemuda mendukung apa yang menjadi keputusan pemerintah untuk membentuk Tentara Keamanan Rakyat. Hal itu cocok sekali dengan situasi dan kondisi negara yang sedang terancam keberadaannya dan harus segera dipertahankan. Organisasi ketentaraan sudah waktunya dibentuk untuk menyelamatkan negara yang belum lama merdeka.

Pemuda menyambut maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat dengan gembira, sebab tindakan pemerintah adalah tepat untuk mengatasi keadaan.⁹² BKR yang dibentuk tanggal 22 Agustus 1945, bertujuan untuk mempersatukan semua golongan pemuda untuk menjaga keamanan.⁹³ Tetapi dalam situasi dan kondisi negara yang semakin gawat, BKR kurang mampu menjamin keamanan, kurang efisien dan pemerintah

⁹¹Asmadi, Wawancara, tanggal 15 Agustus 1992 di Monumen Yogya Kembali pukul 12.00 WIB., didukung oleh H. Muhammad Saroso, Wawancara di rumahnya pukul 15.00 WIB.

⁹²Mangkusudarmo, Wawancara, tanggal 7 Mei 1992 di rumahnya pukul 09.00 WIB., A.H. Nasution, Sekitar Jilid 2, h., 23.

⁹³Darto Harnoko, Wawancara, tanggal 11 Agustus 1992 di Balai Kajian Sejarah pukul 11.00 WIB.

perlu menyempurnakan BKR dan membentuk tentara kebangsaan. Perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan memerlukan kekompakan, kesatuan dan kebersamaan dalam bertindak. Hal itulah yang memperkuat perjuangan bangsa dan negara Indonesia. Adanya organisasi tentara akan menciptakan kesatuan dalam bertindak. TKR mengkoordinasikan barisan pemuda dalam menghadapi tentara Belanda dan Sekutu yang mengganggu kemerdekaan Indonesia.⁹⁴ Pembentukan Tentara Keamanan Rakyat diharapkan menjamin keamanan rakyat dan bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai pada tanggal 17 Agustus 1945.

Demikianlah, tanggapan pemuda terhadap maklumat tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat adalah sangat baik dan mendukungnya. Pembentukan TKR mendapat sambutan serta dukungan yang besar sekali. Kebijakan pemerintah untuk membentuk tentara mendapat sambutan spontan dari pemuda. Mereka setuju dan mendukung dibentuknya TKR untuk menjaga ketentraman dan keamanan rakyat demi ketahanan negara Republik Indonesia.

Sebagai langkah untuk memberitahukan kepada seluruh rakyat Indonesia agar bersiap-siap dan segera mendaftarkan diri, maka Mr. Kasman Singodimedjo selaku Ketua KNI Pusat mengeluarkan pengumuman pada tanggal 9 Oktober 1945. Seruan tersebut berbunyi sebagai berikut :

⁹⁴Wardanu, Wawancara, tanggal 20 Agustus 1992 di rumahnya pukul 12.30 WIB.

"Untuk menjaga keamanan rakyat pada dewasa ini oleh Presiden Republik Indonesia telah diperintahkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat. Tentara ini terdiri dari pada rakyat Indonesia yang berperasaan penuh tanggungjawab atas keamanan masyarakat Indonesia guna menjaga kehormatan negara Republik Indonesia.

Pemuda dan lain-lainnya yang tegap sentosa badan dan jiwanya, bekas prajurit PETA, prajurit Hindia Belanda dan Heiho, Kaigun Heiho, Barisan Pemuda, Hisbullah, Pelopor dan lain-lainnya baik yang sudah maupun yang belum pernah memperoleh latihan militer, supaya selekas-lekasnya mendaftarkan diri pada kantor BKR di ibukota Kabupaten masing-masing atau kepada badan-badan lainnya yang ditunjuk oleh Residen (Kepala Daerah) atau wakilnya.

Merdeka !!!"⁹⁵

Setelah mendengar seruan itu para pemuda segera mendaftarkan diri menjadi anggota TKR pada kantor BKR di daerah masing-masing. Mereka mencatatkan diri sebagai prajurit tanpa sesuatu ikatan dinas, tanpa pertanyaan pangkat apa yang akan diberikan kepadanya, jabatan apa yang akan dipegangnya, pokoknya tanpa vested interest⁹⁶ (tanpa pamrih). Mereka terpenggil "zonder" memikirkan harta benda,⁹⁷ tanpa memikirkan apa-apa. Mereka hanya bermodal-kan semangat jiwa dan hasrat yang murni.

Pemuda sebagai tulang punggung bangsa mempunyai kewajiban untuk ikut membela dan memperetahankan negara agar kemerdekaan tetap bertahan. Tujuan mereka bergabung ke da-

⁹⁵Dinas Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro, Rumpun Diponegoro Dan Pengabdiannya (Semarang: Dinas Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro & C.V. Borobudur Megah, 1977), h. 144.

⁹⁶Dinas Sejarah Militer TNI-AD & Fa. Wahjuma, Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI-AD (Jakarta: 1972), h. 317.

⁹⁷Ngadiman, Wawancara, tanggal 21 Juli 1992 di Hotel Sri Wedari pukul 11.00 WIB.

lam TKR adalah untuk berjuang mempertahankan negara, mengusir penjajah dari bumi Indonesia secara bersama-sama. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, otomatis mereka mempunyai kewajiban membelanegara.⁹⁸ Oleh karena itu mereka menggabungkan diri menjadi anggota Tentara Keamanan Rakyat dengan kesadaran sendiri, tidak ada paksaan dari manapun.⁹⁹

Tanggapan para pemuda terhadap pembentukan Tentara Keamanan Rakyat sangat baik. Bagi mereka yang menjadi anggota BKR secara otomatis ditransformasikan menjadi TKR.¹⁰⁰ Dengan demikian anggota BKR yang sudah ada secara langsung menjadi anggota TKR, tanpa harus mendaftarkan diri. BKR-BKR itulah yang menjadi inti anggota TKR. Sebagian besar dari mereka sudah pernah mendapat pengalaman pendidikan kemiliteran, terutama pada jaman Jepang khususnya tentara Pembela Tanah Air (PETA). Mereka sudah mendapatkan bekal kemampuan, dan kemampuan itu disumbangkan bagi bangsa dan negaranya, kemudian menyatukan diri untuk berjuang bersama untuk mengusir penjajahan.

Selain BKR yang ditransformasikan menjadi TKR, masih ada lagi pemuda dari organisasi perjuangan lain yang mendaftarkan diri menjadi anggota TKR, semikian juga pemuda

⁹⁸Purnama, Wawancara, tanggal 28 April 1992 di rumahnya pukul 10.00 WIB.

⁹⁹D. Soewondho, Wawancara, tanggal 20 Agustus 1992 di rumahnya pukul 11.00 WIB.

¹⁰⁰Andreas Djurdjani, Wawancara, tanggal 20 Agustus 1992 di rumahnya pukul 13.00 WIB.

lain yang belum pernah memperoleh latihan militer. Mendengar seruan dari Ketua KNI Pusat, para pemuda dengan semangat mendaftarkan diri pada kantor BKR di Kabupaten masing masing atau kepada badan lainnya yang ditunjuk oleh kepala daerah atau wakilnya. Ribuan pemuda mendaftarkan dirinya menjadi anggota TKR sebagai penegak kemerdekaan dengan semboyan: "Sekali Merdeka Tetap Merdeka"! Mereka ingin mendarmabaktikan dirinya menanggapi tantangan jaman yang sedang terjadi di tanah air Indonesia.¹⁰¹ Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 terancam keberadaannya karena adanya usaha Belanda yang dibantu tentara Sekutu untuk menjajah kembali. Usaha itu harus disingkirkan dan negara merdeka harus dipertahankan. Seperti tertulis dalam UUD 1945 pasal 30, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Maka bukan berarti bahwa pemuda yang menjadi anggota TKR sajalah yang ikut dalam pembelaan negara, mempertahankan kemerdekaan. Tetapi TKR sebagai organisasi tentara yang bertanggungjawab di bidang pertahanan negara dan para pemuda ingin berperan serta.

Ternyata antusias para pemuda terhadap pembentukan Tentara Keamanan RAKyat baik sekali. Hal itu terbukti mereka mencatatkan namanya sebagai anggota TKR. Begituantusiasnya, maka pembentukan divisi tidak sesuai dengan yang

¹⁰¹Tjokropranolo, Panglima Besar TNI, Jenderal Soedirman, Pemimpin Pendobrak Terakhir Penjajahan di Indonesia, Kisah Seorang Pengawal (Jakarta: P.T. Surya PERSINDO DIVISI, 1992), h. 61. didukung oleh Sutrisno, Wawancara, tanggal 21 Juli 1992 di rumahnya pukul 10.00.

direncanakan oleh Urip Sumohardjo selaku Kepala Staf Umum TKR, yang bertanggungjawab atas penyusunan organisasi TKR. Hal ini sangat melebihi rencana semula. Rencana akan dibentuk 3 divisi di Jawa dan 1 di Sumatera, sehingga hanya ada 4 divisi. Kenyataannya menjadi 10 divisi di Jawa dan 6 divisi di Sumatera. Hal terjadi karena didahului oleh kenyataan terbentuknya TKR di daerah-daerah secara spontan, sebagai hasil peleburan BKR dan beberapa badan perjuangan bersendjata.

Itulah tanggapan para pemuda terhadap pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Selanjutnya bagaimana organisasi Tentara Keamanan Rakyat itu sebenarnya, akan diuraikan dalam sub bab berikut ini.

D. Organisasi Tentara Keamanan Rakyat

Tentara Keamanan Rakyat yang dibentuk dengan maklumat Presiden tanggal 5 Oktober 1945 mendapat tanggapan baik dari para pemuda. Pembentukan TKR harus segera direalisasikan, organisasi harus disusun meliputi, unsur pimpinan, markas kerja dan daerah komando. Disamping itu dalam organisasi TKR perlu adanya usaha untuk menghasilkan para perwira. Hal itulah yang akan mewarnai pembahasan tentang organisasi TKR.

Sebagai realisasinya, langkah pertama pemerintah menyusun pimpinan tertinggi. Pemerintah menunjuk orang yang akan menjadi pimpinan dan mengatur organisasi TKR. Pada

tanggal 6 Oktober 1945 pemerintah mengangkat Supriyadi¹⁰² menjadi Pimpinan Tertinggi TKR. Pada tanggal 14 Oktober 1945, Wakil Presiden memanggil Urip Sumoharjo¹⁰³ ke Jakarta untuk menghadiri pertemuan sidang kabinet bersama menteri-menteri. Dalam sidang Kabinet tanggal 15 Oktober 1945, ditetapkan Urip Sumoharjo memangku jabatan sebagai Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal. Pemerintah memberikan mandat untuk menyusun organisasi tentara. Tugas yang harus diembannya adalah menyusun TKR serta pengembangannya dan tugas pertama membentuk Markas Besar Tertinggi (MBT) TKR.¹⁰⁴

Menanggapi mandat yang diberikan, Urip menyatakan bersedia memikul tugas yang diserahkan kepadanya itu. Sebagaimana mestinya organisasi, TKR harus mempunyai tempat kedudukan markas besar untuk melakukan kegiatan. Untuk itu Urip mengusulkan kepada pemerintah agar Purwokerto sebagai tempat kedudukan markas besar, dengan pertimbangan tempat itu terletak di daerah pedalaman sehingga akan sulit didatangi oleh musuh. Selain itu juga mengusulkan agar komandan-komandan pasukan paling tinggi hanya berpangkat kolonel. Kedua usul itu disetujui oleh sidang

¹⁰²Supriyadi ialah seorang bekas pemimpin pemberontakan PETA Di Madiun.

¹⁰³Pensiunan Mayor KNIL yang dipandang paling senior diantara para ex Perwira KNIL.

¹⁰⁴Rohmah Sumohardjo Soebroto, Oerip Soemohardjo Letnan Jenderal TNI, h. 100.

kabinet.¹⁰⁵ Tetapi akhirnya Purwokerto bukanlah kota yang menjadi tempat kedudukan markas besar. Dalam pembicaraan antara Urip dengan Didi dan kawan-kawannya, ada yang mengusulkan kota Magelang sebagai markas, tetapi tidak disetujui. Dan sebagai kesepakatan tercapailah Yogyakarta menjadi kedudukan markas besar.

Pemilihan Yogyakarta sebagai markas besar dengan pertimbangan strategi dan politik. Pertimbangan strategi ialah bahwa Yogyakarta terletak di pedalaman Pulau Jawa bagian tengah, yang berarti kota itu terletak relatif aman dibandingkan dengan kota-kota yang terletak di pantai. Selain itu Yogyakarta mempunyai fasilitas komunikasi dan perhubungan yang cukup baik untuk melaksanakan tugas Markas Tertinggi. Pertimbangan politik ialah bahwa Republik mempunyai kedudukan yang kuat di kalangan rakyat Yogyakarta. Dalam hal ini sikap Sultan Hamengkubuwono IX yang sejak semula dengan tegas menyatakan dukungan penuh kepada Republik, merupakan faktor yang sangat penting.¹⁰⁶

Dengan membawa kesepakatan bersama, Urip dan rombongan kembali ke Yogyakarta. Urip Sumoharjo sebagai Kepala Staf Umum TKR kemudian ke Hotel Merdeka (sekarang Hotel Garuda), untuk mengemban tugas. Dengan sebuah kamar di Hotel itu Urip mulai bekerja dan menjadi Markas Tertinggi

¹⁰⁵Amrin Imran, Urip Sumohardjo, Op.Cit., h. 67.

¹⁰⁶Atmakusumah, Tahta Untuk Rakyat, Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX (Jakarta: PT Gramedia: 1982), h. 144-145.

TKR. Markas pertama dari sebuah tentara yang dibentuk tanpa modal materiil apapun, tetapi dalam zaman revolusi harus bekerja sesuai dengan situasi dan kondisi. Ternyata tidak terlalu lama menempati kamar di Hotel Merdeka untuk markas besar. Tidak lama kemudian pindah ke jalan Gondokusuman, di gedung yang menjadi gedung markas Korem 72, di Yogyakarta. Gedung tersebut pemberian dari Sultan Hamengkubuwono IX.¹⁰⁷

Di tempat itulah usaha untuk membentuk dan membangun organisasi TKR dapat dilanjutkan. Letnan Jenderal Urip Sumoharjo bersama stafnya memulai tugas utamanya menyusun TKR. Sejak itu lalu keluar berbagai instruksi peraturan yang mengatur organisasi TKR.

Dalam melaksanakan tugasnya tidaklah mungkin segala sesuatunya dapat dikerjakan sendiri. Untuk membantunya dalam menjalankan tugas, Urip mengajak teman-temannya, seperti Suryadi, Suryadarma dan TB. Simatupang. Pembentukan Staf Umum diserahkan kepada Suryadarma dan tugas untuk menyiapkan konsep organisasi diserahkan kepada TB. Simatupang, yang mengetahui seluk beluk militer termasuk organisasi militer dari negara-negara asing. Konsep yang disiapkan itu akhirnya disetujui oleh Urip Sumoharjo selaku Kepala Staf Umum TKR.¹⁰⁸

Pengangkatan Urip Sumoharjo sebagai Kepala Staf Umum

¹⁰⁷Amrin Imran, Op.Cit., h. 68.

¹⁰⁸Amrin Imran, op.cit., h. 73.

TKR dengan pangkat letnan jenderal diumumkan pemerintah pada tanggal 20 Oktober 194. Secara lengkap Pemerintah Pusat mengumumkan pembentukan pimpinan tertinggi dalam lingkungan Departemen Keamanan Rakyat dan Tentara. Muhammad Sulyoadikusumo (bekas Komandan Batalyon atau Daidanco tentara PETA dahulu) diangkat sebagai Menteri ad Interim, Supriyadi diangkat menjadi Pemimpin Tertinggi TKR, dan Urip Sumoharjo sebagai Kepala Staf Umum TKR.¹⁰⁹

Dengan demikian pimpinan tertinggi dan markas besar TKR sebagai tempat aktifitas pun sudah terwujud. maka usaha untuk membangun organisasi TKR dapat dilanjutkan. Di gedung yang terletak di jalan Gondokusuman (sekarang menjadi Museum Angkatan Darat, jalan Sudirman) sebagai Markas Besar Umum TKR Letnan Jenderal Urip Sumoharjo merencanakan dan menyusun organisasi TKR.

Organisasi yang disusun berdasarkan susunan organisasi Departemen Perang Hindia Belanda, kecuali tidak mempunyai inspektur-inspektur kesenjataaan infantri, artileri dan kavaleri. ¹¹⁰ Personaliaanya terdiri dari gabungan antara bekas perwira KNIL dengan bekas perwira Peta. Adapun susunan organisasi TKR sebagai berikut :

- a. Markas Tertinggi TKR (MTTKR)
- b. Markas Besar Umum TKR (MBU TKR)
- c. Komandemen-komandemen.

¹⁰⁹Jahya Muhaimin, op.cit., h. 31.

¹¹⁰A.H. Naution, Sekitar....Jilid 2, op. cit. h. 226.

Markas Besar Umum TKR sebagai bagian dari Markas Tertinggi TKR, mempunyai beberapa staf yang membidangi bagian masing-masing, terdiri dari :

- a. bagian Administrasi
- b. bagian Keuangan
- c. bagian Persenjataan
- d. bagian Perhubungan
- e. bagian Kesehatan
- f. bagian Urusan Kereta Api (KA)
- g. bagian Zeni
- h. bagian Pendidikan
- i. bagian Perlengkapan
- j. bagian Penyelidikan.¹¹¹



Dalam usaha membentuk komandemen (daerah komando), Letnan Jenderal Urip Sumoharjo Kepala Staf TKR mengalami kesulitan. Beliau menghendaki jumlah tentara yang kecil tetapi dengan mutu yang baik. Sementara itu di daerah-daerah tersusun secara spontan divisi-divisi TKR, sehingga melebihi jumlah. Kenyataan yang telah terjadi adalah, bahwa di Jawa telah berdiri 7 divisi dan di Sumatera 3 divisi. Hal itu didorong oleh semangat untuk membela tanah air sangat besar. Untuk membentuk 4 divisi tentara di Jawa dan 1 di Sumatera mengalami kesulitan. Dalam suasana revolusi tidaklah mungkin untuk membatasi jumlah tentara sesuai yang direncanakan. Oleh karena itu, Kepala Staf TKR

¹¹¹Bagian Historiografi, "Sejarah Perkembangan Organisasi TNI-AD Dari Masa Ke Masa", Vidya-Yudya No. 48 (Bandung: Disjarah, 1985) h. 20.

menyesuaikan diri dengan situasi pada masa itu.

Pada tanggal 2 Nopember 1945 Letnan Jenderal Urip Sumohardjo meresmikan pembentukan 3 buah komandemen untuk Jawa dan 1 buah komandemen untuk Sumatera. Pertama komandemen Jawa Barat dipimpin oleh Didi Kartasasmita, kedua, Komandemen Jawa Tengah dipimpin oleh Suratman dan ketiga, Komandemen Jawa Timur dipimpin Muhammad. Sedangkan untuk Komandemen Sumatera dibawah pimpinan Suharjo Harjowardoyo.¹¹² Masing-masing komandemen tersebut terdiri dari divisi-divisi. Semua panglima komandemen diberi pangkat Mayor Jenderal.

Tindakan yang dilakukan oleh Letnan Jenderal Urip Sumoharjo itu tidak melenyapkan kesatuan-kesatuan yang telah ada. Beliau hanya menyatukan kesatuan-kesatuan itu kedalam organisasi yang lebih terpusat dan jumlah divisi-divisi tidak dikurangi. Dalam suasana revolusi Kapala Staf TKR lebih mementingkan kepentingan bangsa untuk kepentingan perjuangan mempertahankan negara dari penjajahan.

Secara keseluruhan wilayah tanggung jawab komandemen-komandemen di atur menjadi Komandemen di Jawa dan Sumatera. Setiap Komandemen terdiri dari beberapa divisi. Susunan Komandemen-komandemen itu ialah :

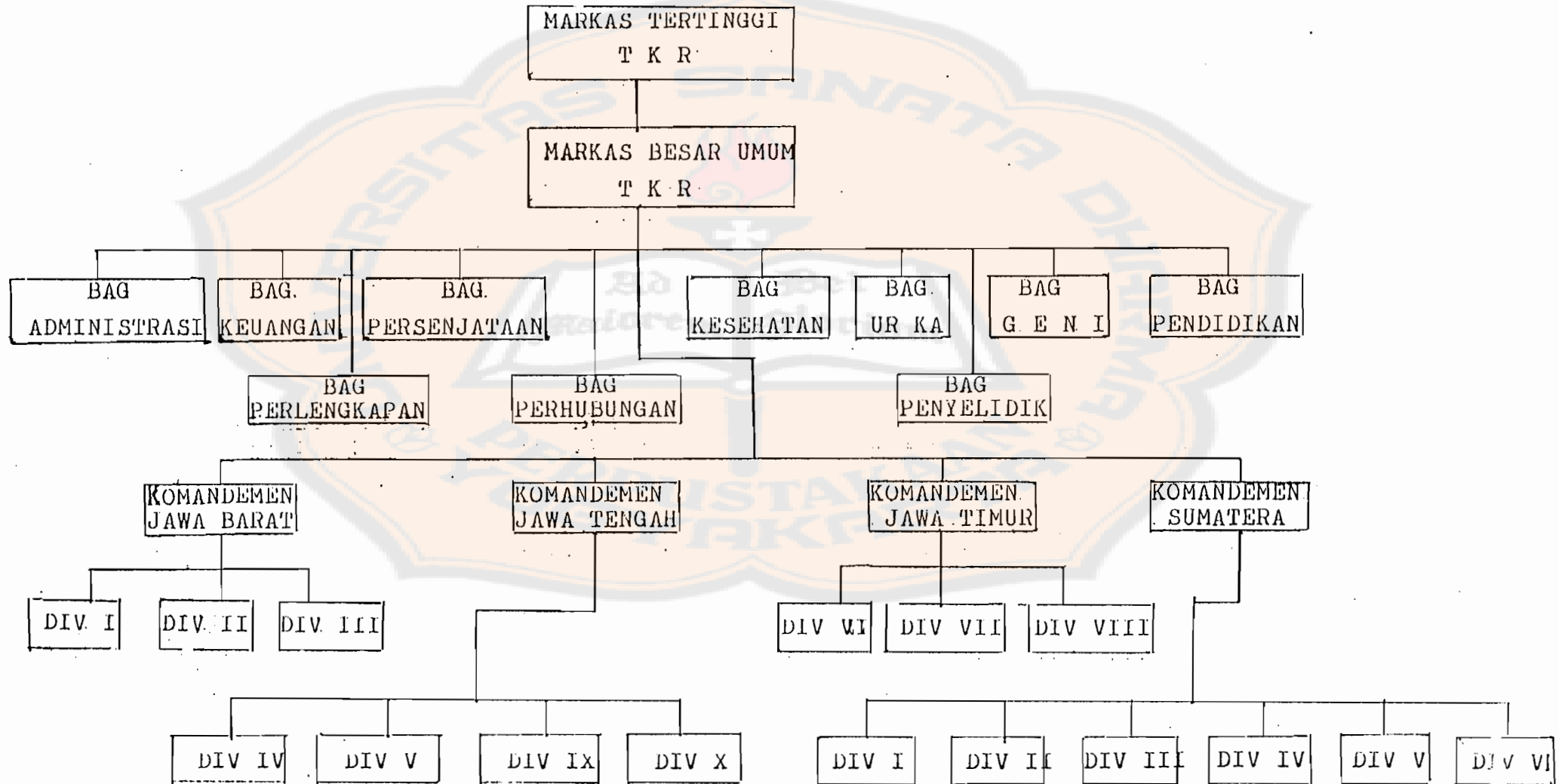
1. Komandemen Jawa Barat membawahi :
 - a. Divisi I meliputi daerah Banten, berkedudukan di Serang
 - b. Divisi II meliputi daerah Jakarta, Bogor, Cirebon, berkedudukan di Linggarjati.

¹¹²Rohmah Soemohardjo, Op. Cit., h. 101.

- c. Divisi III
meliputi daerah Priangan, berkedudukan di Bandung.
- 2. Komandemen Jawa Tengah membawahi
 - a. Divisi IV
meliputi daerah Pekalongan, Semarang, Pati, berkedudukan di Salatiga
 - b. Divisi V
meliputi daerah Kedu dan Banyumas, kedudukan di Purwokerto.
 - c. Divisi IX
meliputi daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Yogyakarta
 - d. Divisi X
meliputi daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Surakarta.
- 3. Komandemen Jawa Timur membawahi :
 - a. Divisi VI
meliputi Madiun, Kediri berkedudukan di Kediri
 - b. Divisi VII
meliputi daerah Bojonegoro, Surabaya dan Madura, berkedudukan di Mojokerto
 - c. Divisi VIII
meliputi daerah Malang, Besuki berkedudukan di Malang.
- 4. Komandemen Sumatera membawahi :
 - a. Divisi I
meliputi daerah Sumatera Selatan bagian Selatan. Berkedudukan di Lahat.
 - b. Divisi II
meliputi daerah Sumatera Selatan bagian Utara, dan Timur, Bangka, Belitung, berkedudukan di Palembang.
 - c. Divisi III
meliputi daerah Sumatera Barat dan Riau. berkedudukan di Bukittinggi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAGAN ORGANISASI TKR



Sumber : Vidya Yudha No. 48/ 1985.

- d. Divisi IV
meliputi daerah Sumatera Timur, berkedudukan di Medan.
- e. Divisi V
meliputi daerah Aceh, berkedudukan di Bireuen.
- c. Divisi VI
meliputi daerah Tapanuli - Nias, berkedudukan di Sibolga.¹¹³

Dengan demikian Tentara Keamanan Rakyat mempunyai 3 Komandemen di Jawa dan 1 Komandemen di Sumatera. Komandemen II Jawa Barat terdiri atas Divisi I, II dan III, Komandemen II Jawa Tengah mempunyai 4 Divisi, yaitu Divisi IV, V, IX, dan X dan Komandemen III Jawa Timur terdiri atas Divisi VI, VII, dan VIII. Sedangkan Komandemen Sumatera mempunyai 6 Divisi, yaitu Divisi I, II, III, IV, V dan VI. Masing-masing Komandemen tersebut menyusun Resimen-resimen.

Komandemen Jawa Barat pada awalnya terdapat 13 Resimen kemudian berubah menjadi 17 Resimen, yang secara umum merupakan kekuatan satuan infantri dengan sedikit Satuan Banpur/Artileri, Zeni).¹¹⁴ Resimen-resimen itu yaitu, Resimen Banten, Bogor, Sukabumi, Tangerang, Cikampek, Purwakarta, Cirebon, Bandung, Padalarang, Garut, Tasikmalaya, Jatiwangi dan Sumedang. Kemudian ditambah Resimen Rangkasbitung dan Resimen Perjuangan. Resimen-resimen dari

¹¹³Kapten Inf. Moh. Suhaeni, "Komando-Komando Dalam TNI-AD" Vidya Yudha No. 29 No. 29 (Bandung: Disjarah, 1977), h.78.

¹¹⁴Infantri berarti manusia mesin, pasukan infantri berfungsi sebagai penentu jalannya perang (raja medan perang); Pasukan Artileri adalah pasukan meriam dan Pasukan Zeni adalah pasukan perusak dan pembangun.

Komandemen I ini bukan merupakan resimen riil. Artinya, tidak lengkap persenjataannya dan peralatannya. Bahkan ada resimen yang persenjataannya hanya satu seksi.¹¹⁵

Untuk Komandemen II Jawa Tengah mempunyai 15 Resimen dan semuanya merupakan resimen infantri. Resimen-resimen tersebut terdapat di Kendal, Salatiga, Purwodadi, Pati, Cilacap, Purwokerto, Temanggung, Magelang, Purworejo, Pekalongan, Tegal, Surakarta (2 resimen) dan Yogyakarta ada 2 resimen.¹¹⁶ Sedangkan untuk Komandemen III Jawa Timur mempunyai kekuatan 9 resimen, yaitu di Madiun, Kediri, Bojonegoro, Surabaya, Madura, Jombang, Malang, Lumajang, Besuki dan resimen Nusa Tenggara di Bali.¹¹⁷

Komandemen TKR Sumatera mempunyai resimen-resimen di Bengkulu, Lahat, Tanjung Karang, Baturaja, Palembang, Jambi, Bangka, Belitung, Bukit Tinggi, Sawahlunto, Lubuk Alung, Pekenbaru, Karo-Langkat-Deli-Serdang, Asahan-Labuhan Bilik, Simolungun, Banda Aceh (Kutaraja), Meulaboh, Bireuen, Istimewa Medan Area, dan Tapanuli-Nias.¹¹⁸ Resimen ini juga merupakan satuan tempur. Tetapi pada tingkat Staf, atau Markas Komandemen terdapat unsur yang agak berlainan dengan di Jawa khususnya pada Staf Markas TKR. Pada tingkat Markas Komandemen terdapat beberapa seksi yakni :

¹¹⁵Disjarah TNI-AD, Almanak....., h. 25.

¹¹⁶Ibid., h. 26.

¹¹⁷Ibid.

¹¹⁸Ibid.

1. Seksi Personalia dan Sekretariat
2. Seksi Supply dan Keuangan
3. Seksi Operasi dan Organisasi
4. Seksi Intelijen
5. Seksi Perhubungan, Penerangan dan Liaison
6. Seksi Provost dan Polisi Tentara
7. Seksi Koordinasi Perjuangan Rakyat
8. Kesehatan Tentara
9. Accounting dan Compatables
10. Koordinasi Pemerintahan
11. Politik.¹²¹

Itulah divisi-divisai TKR yang telah terbentuk. Dengan terbentuknya TKR sebesar itu berarti jumlah pasukannya sangat besar pula. Hal ini menimbulkan masalah baru bagi Markas Besar Umum TKR. Adanya pasukan yang jumlahnya besar maka diperlukan tenaga perwira yang lebih banyak pula guna mengoordinasikannya. Terasa sekali kesulitan untuk memperoleh tenaga perwira yang memadai. Bagaimana caranya melengkapi pasukan TKR sebanyak itu dengan perwira yang cukup terdidik dan terlatih. Sebab, di Indonesia tenaga perwira yang demikian jumlahnya hanya sedikit.¹²⁰ Sementara itu, banyak diantara para komandan TKR ketika itu dipilih oleh bawahannya sendiri semata-mata hanya atas dasar karena kewibawaan atau semangatnya saja, tanpa

¹²¹Bagian Historiografi, *op. cit.*, h. 24-25.

¹²⁰Bada MUSEA DIY. Sejarah Perjuangan "Yogya Benteng Proklamasi" (Yogyakarta: 1985), h. 74.

dibekali oleh pengalaman ataupun latar belakang pendidikan kemiliteran. Adapun jumlah ex perwira (KNIL/PETA) tidak mencukupi kebutuhan, terutama untuk memenuhi kebutuhan tenaga perwira pertama seperti komandan peleton sampai kompi.¹²¹

Perlu diketahui bahwa susunan pasukan TKR mengikuti sistem susunan pasukan Jepang sampai dengan tingkat batalyon. Berikut ini aturannya :¹²²

"Sebuah regu terdiri atas 1 komandan regu, satu kelompok senapan mesin ringan yang berjumlah 4 orang dan satu kelompok senapan yang berjumlah 8 orang. Empat regu merupakan satu seksi, ditambah satu komandan seksi, 1 wakil komandan, dan 2 ordonans. Empat seksi terdiri atas 3 seksi senapan dan 1 seksi senapan mesin merupakan 1 kompi, ditambah kelompok pimpinan batalyon. Susunan di atas batalyon organisasinya diselenggarakan atas inisiatif para komandan satuan sendiri."

Kebutuhan mendesak akan tenaga perwira yang cukup terdidik dan terlatih yang mendorong Letnan Jenderal Urip Sumohardjo sebagai Kepala Markas Besar Umum sampai pada gagasan untuk membentuk secepat mungkin sekolah perwira dan kader secara darurat. Darurat dalam arti bersifat sementara, masa pendidikannya harus sesingkat mungkin (4-12 bulan) dan bisa terlaksana meski dengan perlengkapan dan tenaga pendidik yang amat minim atau seadanya.¹²³

Maka Markas Tertinggi TKR sendiri yang merintis kelahiran lembaga pendidikan perwira TKR yang pertama.

¹²¹Moehkardi, Pendidikan..., h. 23.

¹²²Disjarah TNI-AD, Almanak..., h. 27.

¹²³Moehkardi, Akademi Militer Yogya Dalam Perjuangan Fisik 1945-1949 (Jakarta: Inaltu, 1977), h. 3.

Pada tanggal 31 Oktober 1945, Letnan Jenderal Urip Sumohardjo selaku Kepala Staf Umum TKR, mengumumkan dibukanya Sekolah Kader dan Akademi Militer. Akademi Militer inilah yang dikemudian hari berkembang menjadi Akademi Militer Yogya, yang pada tahun 1957 menjelma menjadi Akademi Militer Nasional di Magelang dan tahun 1966 berintegrasi dengan Akademi Angkatan lain menjadi Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI).

Akademi Militer Yogya lahir dalam proses yang sangat sederhana. Pembentukannya tanpa adanya perencanaan, persiapan dan modal materi. Modal satu-satunya hanyalah ide, kemauan dan semangat pengabdian dari para pelaksananya. Suatu ide yang tepat untuk menghasilkan tenaga-tenaga perwira yang sangat berguna bagi kelangsungan organisasi TKR (Tentara Keamanan Rakyat).

Ide untuk mewmbentuk sekolah perwira didasarkan pada kondisi yang ada. Jumlah anggota TKR sangat besar tetapi tenaga perwira yang cukup terdidik dan terlatih belum mencukupi kebutuhan bahkan masih kurang. Oleh karena itu menyadari keberadaan itu, Kepala Staf Umum TKR menyerahkan tugas untuk membentuk akademi militer kepada Kolonel Samijo¹²⁴ yang mengetahui seluk beluk akademi militer. Tugas pertama-tama yang harus dilaksanakan adalah mencari suatu ruangan yang bisa digunakan sebagai kantor pendaftaran para calon yang kemudian membuat suatu pengumuman pembukaan Akademi Militer dan Sekolah Kader dan panggilan

¹²⁴Seorang ex perwira tentara Belanda tamatan Akademi Militer Kerajaan Belanda di Breda Nederland.

para calon melalui pers dan radio.¹²⁵ Pengumuman pembukaan Akademi Militer dan Sekolah Kader ditandatangani oleh Letnan Jenderal Urip Sumohardjo selaku Kepala Markas Besar Umum TKR, tanggal 31 Oktober 1945 dan disiarkan melalui pers dan radio antara lain Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 1 November 1945. Adapun isi panggilan atau pengumuman tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. Diboeka oleh Markas Tertinggi (Staf Oemoem) TKR, akademi militer dan sekolah kader.
2. Lamanya sekolah boeat pendidikan opsir (litnan klas 2) itoe 2 boelan, dan boeat pendidikan opsir rendahan (sersan klas 2) itoesatoe boelan.
3. Sjarat2 oentoek diterima menjadi moerid :
 - a. Anak laki2 oemoer 18 sampai 25 tahoen.
 - b. Berbadan sehat.
 - c. Mempoenyai kemampoean soenggoeh2 boeat menumpahkan djiwa dan raga oentoek Indonesia tetap merdeka.
 - d. Boeat sekolah kader haroes mempoenjai ketjakaan serendah2nya tamatan S.M.P. atau sepadan dengan itoe.
4. Pemoeda2 jang ingin sekolah terseboet haroes datang di jogjakarta dan menghadap di kantor sekolah terseboet (di belakang Gouv Mulo, di gedoeng Nijverhei doeloe), saban hari dari djam 8.30 sampai 3.30 sore, selambat2nya pada tanggal 7 November 1945.
5. Anak2 di loear Jogjakarta bisa naik sepoer klas 3 dengan pertjuma, dengan minta anprah doeloe dari kepala T.K.R. atau Pangreh Pradja di daerahnja.
6. Ongkos makan dan penginapan di Jogjakarta ditangoeng oleh T.K.R.
7. Anak2 jang tidak dapat masoek sekolah karena apkir ataoe kepenoehan tempat, akan dipoelangkan ke tempat2nja masing2.¹²⁶

Pembentukan Akademi Militer di Yogya pada tanggal 31 Oktober 1945 itu dapat dianggap sebagai pelopor pendidikan

¹²⁵ Moehkardi, *Akademi.....*, ibid.

¹²⁶ Surat Kabar "Kedaulatan Rakyat", tanggal 1 November Kolom V, halaman 1.

perwira di zaman Indonesia merdeka. Beberapa hari dan beberapa bulan kemudian, atas prakarsa komandan-komandan TKR di daerah-daerah kemudian juga dibentuk sekolah-sekolah perwira darurat. Di Tangerang atas prakarsa Komandan TKR Karesidenan Jakarta pada tanggal 10 November 1945 dibentuk Akademi Militer Tangerang. Di Malang atas prakarsa Komandan Divisi VII Surapati pada awal bulan November 1945, dibentuk Sekolah Kadet Malang (Sekolah Tentara Divisi VII). Di Berastagi Sumatera atas prakarsa Komandan Divisi IV TKR, pada bulan Desember dibentuk Sekolah Kadet Berastagi, dan di Bukit Tinggi atas prakarsa Komandan Divisi IX Sumatera Tengah pada tanggal 17 Februari 1946 dibentuk Sekolah Opsir Divisi IX Sumatera Tengah.¹²⁷

Dengan adanya akademi militer tersebut di atas, maka banyak dihasilkan tenaga-tenaga perwira yang bermanfaat bagi perkembangan dan kerlangsungan organisasi TKR. Hal ini berarti bahwa masalah kekurangan tenaga perwira bisa diatasi. Tenaga yang dibutuhkan untuk memimpin anggota TKR semakin banyak. Itulah hasil gagasan Kepala Staf TKR untuk memenuhi perlunya perwira-perwira yang berpendidikan, sehingga muncul pemimpin-pemimpin yang tangguh, organisasi TKR mampu menanggapi tantangan yang mengancam keamanan dan ketahanan negara.

TKR sebagai suatu organisasi yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan mempertahankan negara, selayaknya mempunyai suatu identitas tertentu baik dalam bentuk

¹²⁷ Moehkardi, Akademi, h. 6.

pakaian seragam atau yang lain. Sebab itu akan membantu dalam perjuangan TKR. Tetapi identitas yang dimiliki oleh anggota TKR sangat sederhana, karena situasi dan kondisi pada waktu itu. Secara keseluruhan TKR belum mempunyai pakaian seragam. Tidaklah mungkin untuk menentukan pakaian yang seragam bagi seluruh anggota tentara pada waktu itu. Bisa dipahami bahwa bahan pakaian sangat sulit diperoleh. Oleh karena itu anggota-anggota TKR memakai bahan pakaian yang beraneka ragam. Dengan demikian TKR merupakan sebuah pasukan, tetapi mempunyai seragam yang tidak seragam. Hal yang menjadi ciri persamaannya atau identitas TKR hanyalah ban putih bertuliskan TKR berwarna merah dan harus dipakai pada lengan sebelah kiri.¹²⁸

Masalah pakaian seragam itu kemudian dicari pemecahannya oleh Kepala Staf Umum TKR. Untuk menghilangkan ketidakseragaman yang mencolok, Letnan Jenderal Urip Sumohardjo mengeluarkan maklumat tanggal 6 November 1945, agar setiap komandan sedapat-dapatnya mengusahakan pakaian bagi anggota-anggotanya. Maklumat itu terutama ditujukan kepada komandan-komandan di seluruh Jawa dan Madura. Isi maklumat tersebut berisi tentang warna seragam, bentuk dan tanda-tanda pangkat militer untuk seluruh Jawa dan Madura. Isi maklumat tersebut yaitu:

Seperti telah kami oemoemkan beberapa waktoe jang laloe maka TKR sebeloem mempoenjai oeniform sendiri diharoeskan memakai tanda ban poetih pada lengan sebelah kiri.

Kami mengetahoei poela bahwa bahan pakaian pada

¹²⁸Amrin Imran, Urip Sumohardjo, h. 76.

waktoe sekarang ini koerang tjoekoep sehingga tidak moengkin kami perintahkan soepaja TKR seloeroehnja haroes beroeniform jang sama.

Mengingat kepentingan bahwa TKR haroes selekas moengkin beroeniform dan mengingat poela akan kekoerangan bahan pakaian seperti terseboet tadi maka dengan ini kami memerintahkan soepaja kepala-kepala sendiri oentoek memperlengkapi pradjoeritnja dengan oeniform.

Adapoen warna dari oeniform tadi oentoek sementara waktoe tidak perloe sama bagi seloeroeh TKR di Djawa dan Madoera, tapi hendaknya TKR dalam satoe karesidenan memakai oeniform jang sama baik dalam bentoe maoepoen warnanja.

Disamping warna dari oeniform jang tidak diharoeskan bersama-sama maka memerintahkan soepaja tanda pangkat kemiliteran disamakan dalam barisan TKR di seloeroeh Djawa dan Madoera.

Di bawah ini kami seboetkan tanda-tanda jang haroes dipakai sebagai tanda pangkat dalam TKR.

-Bentoe : Paralellogram (empat segi miring) bersoedoet co gard, panjang 35 mm dan tinggi 25 mm

-Setrip : Warna koening mas, lebar 3 mm

-Bintang : Sentral (roedji) 2 mm, berpadj lima

-Warna dasar :

Boeat Djenderal, Letnan Djenderal dan Djenderal Major warna dasar koening mas dan bintang perak.

- Djenderal bintang tiga
- Letnan Djenderal bintang doea
- Djenderal Major bintang satoe

Kolonel sampai pradjoerit warna dasarnja biroe toea

- Kolonel setrip empat bintang tiga
- Letnan Kolonel setrip empat bintang doea
- Major setrip empat bintang satoe
- Kapten setrip tiga bintang tiga
- Letnan Klas I setrip tiga bintang doea
- Letnan Klas II setrip tiga bintang satoe
- Pembantoe Letnan setrip tiga
- Sersan Major setrip doea
- Sersan Klas I setrip satoe di tengah bintang doea
- Sersan klas II setrip satoe di tengah bintang satoe
- Koprал setrip satoe di tengah
- Pradjurit klas I bintang koening doea
- Pradjurit klas II bintang koening satoe

Demikianlah dan kami mengharap dengan hormat dan sangat soepaja para kepala barisan TKR di seloeroeh Djawa dan Madoera memperhatikan serta menjalankan dengan seksama segala apa jang kami perin-

tahkan di atas.¹²⁹

Itulah kebijaksanaan yang diambil oleh Kepala Staf Umum untuk mengatasi ketidakseragaman pasukan TKR. Walaupun belum mempunyai pakaian seragam secara keseluruhan, tetapi diusahakan masing-masing karesidenan mempunyai seragam sendiri. Dengan adanya seragam dan identitas dalam pasukan TKR maka akan mendukung perjuangan.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh Letnan Jenderal Urip Sumohardjo mengatasnamakan Kepala Markas Tertinggi. Kalau diperhatikan maka belum pernah terlihat nama Panglima Tertinggi sebagai pimpinan ikut serta mempunyai kewajiban. Tetapi justru Kepala Staf Umum yang harus memikirkannya. Organisasi TKR yang lahir dalam keadaan seadanya perlu pimpinan yang ulet dan tangguh untuk memimpin dan mengorganisasi. Untuk yang seharusnya ada dan menjalankan tugasnya, ternyata tidak semua muncul, sehingga ada jabatan yang lowong.

Sejak Pemerintah secara resmi mengumumkan pengangkatan Moh. Sulyohadikusumo, Suprijadi dan Urip Sumohardjo sebagai Menteri Pertahanan ad interim, Panglima Tertinggi TKR dan Kepala Staf TKR, sampai pertengahan November 1945 hanya Pak Urip lah satu-satunya yang menduduki jabatannya.¹³⁰ Sebagaimana mestinya, jabatan yang diberikan kepada seseorang harus digunakan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab. Masalahnya, orang yang

¹²⁹ Surat Kabar "Kedaulatan Rakyat", tanggal 6 November 1945, Kolom VI, halaman 1.

¹³⁰ Amrin Imran, Urip Sumohardjo, h. 71.

diberi jabatan tersebut tidak di tempat. Muh. Sulyohadikusumo tidak muncul, begitu pula Supriyadi, bekas seorang perwira PETA yang memimpin pemberontakan di Blitar. Setelah peristiwa itu namanya tidak disebut-sebut dan diduga telah mati. Pengangkatannya sebagai Pimpinan Tertinggi TKR dimaksudkan untuk mengetahui keberadaannya, apakah masih hidup atau benar-benar sudah mati. Ternyata Supriyadi tetap tidak muncul.

Ketidakmunculan kedua pejabat tersebut tentunya menghambat organisasi TKR. Sebagai Kepala Staf, Pak Urip sangat merasakan adanya lowongan jabatan itu. Beliau harus bertindak sendiri mengorganisasi TKR, bekerja tanpa adanya pimpinan yang mengarahkan atau diajak koordinasi. Sampai satu bulan lebih harus bekerja memikirkan organisasi TKR sendiri. Hal ini tidak bisa dibiarkan terus menerus dan harus dicari jalan keluarnya. Timbullah keinginan yang kuat di kalangan Markas Tertinggi TKR untuk mengangkat pemimpin tertinggi yang efektif, karena tenaganya sangat diperlukan.¹³¹

Untuk mewujudkan keinginan tersebut maka Kepala Staf Umum TKR kemudian memprakarsai mengadakan pertemuan yang disebut dengan nama Konferensi TKR. Konferensi ini diselenggarakan pada tanggal 12 November 1945, bertempat di Markas Tertinggi TKR Yogyakarta. Hadir dalam konferensi ini adalah para perwira senior dalam MT-TKR, panglima-panglima divisi dan komandan-komandan resimen dari Pulau

¹³¹Nugroho Notosusanto, *Pejuang ...*, h. 43.

Jawa. Sedangkan Sumatera dan daerah-daerah lain di luar Jawa tidak mengirimkan utusan karena kesukaran komunikasi. Begitu pula Surabaya, Karena sedang bertempur melawan Inggris.¹³² Tujuan pertemuan pimpinan TKR tersebut adalah untuk memilih calon Menteri Pertahanan dan calon Panglima Besar TKR. Kedua hal itu dianggap sangat perlu dan mendasak, mengingat sampai saat itu Supriyadi dan Sulyohadikusumo tidak pernah menduduki jabatannya. Untuk jabatan Menteri Pertahanan diajukan nama-nama Sutan Syahrir, Amir Syarifudin dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Sedangkan nama calon Panglima Besar ada tiga orang, yaitu Kolonel Sudirman, Letnan Jenderal Urip Sumoharjo, dan Mulyadi Joyomartono dari Barisan Banteng Surakarta.¹³³ Dari nama-nama tersebut akhirnya terpilih Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Menteri Pertahanan dan Sudirman sebagai Panglima Besar TKR.

Hasil tersebut akan disampaikan kepada Pemerintah. Terserah kepada Pemerintah, menyetujui atau menolak calon-calon yang sudah terpilih. Dengan demikian usaha Pak Urip untuk memilih seorang menteri pertahanan dan seorang panglima besar sudah berhasil, walaupun harus menunggu keputusan Pemerintah satu bulan lagi. Ternyata hasil konferensi TKR itu tidak begitu saja diterima oleh Pemerintah. Sri Sultan Hamengku Buwono IX tidak diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Untuk jabatan itu Pemerintah sudah

¹³²Ibid.

¹³³Salim Said, op. cit. h. 32.

mempunyai calon yaitu Amir Syarifuddin yang sama sekali tidak diusulkan dalam konferensi. Ialah yang kemudian diangkat oleh Pemerintah untuk menduduki jabatan Menteri Pertahanan. Mengenai Kolonel Sudirman, Pemerintahapun ragu-ragu. Beliau hanya populer di kalangan tentara, tetapi Pemerintah kurang mengenalnya. Setelah Komandan Divisi V (Banyumas) itu memperlihatkan prestasi dalam pertempuran Ambarawa yang berhasil memukul mundur pasukan Sekutu ke Semarang, barulah Pemerintah meyakini kemampuannya.¹³⁴ Dan pada tanggal 18 Desember 1945 Pemerintah melantik Kolonel Sudirman sebagai Panglima Besar dengan pangkat Jenderal dan Urip Sumoharjo tetap sebagai Kepala Staf dengan pangkat yang sama Letnan Jenderal.

Sesudah pelantikan secara resmi itu Pak Urip sudah mempunyai seorang atasan, seorang panglima besar. Dengan demikian dalam menjalankan tugasnya tidak lagi sendirian dalam mengambil kebijaksanaan. Dan sudah tiba saatnya mereka segera menyempurnakan organisasi.

Tidak lama kemudian diadakan penyempurnaan organisasi TKR. Dengan demikian TKR mengalami perkembangan hingga menjadi TNI. Hal ini akan diuraikan dalam bab berikutnya.

¹³⁴Soemarsono, *op. cit.*, h. 28.

BAB IV

PERKEMBANGAN TENTARA KEAMANAN RAKYAT
MENJADI TENTARA NASIONAL PERJUANGAN

A. Terbentuknya Laskar atau Badan Perjuangan

Disamping terbentuk TKR yang merupakan tentara resmi, dalam rangka mempertahankan kemerdekaan RI juga terbentuk laskar rakyat atau badan perjuangan. Hal itu membuktikan betapa besar partisipasi rakyat dalam menegakkan kemerdekaan.

Badan perjuangan atau laskar rakyat pada hakikatnya adalah semua organisasi rakyat yang mempunyai pengurus (pemimpin) dan susunan organisasi yang teratur dan berkehendak untuk turut serta dalam usaha menjaga kesentausaan rakyat, baik ke luar maupun ke dalam.¹³⁵ Jadi pada prinsipnya badan perjuangan atau kelaskaran itu tumbuh dari keharibaan rakyat yang karena kesadarannya akan tanggung jawab dan tugas kewajibannya untuk mengabdikan kepada nusa dan bangsa. Adapun menurut ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 19, Bab I, pasal 1, "Laskar" ialah organisasi rakyat yang bersifat militer di luar ketentuan dan mendapat pengesahan dari Menteri Pertahanan.¹³⁶

¹³⁵A.H. Nasution, Tentara Nasional Indonesia 1 (GANA CO N.V. : Djakarta, 1963), h.31.

¹³⁶A.H. Nasution, Tentara Nasional Indonesia 2 (Seruling Masa : Djakarta, 1968), h. 31.

Timbulnya kelaskaran di Indonesia mempunyai bentuk dan corak yang berbeda dengan negara-negara lainnya hal ini disebabkan oleh kondisi dan situasi masing-masing negara. Menurut beberapa data sejarah timbulnya kelaskaran mempunyai beberapa segi (faktor) penyebab, antara ¹³⁷ :

1. Faktor psikologis, yaitu adanya dorongan dan kesadaran rakyat serta rasa tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat yang diliputi oleh semangat dan jiwa patriotik untuk ikut serta membela dan mempertahankan negara dari gangguan dan serangan musuh, yang pada masa itu keinginan Belanda untuk menguasai lagi.

2. faktor Politik, sesuai dengan pertumbuhan dan jalannya demokrasi di Indonesia maka pada masa tersebut oleh beberapa organisasi politik telah dibentuk berbagai kelaskaran guna membantu perjuangan bangsa dalam melawan tentara Sekutu dan Belanda.

3. Faktor historis ialah adanya pengalaman yang terus menerus yang dilakukan oleh nenek moyang kita dalam menghadapi penjajah.

Untuk klasifikasinya, kelaskaran yang ada di Indonesia dapat dibagi-bagi menjadi beberapa macam (golongan) antara lain, kelaskaran tingkat nasional dan lokal serta kelaskaran secara umum. Kelaskaran tingkat nasional yaitulaskar yang terdapat di seluruh wilayah tanah air, dan kelaskaran lokal adalah laskar yang tumbuh

¹³⁷Nyacinta Dyah avipa, Peranan Tentara Rakyat Mataram Dalam Perang Kemerdekaan 1945-1947 Di Yogyakarta Dan Jawa Tengah, Skripsi (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Sejarah, FPIPS, IKIP Sanata Dharma, 1991), h. 19

dan mempunyai peranan hanya terbatas pada lokasi atau daerah tertentu, sedangkan laskar umum adalah rakyat yang terdapat di daerah-daerah yang biasanya tidak menggunakan nama dan timbulnya atau lahirnya karena dorongan/semangat patriot untuk mempertahankan kemerdekaan negaranya dari gangguan/serangan musuh (timbul karena semangat spontanitas umum untuk membela negaranya).¹³⁸

Timbulnya laskar-laskar di Indonesia pada umumnya juga sebagai akibat dari sikap pemerintah Republik Indonesia yang pada waktu itu tidak segera membentuk tentara nasional sebagai alat untuk melawan musuh seperti harapan para pemuda. Rakyat Indonesia terutama para pemuda menginginkan agar pemerintah membentuk tentara yang dapat berperang melawan musuh tidak seperti BKR yang hanya bertugas menjaga ketentraman umum. Keragu-raguan sikap Pemerintah tidak dapat mengimbangi gelora semangat pemuda-pemuda pejuang, hingga akibatnya timbul pasukan-pasukan bersenjata dalam suatu suasana ketentaraan partikelir.¹³⁹ Maka selain BKR terdapat berbagai macam badan perjuangan, misalnya Komite Van Aksi, Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Rakyat Indonesia (Bara), Barisan Buruh Indonesia (BBI), Persatuan Pemuda pelajar Indonesia (PPI) Pemuda Republik Indonesia (AMRI).¹⁴⁰

¹³⁸ Ibid., h. 20.

¹³⁹ Tashadi dkk. Sejarah Revolusi Kemerdekaan 1945-1949 di DIY (Depdikbud: Jakarta, 1987), h. 91.

¹⁴⁰ Dephankam pusat Sejarah ABRI, Badan-badan

Jumlah kelaskaran semakin menjamur lebih-lebih dengan adanya maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945, tentang anjuran pembentukan partai-partai politik, maka partai-partaipun kemudian membentuk pasukan-pasukan bersenjata.¹⁴¹ Pada awal Nopember partai Sosialis Indonesia berdiri dan membentuk Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) yang dengan segera tumbuh menjadi "tentara partai". maka partai-partai lainpun segera mengikuti jejak ini, melahirkan "tentaranya" yang bersifat barisan pemuda bersenjata, yang resmi dikuasai oleh partai-partai. Barisan-barisan rakyat dan partai-partai politik itu kemudian disebut laskar-laskar.¹⁴²

Pesindo merupakan badan perjuangan yang baik secara politis maupun militer paling kuat. Laskar ini dibentuk dari fusi 7 organisasi yang mengikuti Konggres Pemuda tanggal 10 Nopember 1945 di Yogyakarta. Disamping itu memiliki kecerdasan dan kecakapan, sehingga merupakan perkumpulan yang paling dinamis dan kuat. Pesindo berhasil membangun kesatuan bersenjata dengan kekuatan 25.000 orang. Laskar partai yang lain yaitu Hisbullah (pasukan Allah), Sabillillah (barisan Jalan Allah) yang menjadi laskar Masyumi dan Barisan banteng yang merupakan kelanjutan Siliwangi atau TP-Siliwangi. Pada mulanya

¹⁴¹Tashadi dkk., ibid.

¹⁴² Dinas Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro, Rumpun Diponegoro Dan PengabdiannyaPS (Dinas Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro & C.V. Borobudur Megah : Semarang. 1977). h. 150.

Tentara Pelajar terbentuk di Jawa, namun para anggotanya bukan hanya terdiri dari pelajar dan mahasiswa dari Jawa, tetapi juga dari berbagai daerah Indonesia seperti pelajar Sulawesi, Nusa Tenggara, Aceh dan daerah lain.¹⁴³ TRIP Jawa Timur dan Tentara pelajar pada umumnya adalah suatu keunikan dan tidak ada duanya dalam sejarah di manapun di dunia ini. TRIP Jawa timur adalah wadah satuan pelajar pejuang bersenjata yang telah disusun dan ditata secara organisasi militer. Anggotanya terdiri dari pelajar-pelajar Sekolah Lanjutan Pertama dan Sekolah Lanjutan Atas yang baru berusia belasan tahun.¹⁴⁴

TRIP lahir dalam kancah Perang Kemerdekaan Indonesia seiring dengan pertumbuhan tentara. Sejak BKR terbentuk pelajar-pelajar Jawa Timur menggabungkan diri dengan nama BKR Pelajar. Setelah TKR terbentuk kemudian berubah menjadi TKR Pelajar dan tanggal 24 Januari 1945 menjadi Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) sesuai dengan perubahan nama TKR menjadi TRI. Karena pelajar-pelajar pejuang di daerah-daerah lainnya seperti Jawa tengah, Yogyakarta dan daerah-daerah lainnya di luar Jawa memakai nama Tentara Pelajar atau lebih dikenal dengan singkatannya TP, maka pelajar-pelajar pejuang bersenjata di Jawa Timur memakai nama Tentara Republik Indonesia Pelajar atau disingkat jutan Barisan Pelopor, menjadi

¹⁴³Sewan Susanto, *op.cit.*, h. 21.

¹⁴⁴Sagimun M.D., *MAS TRIP ...*, h. 342.

laskar PNI.¹⁴⁵ Itulah yang disebut kelaskaran Partai-partai, yang tumbuh bertumpu kepada Maklumat pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang pembentukan Partai-partai, serta anjuran Pemerintah untuk membentuk Laskar-laskar Partai.

Jenis kelaskaran yang lain yaitu, yang tumbuh sebagai pengejawantahan dari hasrat rakyat yang meluap-luap untuk turut serta dalam mengisi dan menegakkan Proklamasi 17 Agustus 1945. Kelaskaran ini tidak dijiwai oleh hasrat politik. Satu-satunya tujuan yang menggerakkan mereka untuk berjuang, ialah menegakkan Proklamasi 17 Agustus 1945. Hal ini karena adanya faktor psikologis.¹⁴⁶ Kedalam golongan ini antara lain, Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP), Tentara Pelajar (TP), Tentara Genie Pelajar (TGP), front pelajar, Corp Mahasiswa, Barisan Pemberontak Rakyat (KRIS) dan Laskar Rakyat.¹⁴⁷

Pada dasarnya, TRIP, TP, TGP, Front pelajar dan Corp Mahasiswa merupakan barisan-barisan pelajar atau kelaskaran pelajar. Diantara barisan pelajar tersebut, yang lebih dikenal adalah TRIP di Jawa timur pimpinan Mas Isman dan Tentara Pelajar di Yogyakarta sebagai inti TP Jawa Tengah pimpinan Akhmadi. Di Jawa Barat dibentuk

¹⁴⁵G. Moedjanto, *op.cit.*, h. 123-124.

¹⁴⁶Hyacinta Dyah Javipa, *op.cit.*, h. 19.

¹⁴⁷Pussemad, *op.cit.*, h. 28.

Tentara Pelajar TRIP dan sering disebut TRIP Jawa Timur.¹⁴⁸

Mengenai BPRI dari Bung Tomo, ini tidak berafiliasi dengan partai tertentu, tetapi cukup kuat persenjataannya serta memiliki sejumlah pemancar radio sehingga memiliki pengaruh politik yang cukup besar. Adapun KRIS adalah jenis laskar yang dibentuk oleh pemuda-pemuda Sulawesi (kebanyakan dari Minahasa) yang tinggal di Jawa pada akhir 1945, dengan tujuan untuk mempertahankan diri terhadap ancaman orang Indonesia lainnya yang menyangka orang-orang Kristen dari daerah itu pro Belanda. tetapi dengan pengorbanan yang besar, akhirnya bisa meyakinkan orang-orang Islam Indonesia bahwa nasionalisme mereka sama dengan orang-orang Islam.¹⁴⁹

Dari berbagai laskar atau badan perjuangan yang paling besar ialah Laskar Rakyat yang terdiri dari kesatuan-kesatuan lokal. Inisiatif pembentukannya datang dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yang merasa khawatir akan militasi rakyat yang kebanyakan memegang senjata api hasil rampasan dari tentara Jepang setelah Peristiwa Kota Baru. Selain itu maksud pembentukan laskar rakyat adalah

¹⁴⁸Ibid., h. 177.

¹⁴⁹G. Moedjanto, *op.cit.*, h. 125.

untuk membantu TKR yang telah ada dan memberi wadah bagi rakyat yang ingin mengangkat senjata melawan musuh.¹⁵⁰

Pada dasarnya Laskar Rakyat bersifat non politik, taat kepada militer sepenuhnya. tetapi kesatuan-kesatuan lokal kerap kali berafiliasi dengan partai, apalagi kalau pemimpinnya orang partai, seperti Laskar Rakyat Jawa Tengah dibawah Sakiman. Laskar Jawa Barat lalu berafiliasi dengan Peraturan Perjuangan (Murba) setelah Siliwangi hijrah, Laskar Rakyat Mataram dipimpin oleh Moh. Saleh Werdisastro tunduk sepenuhnya kepada Sri Sultan.¹⁵¹

B. Hubungan TKR dengan Laskar Rakyat

Keberadaan laskar rakyat di tengah masyarakat ternyata mendapat dukungan TKR. Untuk membantu tugasnya, TKR mendukung adanya gerakan rakyat bersenjata yang tergabung dalam laskar-laskar rakyat di seluruh Indonesia. Oleh karena itu pertumbuhan laskar rakyat makin banyak dan menjamur, apalagi pemerintah tidaklah menyatukan semua badan-badan bersenjata kepada TKR, tetapi disampingnya terus diperbolehkan berdiri barisan-barisan rakyat, terutama dari partai-partai politik dan kemudian disebut laskar-laskar.

¹⁵⁰P.J. Suwarno, "Birokrasi Dan Gerakan Rakyat di Yogyakarta" dalam Kumpulan Karangan ilmiah Dosen FPIPS IKIP Sanata Dharma (SPPS) (Yogyakarta : FPIPS IKIP Sanata Dharma No. 4 Seri XV, Oktober 1988), h. 9.

¹⁵¹G.Moedjanto, op.cit., h. 125.



Hal itu rupanya atas pertimbangan, bahwa rakyat berhak mempunyai tentara sendiri di luar tentara negara. Kekeliruan ini akan menjadi sumber kesulitan-kesulitan dimasa-masa yang akan datang, yang membawa berbagai pertikaian saudara dan memberikan kesempatan kepada partai-partai politik untuk memperjuangkan tujuannya dengan menggunakan senjata.¹⁵²

Menjamurnya jumlah laskar bersenjata lama kelamaan juga sering menimbulkan masalah-masalah. Hal ini disebabkan oleh karena latar belakang sosial, golongan, ideologi, agama dari laskar-laskar itu berbeda-beda.¹⁵³ Strategi yang diambil pun seringkali menimbulkan konflik dengan laskar sendiri.¹⁵⁴ Dalam keadaan yang demikian, lebih-lebih pada waktu itu belum stabil maka tidak jarang pihak yang satu dengan yang lain kadang-kadang menimbulkan hal-hal atau suasana yang tidak terkendalikan yang menjurus kepada kemungkinan bentrokan senjata. Hal ini bisa terjadi diantara laskar sendiri dan antara laskar dengan TKR.

Jadi bagi TKR, keberadaan laskar-laskar rakyat bisa berdampak positif maupun negatif. Dalam hal tertentu hubungan TKR dengan laskar baik, bahkan antara keduanya saling membantu dan bekerjasama. Misalnya, untuk melatih

¹⁵²A.H. Nasution, *TNI 1*, h. 145.

¹⁵³Tjokropranolo, *op.cit.*, h. 62.

¹⁵⁴Salim Said, *op.cit.*, h. 45.

anggota laskar menjadi tanggung jawab TKR dan sebaliknya pun laskar membantu dalam mempertahankan kemerdekaan. Namun dalam kerjasama itu hal-hal lain bisa muncul, antara TKR dan laskar bisa terjadi perselisihan bahkan bentrokan .

Bertolak dari pasal bahwa TRI adalah satu-satunya organisasi militer negara RI, maka pemerintah berusaha mempersatukan seluruh tenaga pejuang bersenjata di dalam satu wadah yaitu dengan digabungkannya laskar-laskar rakyat ke dalam TRI. Pemerintah melihat bahwa kenyataannya selain adanya tentara yang resmi di Indonesia, masih banyak pasukan-pasukan yang terdiri dari laskar-laskar rakyat yang berasal dari berbagai golongan yang mempunyai perbedaan masing-masing. Persoalannya adalah bagaimana mengkoordinasikan segenap tenaga pejuang bersenjata yang pada waktu itu terpecah-pecah, yang kadang-kadang satu sama lain sering terjadi pertikaian. Harus diakui tidak sedikit jasa dan pengorbanan yang telah mereka lakukan. Namun bagaimanapun juga mereka tetap harus dihimpun agar tidak bertindak sendiri-sendiri dan agar kekuatan yang kita miliki dapat dipergunakan semaksimal mungkin dalam menghadapi musuh.

Untuk mengajak laskar-laskar rakyat mau bergabung kedalam TRI, maka Markas Tertinggi TRI mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh wakil dari setiap laskar yang intinya untuk membicarakan tentang persatuan dan kesatuan komando dalam menghadapi serangan musuh yang ingin

menjajah kembali Indonesia. Walaupun setiap wakil laskar yang datang menyadari pentingnya kesatuan komando militer, namun pada senjata. Adakalanya terjadi perselisihan atau bentrokan di dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, yaitu dalam usaha perebutan senjata dan persaingan untuk mendapatkan dukungan rakyat.¹⁵⁵ Karena pemerintah belum mampu membayar gaji atau perbekalan kepada pasukan bersenjataanya, maka kedua golongan itu terpaksa mengandalkan bantuan penduduk dalam hal makanan, jasa-jasa dan perumahan.

Sementara itu, jumlah laskar rakyat yang berdiri semakin menjamur. Pihak pemerintah belum menyatukan organisasi tersebut dengan TKR. Kesalahpahaman bahwa rakyat boleh mempunyai tentara sendiri-sendiri, akhirnya menimbulkan kesulitan-kesulitan antara laskar-laskar rakyat dengan TKR. Hal itu justru memperlemah persatuan rakyat dalam perjuangan melawan penjajah.

Untuk menghadapi adanya pertumbuhan pasukan-pasukan bersenjata di luar TKR, maka Markas Tertinggi Tentara Keamanan Rakyat (MTTKR) mengeluarkan maklumat tanggal 6 Desember 1945, yang ditandatangani oleh Kepala Staf Umum (KSU) Letjen. Urip Sumoharjo. Dalam maklumat tersebut diterangkan tentang pendirian TKR terhadap laskar Rakyat, untuk menghilangkan salah paham antara Barisan-barisan

¹⁵⁵Ulf Sundhaussen, *op.cit.*, h. 40.

Rakyat dengan TKR atau sebaliknya. Secara ringkas diterangkan bahwa:¹⁵⁶

"Tentara tidak merupakan golongan tersendiri di luar masyarakat; bukan satu kasta yang berada di atas masyarakat", Kepala Staf mengatakan : Hak dan kewajiban untuk mempertahankan keamanan ke dalam dan ke luar bukanlah monopoli tentara ... di kalangan rakyat juga terdapat banyak orang yang merasa tidak puas dengan melakukan tugas mereka sehari-hari : disamping pekerjaan mereka yang biasa, mereka membentuk laskar-laskar dan organisasi perjuangan, dan itu semua membuktikan hasrat mereka untuk secara aktif berperan serta dalam upaya menjamin keutuhan negara Indonesia. Perkembangan ini sangat menggembirakan dan sesungguhnya pembentukan Laskar Rakyat ini adalah atas anjuran pihak TKR Untuk melawan kolonialisme tidaklah cukup jika kita hanya mengerahkan tentara kita saja. Seluruh penduduk harus ikut serta dalam perjuangan, dengan tentara sebagai tulang punggungnya Laskar Rakyat harus tetap merupakan organisasi kerakyatan Tugas Laskar Rakyat adalah membantu mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yakni sebagai organisasi petani, organisasi buruh, yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yakni sebagai organisasi petani, organisasi buruh, yang mempertahankan mereka sendiri, pabrik sendiri, dan sebagai organisasi tempur, yang merupakan pasukan tempur pembantu disamping TKR Sikap TKR (terhadap mereka) adalah untuk bekerjasama dengan mereka, dan memberikan setiap bantuan yang dapat mereka berikan, dimana perlu

Dari isi maklumat tersebut terlihat bahwa keberadaan TKR dengan laskar-laskar rakyat saling mendukung di dalam tugas mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Pendirian TKR terhadap laskar rakyat memang tepat, akan tetapi tidaklah cukup dengan pernyataan demikian

¹⁵⁶Ibid., h. 41. (Isi maklumat secara lengkap bisa dilihat di dalam A.H. Nasution, TNI 1, h. 146-148).

saja. TKR dan laskar harus mempunyai tugas masing-masing yang jelas.¹⁵⁷

Perkembangan membuktikan, bahwa pembagian tugas seperti yang diuraikan dalam maklumat itu ternyata tidak teratur, sehingga di dalam organisasi dan pelaksanaan operasi-operasi pada akhirnya tentara dan laskar tidak berbeda-beda, melainkan hanyalah dapat dibedakan sebagai laskar pemerintah dengan laskar partikelir, dan bukan sebagai tentara dengan laskar atau barisan rakyat.¹⁵⁸ Kenyataannya masih terjadi bentrokan-bentrokan antara laskar dengan TKR.

Hal itu menyiratkan, bahwa pada masa itu kerjasama dan persatuan antara TKR dengan laskar rakyat masih ada kekurangan dan TKR sebagai lembaga pertahanan belum teratur, sehingga akhirnya perlu direorganisir atau disempurnakan. Bentrokan-bentrokan yang timbul antara TKR dengan laskar rakyat memperkuat tuntutan perwira-perwira tentara agar keseluruhan lembaga pertahanan direorganisasikan kembali.

C. Perkembangan TKR menjadi TNI

Sampai pada akhir bulan Desember 1945, keberadaan TKR belum menunjukkan kemampuannya untuk dijadikan sebagai tentara nasional. Ternyata TKR (Tentara Keamanan Rakyat)

¹⁵⁷A.H. Nasution, *op.cit.*, h. 149.

¹⁵⁸*Ibid*

masih memiliki kelemahan-kelemahan, baik soal nama maupun organisasi. Oleh karena itu TKR harus disempurnakan hingga ditemukan nama TNI sebagai tentara nasional.

Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar TKR yang dilantik pada tanggal 18 Desember 1945, mempunyai tugas untuk menyempurnakan organisasi TKR.¹⁵⁹ Perkembangan TKR meliputi nama, dan organisasi (struktur, jumlah divisi).

Langkah pertama dalam rangka penyempurnaan organisasi TKR ialah mengganti nama. Dalam bulan Desember itu juga para panglima Divisi kembali diundang ke Yogyakarta untuk membicarakan penataan kembali TKR. Dari pembicaraan itu dicapai kesepakatan mengenai perubahan nama. Dengan penetapan Pemerintah No. 2/S.D. tanggal 7 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, dengan singkatan tetap TKR. Kementrian Keamanan menjadi Kementrian Pertahanan.¹⁶⁰

Nama TKR tidak berlangsung lama. Pada tanggal 24 Januari 1946 Markas tertinggi TKR mengadakan sidang kembali, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh pimpinan TKR mengenai pentingnya kesatuan susunan ketentaraan. Oleh karena itu pada tanggal 25 Januari 1946 dikeluarkanlah maklumat mengenai perubahan nama dari TKR menjadi TRI (tentara Republik Indonesia). TRI ini akan merupakan satu-satunya organisasi militer RI dan dalam susunannya

¹⁵⁹Tjokropranolo, op.cit., h. 69.

¹⁶⁰Pussemad, Sejarah ..., h. 27.

berdasarkan atas ketentuan militer internasional.¹⁶¹ Akan tetapi di dalam maklumat tersebut (No. 4/S.d. 1946) Pemerintah tidak menegaskan dan tidak menentukan tentang bagaimana status dan kedudukan organisasi bersenjata di luar TRI, seperti Laskar-laskar dan Barisan Rakyat, yang sejak bulan Desember 1945, memang diakui hak hidupnya oleh Markas tertinggi.¹⁶² Keadaan susunan militer saat itu masih simpang siur dan belum teratur. Waktu itu mereka masih banyak yang belum dapat menerima tawaran dari pihak TRI. Hal tersebut disebabkan mereka tidak ingin mengikat diri secara organisasi atau garis-garis yang tertentu dengan pemerintah. Mereka merasa dirinya terutama sebagai rakyat, yang berjuang untuk revolusi secara rakyat pula.¹⁶³ Pada umumnya mereka hanya mau bekerjasama dalam setiap pertempuran yang harus dihadapi, tanpa harus tunduk kepada komandonya, hanya kalau dalam pertempuran yang harus dihadapi, tanpa harus tunduk kepada komandonya, hanya kalau dalam pertempuran tersebut dibutuhkan suatu kesatuan komando baru mereka mau tunduk kepada komandan pasukan TRI yang pada waktu itu bersama-sama menghadapi musuh.

Menghadapi sikap dari masing-masing laskar tersebut Sudirman dan Urip Sumohardjo yang pada waktu itu menjabat

¹⁶¹Nugroho Notosusanto, Sejarah dan Hankam, h. 72.

¹⁶²Yahya Muhaimin, op.cit., h. 32.

¹⁶³A.H. Nasution, TNI 1, h. 259.

sebagai pimpinan tertinggi dari TRI bersikap sabar. Untuk kesekian kalinya kedua pemimpin tersebut menjelaskan pokok-pokok pemikirannya mengenai penyempurnaan organisasi tentara dihubungkan dengan situasi yang sedang kita hadapi bersama. Kedua pemimpin tersebut juga mengemukakan pendapat tentang persatuan dan kesatuan antara TRI sebagai pasukan yang dibentuk oleh pemerintah dan laskar rakyat yang berasal rakyat yang sama-sama mempunyai kewajiban membela dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Apabila kedua kekuatan tersebut kita himpun menjadi kesatuan yang bulat dan dibawah satu komando maka kita akan dapat menekan musuh.¹⁶⁴

Untuk mengatasi masalah yang timbul dalam pertemuan antara TRI dan laskar rakyat maka dalam pertemuan tersebut diputuskan untuk membentuk suatu Biro Perjuangan yang akan menampung laskar-laskar rakyat dalam satu wadah. Biro ini dimasukkan sebagai salah satu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang diketuai oleh Presiden,¹⁶⁵ untuk mengendalikan mereka. Biro Perjuangan ini merupakan biro khusus dalam kementerian Pertahanan yang tumbuh menjadi alat Menteri Pertahanan. Selain itu Biro juga akan memberi

¹⁶⁴ Dinas Sejarah TNI-AD, Soedirman Prajurit TNI Teladan (Departemen Pertahanan dan Keamanan : Jakarta, 1985), h.

¹⁶⁵ Salim Said, op.cit., h. 48.

bantuan yang dibutuhkan oleh laskar baik dalam persenjataan maupun dalam bantuan pangan.¹⁶⁶

Setelah berjalan cukup lama maka Presiden mengambil inisiatif untuk membuat suatu panitia yang akan membentuk organisasi Tentara Rakyat Indonesia yang diketuai sendiri. Maka pada tanggal 5 Mei 1947 Presiden RI menetapkan :¹⁶⁷

1. Dalam waktu sesingkat-singkatnya mempersatukan Tentara Republik Indonesia dan Laskar-laskar menjadi satu organisasi Tentara.
2. Menyerahkan pelaksanaannya kepada Panitia yang terdiri dari :
 - a. Ketua (Presiden RI).
 - b. Wakil Ketua I (Wakil Presiden RI).
 - c. Wakil Ketua II (Menteri Pertahanan)
 - d. Wakil Ketua III (Panglima Besar)
 - e. Anggota 17 orang (dari pihak Kementrian Pertahanan, Angkatan Darat, Laut, Udara, TRI dan Badan Kelaskaran).

Dalam waktu kurang lebih satu bulan akhirnya panitia tersebut dapat menyelesaikan tugasnya untuk menyatukan TRI dengan laskar-laskar menjadi satu organisasi tentara, yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pada tanggal 3 Juli 1947 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan

¹⁶⁶ Dinas Sejarah TNI-AD, op.cit., h.

¹⁶⁷ Pussemad, Sedjarah TNI-AD ..., h. 29.

Penetapan (B.N. 1947 No. 24), yang menetapkan:¹⁶⁸

1. Mulai tanggal 3 Juni 1947, disyahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia, disingkat TNI.
2. Segenap Anggota Angkatan Perang dan segenap Anggota Laskar yang bersenjata, mulai saat ini dimasukkan seperangkat kedalam Tentara Nasional Indonesia.
3. Pucuk Pimpinan Tentara Nasional Indonesia dipegang oleh Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia.

Demikianlah sejak itu di Indonesia hanya ada satu wadah yang menampung seluruh kekuatan pejuang bersenjata baik yang berasal dari rakyat maupun dari pasukan TRI.

Sesudah diresmikan berdirinya TNI tersebut maka dalam awal pembentukan TNI susunan organisasinya, masih seperti semula masa TRI, khususnya Divisi-divisi TNI. Perubahan yang terjadi pada saat itu adalah perubahan nama, yaitu dari Tentara Republik Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia.

Organisasi TKR baru mengalami perubahan penyusunan yang cukup jelas hanya pada masa TRI. Perubahan itu meliputi perubahan daerah tanggung jawab dan jumlah Divisi. Susunan organisasi TRI terdiri dari tiga unsur yaitu sebagai berikut :¹⁶⁹

¹⁶⁸ Ibid.

¹⁶⁹ Vidya Yudha No. 48, h. 25.

1. Markas Besar Umum Tentara terdiri dari :

- a. Kepala Markas Umum (MBU)
- b. Bagian Personalia
- c. Bagian Penyelidik Militer
- d. Bagian Operasi
- e. Bagian Siasat Perintah
- f. Bagian Pengangkutan
- g. Sekretariat dan Tata Usaha

2. Kementrian Pertahanan Bagian militer meliputi :

- a. Direktorat Jenderal
- b. Kepala Staf Kementrian
- c. Urusan Personalia
- d. Urusan Kehakiman Mahkamah Tinggi
- e. Bagian Pendidikan Wajib Militer
- f. Bagian Artileri
- g. Bagian Infantri
- h. Bagian Topografi
- i. Bagian Zeni
- j. Bagian Perlengkapan
- k. Bagian Pengumpulan Perlengkapan
- l. Bagian Kesehatan
- m. Polisi Militer
- n. Tata Usaha

3. Divisi-divisi

Dalam penyusunan Divisi ini terdapat penyusutan jumlah Divisi semasa TKR yang berjumlah 10 Divisi di Jawa menjadi 7 Divisi, sedang untuk Sumatera tetap 6 Divisi

Susunan Komandemen dihapus. untuk nama Divisi di Jawa memakai nama para pahlawan bangsa yang sesuai dengan tokoh pahlawan wilayah Divisi itu, ataupun pengabdian nama pahlawan yang dipandang erat dengan satuan dimana Divisi itu berlokasi sebagai nama Binatang, sebagai lambang Komando Divisi.¹⁷⁰

Adapun urutan Divisi-Divisi TRI secara keseluruhan ialah sebagai berikut :¹⁷¹

1. Di Jawa

a. Divisi I Siliwangi

meliputi daerah Jawa Barat minus daerah Cirebon dan Tasikmalaya.

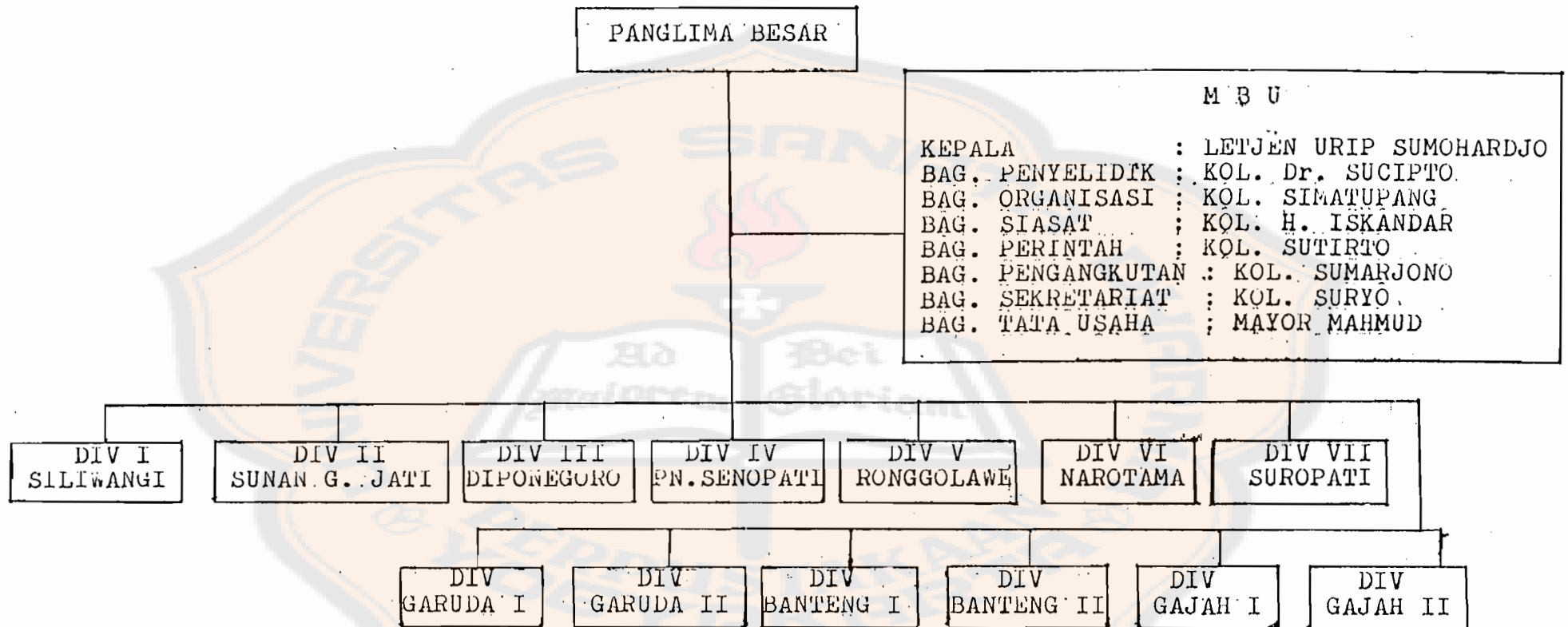
b. Divisi II Sunan Gunungjati

meliputi daerah Cirebon, Tasikmalaya, Tegal dan Banyumas.

¹⁷⁰ Ibid.

¹⁷¹ Vidya Yudha No. 29, h. 78.

B A G A N O R G A N I S A S I T R I



Sumber : Vidya Yudha No. 48/ 1985.

- c. Divisi III Diponegoro
meliputi daerah Pekalongan, Kendal dan Yogyakarta.
 - d. Divisi IV Panembahan Senopati
meliputi daerah Surakarta, Semarang dan sebagian Madiun.
 - e. Divisi VI Ronggolawe, meliputi daerah Pati, Bojonegoro dan sebagian Madiun.
 - f. Divisi VI Narotama
meliputi daerah Kediri, Surabaya dan Madura.
 - g. Divisi VII Surapati
meliputi daerah Malang, Besuki.
2. Di Sumatera
- a. Divisi Gajah I berkedudukan di Bireuen.
 - b. Divisi Gajah II berkedudukan di Medan atau Pematang Siantar.
 - c. Divisi Banteng I berkedudukan di Sibolga.
 - d. Divisi Banteng II berkedudukan di Bukittinggi.
 - e. Divisi Garuda I berkedudukan di Lahat.
 - f. Divisi Garuda II berkedudukan di Palembang.

Itulah susunan organisasi TRI. Setelah menjadi TNI susunan organisasinya tidak langsung mengalami perubahan. Pada awalnya, susunan organisasinya masih seperti pada masa TRI, khususnya Divisi-Divisi TNI. Baru diadakan perubahan susunan TNI sesudah terjadinya agresi militer Belanda pertama tanggal 21 Juli 1947.

TNI itu merupakan hasil penyatuan antara TRI dengan laskar-laskar dan bahan-bahan perjuangan.¹⁷² Dengan demikian setelah penyatuan tersebut, nama tentara Republik berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia. bagaimana reaksi terhadap perubahan nama dari TRI menjadi TNI tersebut ? Ternyata perubahan nama tersebut mengundang perhatian dan reaksi yang positif dari laskar-laskar dan badan perjuangan. Laskar-laskar yang murni dan berjuang atas dasar tujuan menegakkan, membela dan mempertahankan proklamasi, memahami dengan sebaik-baiknya maksud dari penyatuan itu. Hal ini tidak lain adalah demi keselamatan proklamasi itu sendiri. Laskar-laskar itu dengan penuh kesadaran bergabung kedalam TNI. Perubahan nama TNI itu lebih ditekankan daripada nama TRI. Demikian pula pelbagai laskar-laskar yang lahir dan berjuang atas dasar keagamaan, lambat laun menyadari perlunya penyatuan ke dalam TNI.¹⁷³ Kiranya nama TNI dapat memuaskan aliran-aliran dalam laskar-laskar, yang berpendirian bukan sebagai alat negara, melainkan sebagai alat rakyat, alat revolusi, alat bangsa. Hal itu karena nama TR (epublik) I tetap dianggap sebagai sebutan untuk alat negara, sedangkan nama TN (asional) I terasa sebagai alat bangsa Indonesia.¹⁷⁴

¹⁷² Rohmah Soemohardjo, op.cit., h. 104.

¹⁷³ Disjarah TNI-AD, Almanak, h. 36.

¹⁷⁴ A.H. Nasution, TNI Diilid 1, h. 87.

Demikianlah tanggapan atau reaksi yang muncul terhadap perubahan nama TRI menjadi TNI. Akan tetapi untuk sementara dekrit yang menyatakan bahwa perubahan TRI TNI hanya berarti perubahan nama belaka, karena setengah bulan kemudian mulailah agresi belanda I.¹⁷⁵ Setelah itu baru diadakan perubahan-perubahan hingga menjadi organisasi tentara yang teratur sampai sekarang ini. Laskar-laskar yang bergabung ke dalam TNI, dengan bijaksana disusun ke dalam Brigade-brigade tersendiri, seperti Brigade XVI, Brigade XVIII. jadi tentara kita dimulai dengan nama TKR berubah menjadi TRI dan akhirnya TNI.

Itulah sejarah Tentara Keamanan Rakyat, pembentukan dan perkembangannya menjadi TNI. Untuk selanjutnya akan diuraikan suatu kesimpulan dari keseluruhan penulisan ini dalam bab berikut ini.

¹⁷⁵ Ibid.

BAB V

P E N U T U P

Dalam bab-bab terdahulu telah dipaparkan pembahasan masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam bab berikut ini akan disajikan kesimpulan dan saran-saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan terdahulu.

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Latar belakang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat meliputi dua faktor, yaitu faktor tak langsung dan faktor langsung. Secara tak langsung, didukung oleh adanya warisan tenaga terlatih sebagai modal untuk mendirikan tentara, baik mantan tentara KNIL pada jaman Hindia Belanda maupun mantan tentara PETA dan Heiho khususnya pada jaman pendudukan Jepang. Sedangkan faktor langsung pembentukan Tentara Keamanan Rakyat adalah adanya tiga kekuatan asing yang mengganggu keberadaan negara RI yang merdeka. Hal itu disebabkan oleh adanya tentara Jepang yang masih bersenjata lengkap yang tidak mau mengakui kemerdekaan RI, karena harus mempertahankan status quo. Selain itu adanya ancaman dari tentara NICA yang dibantu sekutu untuk mengembalikan kekuasaan

kolonial ke Indonesia. Faktor tak langsung di atas merupakan penghantar atau katalisator dan faktor langsung sebagai api penyulut. Faktor langsung itulah yang mendesak Pemerintah RI untuk membentuk Tentara Keamanan Rakyat, apabila didukung oleh adanya tenaga-tenaga terlatih dan berpengalaman dibidang militer.

2. Tentara Keamanan Rakyat terbentuk dengan maklumat Presiden tanggal 5 Oktober 1945, yang menyatakan bahwa "Untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat". Pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) merupakan awal adanya tentara dan penjelmaan atau penyempurnaan dari Badan Keamanan Rakyat (BKR), yang dibentuk tanggal 22 Agustus 1945. Sebenarnya keputusan untuk membentuk tentara kebangsaan sudah dibicarakan pada tanggal 19 Agustus 1945, dalam sidang PPKI yang kedua. Tetapi pada tanggal 22 Agustus keputusan itu diganti dengan pembentukan BKR yang merupakan korps pejuang bersenjata dan bukanlah tentara. Hal ini karena Pimpinan Negara RI menganut politik cinta damai. Pembentukan TKR ternyata mendapat tanggapan yang sangat baik dari rakyat khususnya para pemuda. Pemuda menyambut dengan gembira, sebab tindakan pemerintah adalah tepat untuk mengatasi keadaan. Sudah waktunya pemerintah untuk membentuk tentara yang

bertanggungjawab dibidang pertahanan negara. Antusias para pemuda diwujudkan dengan penggabungan diri ke dalam TKR. Untuk menyusun organisasi TKR dilakukan di Markas Besar TKR yaitu di Yogyakarta, di sebuah kamar Hotel Merdeka (sekarang Hotel Garuda). Letnan Jendral Urip Sumoharjo bertanggung jawab terhadap penyusunan organisasi. Sebagai organisasi tentara, TKR belum mempunyai pakaian seragam secara keseluruhan. Keseragamam pakaian hanya ada di tiap-tiap karesidenan, mengingat kesulitan mencari bahan pakaian. Identitas yang seragam hanyalah ban putih pada sebelah lengan kiri. Adapun untuk menghasilkan perwira-perwira yang bisa mendidik anggota TKR selanjutnya, didirikan Akademi Militer Yogya, yang menjadi pelopor bagi daerah lain. TKR mempunyai Panglima Besar yaitu Jendral Soedirman, yang akan bertugas menyempurnakan organisasi TKR bersama Letnan Jendral Urip Sumoharjo selaku Kepala Staf Umum TKR.

3. Tentara Keamanan Rakyat mengalami perkembangan hingga menjadi Tentara Nasional Indonesia tanggal 3 Juni 1947, melalui Tentara Keselamatan Rakyat (TKR) tanggal 1 Januari 1946 dan Tentara Republik Indonesia (TRI) tanggal 25 Januari 1946. Dilihat dari waktunya ternyata perkembangan tersebut cukup lama. Hal ini disebabkan karena usaha

penyatuan Laskr-Laskar Rakyat dan Badan Perjuangan kedalam organisasi ketentaraan mengalami kesulitan. Sampai pada masa TRI mereka belum mau menggabungkan diri. Setelah tanggal 3 Juni 1947 disyahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI), mereka menggabungkan diri dengan TRI menjadi satu organisasi tentara. Mulai saat itu dimasukkan serentak kedalam TNI. Nama TNI dianggap lebih cocok sebagai alat Bangsa Indonesia.

B. Kelancaran dan Hambatan Penelitian

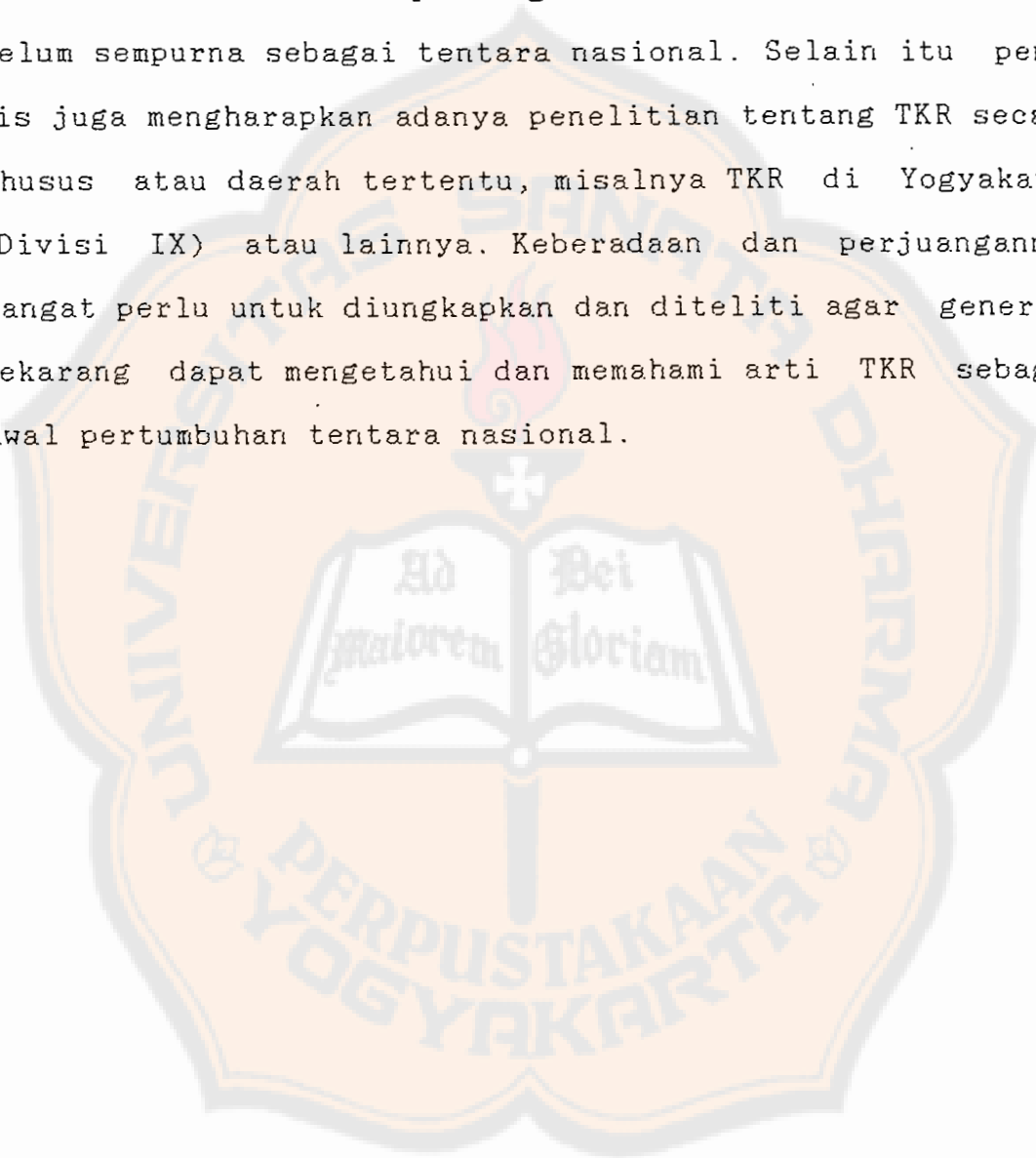
Pada dasarnya kelancaran yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu adanya sumber-sumber yang diperlukan baik sumber pustaka maupun sumber informan, sehingga mendukung penulisan. Disamping itu adanya pengarahan dari pembimbing I dan pembimbing II:

Tetapi hambatan-hambatan yang dirasakan penulis berasal dari diri penulis yaitu kurang bisa membagi waktu dan tidak intensif dalam penyusunan sehingga akhirnya tersendat-sendat dan skripsi ini terwujud dalam waktu yang cukup lama.

C. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis mengharapkan penelitian selanjutnya untuk meneliti mengenai

perjuangan TKR secara umum untuk mempertahankan KemerdekaanIndonesia. Hal ini mengingat arti perjuangan yang telah dilakukan walaupun Organisasi TKR sendiri masih belum sempurna sebagai tentara nasional. Selain itu penulis juga mengharapkan adanya penelitian tentang TKR secara khusus atau daerah tertentu, misalnya TKR di Yogyakarta (Divisi IX) atau lainnya. Keberadaan dan perjuangannya sangat perlu untuk diungkapkan dan diteliti agar generasi sekarang dapat mengetahui dan memahami arti TKR sebagai awal pertumbuhan tentara nasional.



DAFTAR PUSTAKA

- Adam Malik,
1962 Riwayat dan Perjuangan Sekitar Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Djakarta : Penerbit Widjaja.
- Ahmaddani, G. dkk.
1985 Pemuda Indonesia Dalam Demensi Sejarah Perjuangan Bangsa. Jakarta: Depdikbud.
- Amrin Imran,
1971 Sedjarah Perkembangan Angkatan Darat. Djakarta : Dephankam Pusat Sedjarah.
- _____,
1983 Urip Sumohario. Jakarta : Depdikbud.
- Atmakusuma, Penyunting,
1982 Tahta Untuk Rakyat Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buana IX. Jakarta : PT. Gramedia.
- Badan Musyawarah Musea,
tt Sejarah Perjuangan Yogya Benteng Proklamasi. Jakarta : Badan Musyawarah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dephankam Pusat Sejarah ABRI,
1970 Biografi Pahlawan Dalam Lingkungan ABRI. Djakarta.
- _____,
1976 Museum Pusat ABRI Satria Mandala (Bukuk Panduan) . Jakarta.
- tt 30 Tahun ABRI. Jakarta.
- _____,
1983 Badan-Badan Perjuangan. Jakarta.
- Dinas Sejarah Militer TNI-AD
1972 Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI-AD. Jakarta : Departemen Pertahanan dan Keamanan RI.
- _____,
1977 Seri Monumen Sejarah TNI-AD Jilid I. Jakarta : Dinas Sejarah TNI-AD.
- _____,
1985 Soedirman Prajurit TNI Teladan. Jakarta : Departemen Pertahanan dan Keamanan RI.
- _____,
1977 Almanak Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat 1945-1973. Jakarta.

- Dinas Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro
 1977 Rumpun Diponegoro Dan Pengabdiannya. Semarang :
 Dinas Sejarah Militer Kodam VII / Diponegoro &
 Borobudur Megah .
- Dyah Tavipa, Hyacinta,
 1991 Peranan Tentara Rakyat Mataram Dalam Perang Kemerde-
 kaan 1945-1949 Di Yogyakarta Dan Jawa Tengah, Krip-
 si. Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Sejarah, FPIPS,
 IKIP Sanata Dharma.
- Iwa Kusuma Sumantri,
Sedjarah Revolusi Indonesia Diilid Kedua. (tanpa
 tempat, tahun, penerbit).
- Jahja Muhaimin,
 1971 Perkembangan Militer Dalam Politik Di Indonesia
 1945-1949. Yogyakarta : UGM.
- Joyce C. Lebra,
 1988 Tentara Gemblengan Jepang. Jakarta : Sinar Harapan.
- Kahin, George McTurnan,
 1970 Nasionalism and Revolution in Indonesia. New York :
 Cornel University.
- Kelompok Kerdja Staf Angkatan Bersendjata,
 1964 Sedjarah perjuangan Bersendiata Bangsa Indonesia.
 Djakarta.
- Lemhanas,
 1985 Kewiraan Untuk Mahasiswa. Jakarta : Gramedia.
- Louis Gottschlak,
 1986 Mengerti Sejarah (terjemahan). Jakarta : UI-Press.
- Mani, P.R.S.
 1989 Jejak-jejak Revolusi 1945. Jakarta : Pustaka Utama
 Grafiti
- Mirim Budiardjo,
 1986 Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia.
- Moedjanto, G.
 1988 Indonesia Abad ke-20 Jilid 1. Yogyakarta : Kanisius.
- Moehkardi,
 1977 Akademi Militer Yogya Dalam Perjuangan Pisik 1945-
 1949. Jakarta : PT. Inaltu.
- 1979 Pendidikan Perwira TNI-AD di Masa Revolusi. Jakarta:
 PT. Inaltu
- Muhammad Rusli Karim,
 1981 Peranan ABRI Dalam Politik. Jakarta ; Yayasan Idayu.

Nasution, AH.,

1971 Kekariaan ABRI. Djakarta : Seruling Masa.

1965 Sedjarah Perdiuangan Nasional di Bidang Bersendjata.
Djakarta : Mega Bookstore.

1970 Sekitar Perang Kemerdekaan Diilid 1. Bandung : Dinas
Sedjarah AD & Angkasa.

1977 Sekitar Perang Kemerdekaan Jilid 2. Bandung : Disja
ran AD.

1963 TNI Diilid 1. Djakarta: GANACO N.V.

1968 TNI Diilid 2. Djakarta: Depdikbud.

Nugroho Notosusanto,

1980 Pejuang Dan Prajurit. Jakarta : Sinar Harapan.

1968 Pertempuran Surabaya. Djakarta : Lembaga Sedjarah
Hankam.

1960 Sedjarah Dan Hankam. Djakarta: Lemhanas.

1979 Tentara Peta Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indone
sia. Jakarta.

Poerwodarminto, WJS.,

1952 Kamus Umum Bahasa Indonesia. Djakarta: Pustaka Djaya

Pusat Sedjarah Militer AD,

1960 Kronologi Sedjarah TNI 1945. Bandung.

1965 Sedjarah TNI-AD 1945-1965. Bandung.

Rosihan Anwar,

1977 Kisah-Kisah Jakarta Setelah Proklamasi. Jakarta :
Pustaka Jaya.

Sagimun, M.D.

1989 MAS TRIP Dari Brigade Pertempuran ke Brigade Pembran-
gunan. Jakarta: Bina Aksara.

1989 Peranan Pemuda Dari Sumpah Pemuda Sampai Proklamasi.
Jakarta: Bina Aksara.

1985 Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Fasisme. Jakar-
ta: PT. Idayu

Saleh As'ad Djamhari,

1979 Ikhtisar Sejarah Perjuangan ABRI 1945 - Sekarang.
Jakarta : Dephankam.

- Salim Said,
1992 Genesis Of Power General Sudirman and The Indonesian Military In Politics 1945-1949. Singapore and Jakarta: Institute Of Southest Asian Studies & PT. Pustaka Sinar Harapan.
- Samawi,
1970 25 Tahun Merdeka, Jogjakarta: Kedaulatan Rakyat.
- Sartono Kartodirdjo,
1973 Sejarah Nasional Indonesia Jilid V. Jakarta : Departemen P & K.
- Simatupang, TB.
1954 Pelopop Dalam Perang Pelopor Dalam Damai. Djakarta : Jajasan Pustaka Militer.
- 1956 Soal-Soal Politik di Indonesia. Djakarta: Gaja Raja.
- Sidik Suraputra, D.,
1991 Revolusi Indonesia Dn Hukum Internasional. Jakarta : UI-Press.
- Soemarsono,
1977 Mengenang Almarhum Panglima Besar Jenderal Soedirman. Yogyakarta: Corps Cacat Veteran RI DIY.
- Sundhaussen, Ulf,
1985 Politik Militer Indonesia 1945 - 1957 Menuju Dwi Fungsi ABRI. Jakarta : LP3ES.
- Tatang Sumarsono,
1993 Didi Kartasasmita Pengabdian Bagi Kemerdekaan. Jakarta : PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Tjokropranolo,
1992 Jenderal Soedirman Pemimpin Pendobrak Terakhir Penjaiahan di Indonesia. Kisah Seorang Pengawal. Jakarta: PT. Surya PERSINDO DIVISI.
- Artikel :
- Majalah "Vidya Yudha", No. 48, 1985, Disjarah AD.
- Majalah "Vidya Yudha", No. 29, 1977, Disjarah AD.
- Madjalah Sedjarah Militer Angkatan Darat 3
1958 Biro Sedjarah Angkatan Darat.
- Soewarno, P.J.,
"Birokrasi Dan Gerakan Rakvat Di Yogvakarta" dalam SPPS No. 4 Seri XV, Oktober, 1988. Yogyakarta: FPIP IKIP Sanata Dharma.

Surat Kabar "Kedaulatan Rakyat", terbitan 1 November 1945,

Surat Kabar "Kedaulatan Rakyat", terbitan 6 November 1945.



LAMPIRAN



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Alamat	Tgl. Wawancara
1.	Purnama	Blimbing Sari CT IV No 33 Sleman.	28 April 1992
2.	Mangkusadarma	Jl. Hayam Wuruk 7 Yogyakarta.	7 Mei 1992
3.	Sutrisno	Jl. Kalipan No 3 Kel. Kotabaru, Kec. Kotabaru Yogyakarta	21 Juli 1992
4.	Ngadiman HS.	Jl. Anyelir 2/270, Condong Catur, Yogyakarta.	21 Juli 1992
5.	Darto Harnoko	Balai Kajian Seja- rah Jl. Brigjen Katamso No 28	11 Agustus 1992
6.	Daniel Sutar- jo	CokroKusuman JT II Yogyakarta.	15 Agustus 1992

No	Nama	Alamat	Tgl. Wawancara
7.	Sidung H.R.	Ds. Jongkang, Sari- harjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta.	15 Agustus 1992
8.	Asmadi	Sleman Permai Blok I / 28	15 Agustus 1992
9.	Ignasius Lo- yola	Swakarya 173, Koco- ran Km. 5 Jl. Kali- urang, Yogyakarta.	15 Agustus 1992
10.	R.H. Suryono	Swakarya Jl. Kali - urang Km. 5, Yogya.	15 Agustus 1992
11.	Soewondo SH.	Jl. Kaliurang Km. 5 gang kenari No. 67, Yogyakarta.	15 Agustus 1992
12.	H. Muhammad Sarosa	Swakarya 7A Jl. Ka- liurang Km. 4,5 , Yogyakarta.	15 Agustus 1992

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

No	Nama	Alamat	Tgl. Wawancara
13.	KRT. Mandoyo-negoro	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 79 , Yogyakarta.	20 Agustus 1992
14.	Andreas Djurdjani	Jl. Kaliurang Km. 5,8 , Yogyakarta.	20 Agustus 1992
15.	D. Soewondho	Swakarya 54 Jl. Kaliurang Km. 5 , Yogyakarta.	20 Agustus 1992
16.	Wardanu	Jl. Kaliurang Km. 5 Gg. Megatruh No.6	20 Agustus 1992
17.	RM. L. Soemartono	Jl. AM. Sangaji 53 A, Yogyakarta.	11 Januari 1992

